

**PARTISIPASI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
DI KABUPATEN SIDRAP
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Tesis

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Sains

Diajukan Oleh :

Abdul Rahman

MAPD. 18.1174



**PROGRAM PASCASARJA
MAGISTER ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
JAKARTA
2012**

**PARTISIPASI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
DI KABUPATEN SIDRAP
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Dijjukan Oleh

**ABDUL RAHMAN
MAPD 18.1174**

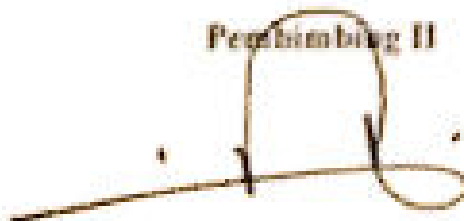
Telah disetujui oleh Pembimbing
Pada tanggal, Agustus 2012

Pembimbing I



Prof. Dr. Aziz Haily, MA


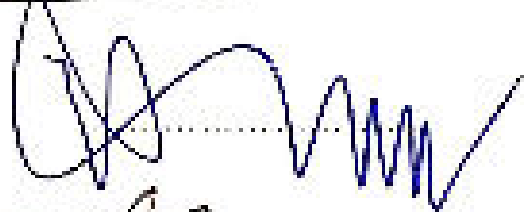
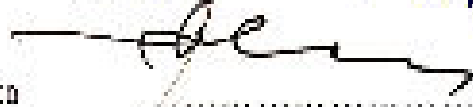
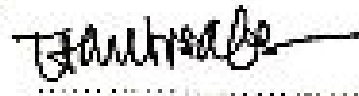

Pembimbing II



Supardan Mudecong, SH, MH


LEMBARAN PENGESAHAN

Tesis ini telah disajikan pada hari Jumat tanggal 31 bulan Agustus Tahun 2012 dibatasiapan sidang penguji yang terdiri dari :

- | | | | |
|----|---|---------|---|
| 1. | Prof. Dr. Drs. H. Khasan Effendy, M.Pd | Ketua |  |
| 2. | Prof. Dr. Drs. H. I Nyoman Sumaryadi, M.Si | Anggota |  |
| 3. | Prof. Dr. Edward Hutagalung, M.Hum | Anggota |  |
| 4. | Drs. Trimurti Santosa, MI | Anggota |  |
| 5. | Dr. Hyronimus Rowa, M.Si | Anggota |  |

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana
Magister Administrasi Pemerintahan Daerah


Prof. Dr. Drs. H. Khasan Effendy, M.Pd



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
PROGRAM PASCASARJANA**

Kampus, Jalan Panglima J. Raya, Jalan Panglima Km. 20, Jalan Panglima Garuda, Kode Pos: 40168, Telp. (027)
77962511 dan (027) 7701675 <http://www.kemendagri.go.id> e-mail: info@kemendagri.go.id kepala@kemendagri.go.id
Jakarta Jl. Panglima Raya, Blok. 101 Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan Kode Pos: 12560 Telp. (021)
7003032, 7003033 Fax. (021) 7824157

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN TESIS**

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : **ABDUL RAHMAN**
NIM/Angkatan : **MAD 18.1174**
Judul Tesis : **PARTISIPASI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN
SIDRAP PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Alamat / Asal Instansi : -

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, tesis yang saya susun ini adalah hasil karya sendiri bukan hasil jiplakan/plagiat baik sebagian maupun keseluruhan dari karya tulis orang lain.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan kesadaran tanpa tekanan dari siapapun, apabila dikemudian hari ternyata saya terbukti melakukan pelanggaran akademik tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi Dicabut ijazahnya serta gelar yang telah diberikan pada saya.

Jakarta, Agustus 2012

Melaksanakan Yang Bersangkutan,



ABDUL RAHMAN

Motto,

"Sekali layar terkembang pantang surut ke tepian. Raihlah cita-citamu dan jadilah orang yang berguna untuk diri sendiri, orang lain, masa dan bangsa".

Kupersembahkan kepada:

Orang tua tercinta: Ayah dan Ibu yang selalu mencurahkan kasih sayang dalam bentuk doa untukku, dan istri yang tiada henti memotivasi dalam meraih cita-cita

ABSTRACT

Non-Governmental Organization Participation on Development in Sidrap Region the Province of South Sulawesi

By : Abdul Rahman

Counselor I : Prof. Dr. Aziz Haidy, MA.

Counselor II : Supardan Mudeong, SH, MII.

The study about Non-Governmental Organization participation on development was set in Sidrap Region, the province of South Sulawesi. It based on fact that religion development need more than governmental decision in all kind of policy. Non government organizations were increase in numbers on recent years. And they played role as determinant factor to control the design of development and to collect people participation across the area.

This research is focused at the effort to answer the problem of how non-governmental organization took its participation on region development, and what is the government efforts to increase level of participation along those organization.

Using qualitative approach, the researcher as research instrument collected, processed, analyzed, interpreted and verified all of information and data from participatory observation on the setting which describe communication and relationship between government and non-governmental organization. Data and information obtained through participatory observation were, then, enriched and completed by unstructured interview to the good informants who meet the reach cases prerequisites, so its validity and reliability could be counted on. Afterwards, data and information were clarified, described, and explained using triangulation method with any social sciences theories, government sciences and the researcher's knowledge in order to formulate the answer of research questions.

The research findings pointed out that participation of non-governmental organization is constitute as well as what Davis constructed on his theory. Davis believes that participation are form from emotional involvement, situation of groups, contribution to the aim and sharing responsibility. This research found all element on non-governmental participation, but its still limited. Furthermore, participation culture is weak among non-governmental organization. Seeing this problem it is recommend that government its self that could take an initiative to empowering all non-governmental organization. Through this, the level of participation could be increased, hipotetically.

ABSTRAK

Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Daerah
di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan
Oleh : Abdul Rahman

Pembimbing I : Prof. Dr. Aziz Haily, MA.

Pembimbing II : Supardan Madsong, SH, MH.

Penelitian tentang partisipasi lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah dilakukan di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa pembangunan daerah membutuhkan lebih dari sekedar keputusan pemerintah dalam segala bentuk kebijakan. Lembaga swadaya masyarakat telah meningkat jumlahnya dalam beberapa tahun terakhir, dan memainkan peran determinan mereka sebagai pengawas rancangan pembangunan serta menghidupkan partisipasi secara luas.

Fokus penelitian diarahkan pada upaya menjawab pertanyaan tentang bagaimana lembaga swadaya masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah dan apa upaya pemerintah dalam meningkatkan derajat partisipasi lembaga-lembaga swadaya masyarakat dimaksud.

Melalui pendekatan kualitatif, peneliti sebagai instrument penelitian mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasikan dan memverifikasi setiap data dan informasi yang diperoleh dari hasil observasi partisipatoris terhadap setting latar peristiwa, yang berkaitan dengan komunikasi dan hubungan antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Data dan informasi yang diperoleh melalui observasi partisipatoris itu selanjutnya diperkaya, dilengkapi dan disempurnakan melalui wawancara bebas tak berstruktur kepada *key informants* yang memenuhi syarat sehingga validitas dan reliabilitas data dan informasi dapat dipertanggung jawabkan. Setelah melalui proses triangulasi, data dan informasi itu selanjutnya diklasifikasi, dideskripsi, diklasifikasi dan diverifikasi dengan teori-teori ilmu sosial dan ilmu pemerintahan serta pengetahuan peneliti untuk merumuskan jawaban terhadap pertanyaan penelitian.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi lembaga swadaya masyarakat dibentuk oleh unsur-unsur yang persis disebutkan dalam teori Davis. Davis percaya bahwa partisipasi dibentuk dari elemen keterlibatan emosi, sintasi kelompok, kontribusi pada tujuan dan pembagian tanggung jawab. Semua elemen itu ditemukan di lokasi penelitian tetapi dengan derajat yang terbatas. Lebih lanjut nampak bahwa budaya partisipasi lemah dalam tubuh lembaga swadaya masyarakat sendiri. Karenanya direkomendasikan bahwa pemerintah harus mengambil sendiri inisiatif untuk memberdayakan LSM.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas Karunia dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul *"PARTISIPASI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN SIDRAP PROVINSI SULAWESI SELATAN"*. Tesis ini mengungkapkan bagaimana peran lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah. Peran itu sejauh yang dipetakan dalam tesis ini masih terbatas pada pengutan fungsi kontrol subkultur sosial terhadap pelaksanaan tugas pemerintah di subkultur kekuasaan. Keterbatasan mana selayaknya dimaknai pemerintah sebagai ruang melalui mana pemerintah dapat merangkul lembaga swadaya masyarakat dalam aktivitas pembinaan dan pemberdayaan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Dari sisi analisis terdapat banyak ruang kosong analisa yang ditinggalkan. Menyadari semua itu, penulis membuka diri untuk kritik dan masukan konstruktif.

Ada banyak orang yang terlibat membantu penulis dalam penyelesaian akhir naskah ini. Kepada mereka penulis berhutang budi. Teristimewa kepada para guru besar, dosen dan civitas akademika yang terlibat langsung dalam perampungan tulisan ini, lembaran singkat ini tidak pernah mampu mewakili rasa hormat dan terima kasih penulis kepada Bapak/Ibu. Secara personal penulis ingin berterima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Drs. H. I. Nyoman Sumaryadi, M.Si selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi di lembaga pendidikan tercinta ini, juga bertindak langsung sebagai penguji dalam ujian tesis ini.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Khasan Iffendy, M.Pd selaku Direktur Program Magister Administrasi Pemerintahan Daerah (MAPD) yang dengan sabar mendengar permohonan penulis tentang keterbatasan materi penulisan ini.
3. Bapak Prof. Dr. Aziz Haily, MA selaku Dosen Pembimbing I yang telah mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran. Bahkan dari kondisi sulit sekalipun, Bapak telah memberikan bimbingan, arahan, dan pendampingan yang tak ternilai.
4. Bapak Supardan Mudeang, SH, MH selaku Pembimbing II yang memberikan semangat terus menerus kepada penulis guna penyelesaian tulisan ini. Tanpa Bapak, tulisan ini hanya setumpuk data yang tak berarti.
5. Bupati Sidrap dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Sidrap yang mencanangkan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Rekan-rekan LSM di Kabupaten Sidrap yang sangat membantu selama proses penelitian dan ikut serta menjadi informan penelitian ini.
7. Rekan-rekan civitas akademika IPDN yang membantu dalam memberikan saran, kritik, masukan dan dorongan semangat.
8. Keluarga Tercinta, Orang tua, Istri tersayang Entin Permawati atas dukungan Moral kepada penulis selama ini. Tulisan ini adalah bagian dari cinta dan kasih sayang keluarga kepada penulis.

Kepada civitas akademika IPDN, tulisan ini dipersembahkan. Semoga sedikit yang tertulis disini dapat menjadi kelimpahan dalam pencarian keilmuan.

Jakarta, Agustus 2012
Penulis

Abdul Rahman, SE

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Pembatasan Masalah	7
1.4. Perumusan Masalah	8
1.5. Maksud dan Tujuan Penelitian	8
1.5.1. Maksud Penelitian	8
1.5.2. Tujuan Penelitian	8
1.6. Kegunaan Penelitian	9
1.6.1. Kegunaan Teoritis	9
1.6.2. Kegunaan Praktis	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	10
2.1. Kajian Pustaka	10
2.1.1. Pembangunan Daerah	10
2.1.1.1. Konsep Pembangunan	10
2.1.1.2. Pembangunan Daerah	12
2.1.1.3. Pembangunan Partisipatif	21
2.1.2. Konsep Partisipasi	25
2.1.3. Lembaga Swadaya Masyarakat	31
2.1.3.1. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat	31
2.1.3.2. Lembaga Swadaya Masyarakat di Subkultur Sosial	36
2.1.3.3. Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat	37
2.2. Kerangka Pemikiran	43
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1. Desain Penelitian	47
3.2. Variabel Penelitian	48

3.3.	Unit Analisis, Populasi, Sampel dan Responden.....	49
	3.3.1. Unit Analisis.....	49
	3.3.2. Populasi.....	49
	3.3.3. Sampel.....	49
	3.3.4. Informan.....	50
3.4.	Tehnik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	52
3.5.	Tehnik analisis.....	54
3.6.	Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		59
4.1.	Gambaran Umum Lokasi dan Institusi Penelitian	59
	4.1.1. Kondisi Geografis.....	59
	4.1.2. Kondisi Demografi.....	60
	4.1.3. Kondisi Budaya dan Faktor Pendorong Pembangunan	64
4.2.	Hasil Penelitian.....	66
	4.2.1. Pembangunan Kabupaten Sidrap dan Hasilnya	66
	4.2.1.1. Penyelenggaraan Urusan Wajib.....	68
	4.2.1.2. Penyelenggaraan Urusan Pilihan.....	116
	4.2.1.3. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.....	121
	4.2.1.4. Hasil Pembangunan.....	123
	4.2.2. Bentuk Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat.....	124
4.2.	Pembahasan	131
	4.2.1. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat.....	131
	4.2.2. Aspek-aspek Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat.....	144
	4.2.2.1. Keterlibatan Mental dan Emosi LSM dan Pemerintah.....	144
	4.2.2.2. Situasi Kelompok.....	146
	4.2.2.3. Kontribusi LSM pada Tujuan Bersama.....	148
	4.2.2.4. Tanggung Jawab Bersama LSM.....	152
	4.2.3. Upaya Pemerintah Daerah Meningkatkan Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat.....	154
	4.2.3.1. Pembinaan Melalui Perjanjian Bersama.....	154
	4.2.3.2. Bantuan Keuangan.....	156
	4.2.3.3. Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	157
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		159
5.1.	Kesimpulan	159
5.2.	Saran.....	160
DAFTAR PUSTAKA.....		161
LAMPIRAN		168

DAFTAR TABEL

No.		Halaman
1.	Data Pertumbuhan Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Sidrap Tahun 2009-2012.....	4
2.	Data Aktivitas Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Sidrap Tahun 2012.....	5
3.	Daftar Informan Penelitian.....	52
4.	Kegiatan dan Jadwal Penelitian.....	58
5.	Jumlah Penduduk, Tingkat Pertumbuhan dan Kepudatan Penduduk Kabupaten Sidrap 2012.....	62
6.	Jumlah Kontak LSM Kabupaten Sidrap Tahun 2010-2011.....	126
7.	Jumlah Aktivitas Penyerapan Informasi Masyarakat LSM Kabupaten Sidrap Tahun 2010-2011.....	128
8.	Jumlah Aktivitas Penilaian Pembangunan oleh LSM Kabupaten Sidrap Tahun 2010-2011.....	131

DAFTAR GAMBAR

No.		Halaman
1.	Tingkatan dan Bentuk Partisipasi Masyarakat.....	42
2.	Paradigma Penelitian.....	46
3.	Bentuk Kontak dan Kontribusi LSM bagi Pembangunan Daerah Sidrap.....	151

DAFTAR LAMPIRAN

No.		Halaman
1.	Pertanyaan Penelitian.....	42
2.	Kerangka Pemikiran.....	46
3.	Bentuk Kontak dan Kontribusi LSM bagi Pembangunan Daerah Sidrap.....	150

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Persolan hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah fenomena yang menarik untuk diteliti. Pada banyak kasus, kepentingan pemerintah dan masyarakat berbeda satu sama lain yang menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pemerintahan Kabupaten Sidrap juga menghadapi fakta yang sama. Kabupaten yang bernama lengkap Sidenreng Rappang ini merupakan salah satu Kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan yang sedang berkembang menuju ke arah kehidupan yang lebih baik. Memiliki luas wilayah secara keseluruhan 1.882,20 Km², Sidrap yang terbagi menjadi 11 kecamatan merupakan model daerah penyedia pangan masa depan. Selain menghasilkan beras dari sistem pertanian sawah irigasi teknis, Sidenreng Rappang juga berpotensi sebagai daerah penghasil komoditi jambu mete, kakao dan kemiri. Terask menjadi komoditas utama daerah Sidrap. Demikian halnya dengan produksi telur ayam yang terus meningkat dan mencapai nilai distribusi konsumsi hingga sebagian wilayah Kalimantan.

Masalah Pemerintah Kabupaten adalah bagaimana mengelola potensi pertanian menjadi kekuatan ekonomi daerah Sidenreng Rappang pada tingkat awal dan jika mungkin menjadi andalan provinsi Sulawesi Selatan. Cara

mencapai tujuan itu, pemerintah Kabupaten berupaya membingkai kepentingan rakyat dan pemerintah dalam visi misi Kabupaten.

Visi pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025, substansi RPJM Nasional, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat, serta visi-misi Bupati/Wakil Bupati. Visi Pembangunan Sidenreng Rappang kurun waktu 2009-2013 sebagaimana tertuang dalam RPJMD adalah : "Mewujudkan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Pusat Agribisnis Modern dan Lima Terbaik di Sulawesi Selatan dalam Pembangunan Manusia". Yang dimaksud dengan *Pengembangan Agribisnis Modern* adalah melakukan upaya pada bidang produksi, pengolahan hasil dan pemasaran secara terpadu. Yang dimaksud dengan 5 (Lima) Terbaik, indikatornya adalah dengan menggunakan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibandingkan IPM Kabupaten lainnya dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Mengingat IPM Kabupaten Sidenreng Rappang pada urutan 7 (tujuh). Indikator IPM lainnya adalah PDRB Per Kapita sebagai salah satu indikator untuk melihat rata-rata kemampuan masyarakat dari sisi pendapatan.

Guna mencapai visi di atas, dikembangkan misi pembangunan daerah yang mencakup lima aspek masing-masing : (1) Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Agribisnis-Agroindustri melalui upaya menciptakan iklim yang kondusif dalam pengembangan usaha agribisnis dan agroindustri; (2) memantapkan Peningkatan Kualitas Manusia; (3) Membangun dan mengembangkan sarana

dan prasarana Daerah; (4) Memelihara iklim kondusif dalam kehidupan masyarakat yang didalamnya terdapat upaya fasilitasi jaringan dan kolaborasi organisasi lokal/dacrah dan pengarus-utamaan kesetaraan dalam mewujudkan kesetaraan golongan, kesetaraan gender, keadilan sosial dan ekonomi dalam semua lini kehidupan masyarakat, dan memfasilitasi berfungsinya organisasi keagamaan, lembaga adat, organisasi wanita, lembaga swadaya masyarakat, Pemuda dan kemasyarakatan; (5) mengefektifkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Khusus tentang partisipasi lembaga swadaya masyarakat dalam kerangka pemeliharaan iklim kondusif dalam kehidupan kemasyarakatan, sebagaimana dikonstruksikan Ndraha tentang peran subkultur sosial, lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Sidrap memainkan peranan dalam berbagai bidang. Dalam bidang kesatuan bangsa, lembaga sosial masyarakat berperan aktif dalam sosialisasi nilai-nilai kebangsaan dan kerukunan hidup termasuk mengembangkan seni tradisional Kabupaten Sidrap. Dalam bidang politik, lembaga sosial masyarakat berperan mentransformasikan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam hukum dan pemerintahan. Dalam bidang sosial, peran lembaga sosial masyarakat tampak dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pemberantasan buta huruf. Sementara dalam bidang ekonomi, lembaga sosial masyarakat mengambil peran besar dalam membina para petani melalui diskusi kelompok tani dan pembelajaran teknik bercocok tanam.

Selama tahun 2009-2012 tercatat bahwa lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Sidrap mengalami peningkatan signifikan. Pertumbuhan dari sisi

kuantitas dan fokus juga bentuk hubungan lembaga swadaya masyarakat dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1
Data Pertumbuhan Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Sidrap
Tahun 2009-2012

FOKUS PERHATIAN LSM	TAHUN			
	2009	2010	2011	2012
Politik dan Hukum	3	4	4	8
Ekonomi Pembangunan	2	2	4	6
Sosial Budaya	2	4	4	4
Agraria dan Masyarakat Desa	1	1	2	4
Jumlah	8	11	14	22

Sumber : Bappeda Kabupaten Sidrap dan Olah data penelitian

Dari data di atas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan jumlah lembaga swadaya masyarakat dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2012 terdapat 22 hub lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam 4 bidang yaitu bidang politik dan hukum, bidang ekonomi dan pembangunan, bidang sosial budaya serta bidang agrarian dan masyarakat desa. Peningkatan paling signifikan nampak pada jumlah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang politik dan hukum. Meski demikian, tidak selalu aktivitas lembaga swadaya masyarakat mendapat respons positif pemerintah daerah.

Dari 22 buah lembaga swadaya masyarakat yang ada pada tahun 2012, tercatat hanya 5 lembaga yang memiliki hubungan kerja resmi dengan pemerintah daerah. Adapun aktivitas lembaga dimaksud dapat dibaca sebagaimana tampilan tabel berikut ini.

Tabel 2
Data Aktivitas Lembaga Swadaya Masyarakat
Kabupaten Sidrap Tahun 2012

No.	Nama	Fokus Isu	Keterkaitan dengan Pemda /SKPD
1	2	3	4
1.	Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Masyarakat Pemantau Legislatif dan Eksekutif (LSM-KOMPLEKS)	Hubungan Pemerintahan/ Pengawasan Kinerja Pemda	Pemda-DPRD
2.	LSM LPEK (Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat)	Pembangunan Ekonomi	Happeda Dispeda Dispedag Dispenhud
3.	LSM KIPPA RI	Percepatan Korupsi	Pemda-DPRD
4.	Lembaga Mitra Lingkungan	Lingkungan Hidup	Disperinn Dis.LIH
5.	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)	Keluarga Berencana	Diskes

Sumber : Happeda Kabupaten Sidrap, 2012.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa isu-isu bidang sosial mulai menempati posisi sentral dalam aktivitas lembaga swadaya masyarakat yang resmi terdaftar di Happeda Kabupaten Sidrap. Masih terdapat lembaga swadaya masyarakat lainnya yang memiliki nkte pendirian, tetapi belum terdaftar pada data base pemerintah daerah. Setiap lembaga memiliki peran penting dalam pengawasan pembangunan kabupaten.

Meski demikian, lembaga sosial masyarakat Kabupaten Sidrap membutuhkan lebih dari sekedar keterlibatan dalam program pemerintah. Peran dan posisi sebagai unsur subkultur sosial mengharuskan lembaga swadaya masyarakat Kabupaten Sidrap meredefinisi makna partisipasi dan kerjasama. Partisipasi lembaga swadaya masyarakat selama ini baru bergerak pada level media pemerintah. Artinya, lembaga swadaya masyarakat semata-mata ikut terlibat dalam program pemerintah. Keterbatasan sumber daya, baik keuangan maupun manusia menjadi kendala pemaknaan partisipasi. Dari sisi keuangan, secara umum lembaga swadaya masyarakat belum dapat disebut mandiri. Demikian pula dari sisi sumber daya manusia, dibutuhkan lebih banyak orang yang secara nurani terpanggil untuk memberdayakan lembaga swadaya masyarakat sebagai kekuatan subkultur sosial.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pengamatan terhadap fenomena partisipasi lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah di Kabupaten Sidrap sebagaimana diungkapkan di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Meskipun visi dan misi Kabupaten Sidrap menggariskan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, namun partisipasi itu belum sepenuhnya optimal;

2. Lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Sidrap sebagai bagian dari masyarakat belum dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan daerah.
3. Ada peningkatan jumlah lembaga swadaya masyarakat dari tahun ke tahun tetapi hanya sedikit sekali yang terlibat aktif dalam pembangunan daerah Kabupaten Sidrap.
4. Hanya ada sedikit lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat untuk menjalin hubungan kemitraan dengan pemerintah.
5. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia menyebabkan belum optimalnya peran lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan.
6. Peran lembaga swadaya masyarakat sebagai mitra pemerintah masih terbatas pada upaya mendukung program sehingga dibutuhkan agenda kreativitas program lembaga swadaya masyarakat.
7. Keterbatasan sumber daya keuangan menyebabkan partisipasi lembaga swadaya masyarakat belum optimal.

1.3. Pembatasan Masalah

Permasalahan partisipasi lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah di Kabupaten Sidrap yang diangkat dalam penelitian ini mencakup dimensi yang luas. Mempertimbangkan keterbatasan waktu dan kemampuan penelaahan yang dimiliki, peneliti membatasi permasalahan pada dua hal. Pertama, bahwa yang dimaksud dengan pembangunan daerah dalam penelitian ini adalah program-program pembangunan yang telah ditetapkan

oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidrap tahun anggaran 2010-2011. Kedua, partisipasi lembaga swadaya masyarakat yang diteliti adalah partisipasi dari lembaga swadaya masyarakat yang memiliki hubungan kerja dengan pemerintah.

1.4. Perumusan Masalah

Selanjutnya, berdasarkan pernyataan masalah di atas, diajukan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk partisipasi lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah di Kabupaten Sidrap?
2. Apakah upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah di Kabupaten Sidrap?

1.5. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis bentuk-bentuk partisipasi lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan serta kebijakan pemerintah daerah yang memungkinkan terjadinya partisipasi dimaksud.

1.3.2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1). Menemukan bentuk-bentuk partisipasi lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah di lokasi penelitian.

- 2). Mengetahui dan menjelaskan upaya-upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah di lokasi penelitian.

1.6. Kegunaan Penelitian

1.6.1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoretis sebagai berikut :

- 1) Untuk memperkaya konsep administrasi pemerintahan daerah, terutama konsep penguatan subkultur pemerintahan.
- 2) Menggambarkan hubungan antara konsep administrasi pemerintahan daerah, konsep sosiologi tentang partisipasi, dan konsep kybernetologi tentang konsumerisme.

1.6.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan butir-butir rekomendasi kepada aparat pemerintah Kabupaten Sidrap dalam :

- 1) Menentukan arah kebijakan pembinaan lembaga swadaya masyarakat
- 2) Menetapkan isi pembinaan lembaga swadaya masyarakat.
- 3) Menetapkan standar pelayanan pemerintah terhadap lembaga swadaya masyarakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Pembangunan Daerah

2.1.1.1. Konsep Pembangunan

Pembangunan secara harfiah dapat diartikan sebagai pembinaan, tetapi yang dimaksud di sini adalah pengertian yang erat hubungannya dengan pembinaan bangsa. Talizdulu Ndruha (1987 : 5) menyatakan bahwa : "Pembangunan adalah usaha yang diselenggarakan secara sadar guna menciptakan perubahan dan pertumbuhan di segala bidang dalam rangka tujuan negara dan bangsa".

Sedangkan Sondang. P. Siagian (1982 : 2-3) mendefinisikan pembangunan sebagai berikut : " Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nasional Building*)".

Sejalan dengan apa yang didefinisikan oleh para ahli di atas, lebih lanjut Bintoro Djakroemidjojo (1986 : 2) memberi pengertian pembangunan sebagai berikut : " Pembangunan adalah suatu rangkaian usaha dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa atau masyarakat bersama-sama dengan negara atau pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan kemajuan bangsa. "

Dari pengertian tersebut di atas, dapat dilihat bahwa ternyata tidak ada perbedaan yang sangat berarti antara satu definisi dengan definisi yang lainnya tentang pembangunan. Semuanya bermulaan mengisyaratkan bahwa pembangunan itu adalah suatu rangkaian usaha perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mencapai suatu tujuan yaitu kemajuan bangsa.

Secara umum William H. Newman, E. Kirby Warren dan Andrew R. McGill (1987: 7) mengemukakan bahwa, "*Planning is deciding in advance what is to be done.*" Pendapat ini pada prinsipnya ingin menyetengahkan bahwa perencanaan merupakan suatu dasar yang diperlukan dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan ke depan. Dalam arti yang seluas-luasnya Bintoro Tjakrosamidjojo (1995: 12) mendefinisikan perencanaan sebagai, "suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu."

Lebih jauh beliau mengatakan bahwa, "Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif." Pencapaian tujuan ini erat juga kaitannya dengan *policy*, dalam hal ini Soekartawi (1990: 4) mendefinisikan perencanaan sebagai, "suatu proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijaksanaan (*policy*) dari pembuat keputusan berdasarkan sumberdaya yang tersedia dan disusun secara sistematis."

2.1.1.2. Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan pada tingkat lokal dan mengambil jalan berseberangan dengan pembangunan nasional. Apabila pendapat Ndraha di atas dapat dimodifikasi maka pembangunan daerah dapat diartikan sebagai "usaha yang diselenggarakan secara sadar guna menciptakan perubahan dan pertumbuhan di segala bidang dalam rangka tujuan daerah".

Daerah sendiri memiliki kedudukan yang unik dalam tata pemerintahan Indonesia. Pengertian "otonom" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara bahasa adalah "berdiri sendiri" atau "dengan pemerintahan sendiri". Sedangkan "daerah" adalah suatu "wilayah" atau "lingkungan pemerintah". Secara istilah "otonomi daerah" adalah "wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri."

Pengertian lebih luas lagi adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.

Otonomi daerah menurut UU No.32 tahun 2004 Pasal 1 ayat 5 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu daerah otonom dalam UU No. 32

tahun 2004 Pasal 1 ayat 6 dijelaskan selanjutnya yang disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam otonomi daerah ada prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan yang dijelaskan dalam UU No.32 tahun 2004 sebagai berikut:

1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Otonomi daerah muncul sebagai bentuk *veto comply* terhadap sentralisasi yang sangat kuat di masa orde baru. Berpuluh tahun sentralisasi pada era orde baru tidak membawa perubahan dalam pengembangan kreativitas daerah, baik pemerintah maupun masyarakat daerah. Ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sangat tinggi sehingga sama sekali tidak ada

kemandirian penentuan pemerintah daerah saat itu. Di masa orde baru semuanya bergantung ke Jakarta dan diharuskan semua meminta uang ke Jakarta. Tidak ada perencanaan mulai dari daerah karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencukupi.

Ketika Indonesia dihantui krisis ekonomi tahun 1997 dan tidak bisa cepat bangkit, menunjukkan sistem pemerintahan nasional Indonesia gagal dalam mengatasi berbagai persoalan yang ada. Sentralisasi yang sangat kuat telah berdampak pada ketiadaan kreativitas daerah karena ketiadaan kewenangan dan uang yang cukup. Semua dipusatkan di Jakarta untuk diurus. Kebijakan ini telah memiskinkan kemampuan prakarsa dan daya kreativitas daerah baik pemerintah maupun masyarakatnya. Akibat lebih lanjut adalah adanya ketetapanunesa daerah kepada pemerintah pusat yang sangat besar.

Lahirnya reformasi tahun 1997 akibat antraknya ekonomi Indonesia dengan tuntutan demokratisasi telah membawa perubahan pada kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya pola hubungan pusat daerah. Tahun 1999 menjadi titik awal terpenting dari sejarah desentralisasi di Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Habibie melalui kesepakatan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilu 1999 ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah untuk mengoreksi UU No.5 Tahun 1974 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan perkembangan keadaan.

Kedua Undang-Undang tersebut merupakan skema otonomi daerah yang diterapkan mulai tahun 2001. Undang-undang ini diciptakan untuk menciptakan pola hubungan yang demokratis antara pusat dan daerah. Undang-Undang Otonomi Daerah bertujuan untuk memberdayakan daerah dan masyarakatnya serta mendorong daerah merealisasikan aspirasinya dengan memberikan kewenangan yang luas yang sebelumnya tidak diberikan ketika masa orde baru.

Secara khusus, pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka aturan baru pun dibentuk untuk menggantikannya. Pada 15 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Diharapkan dengan adanya kewenangan di pemerintah daerah maka akan membuat proses pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan yang signifikan.

Prakarsa dan kreativitasnya terpacu karena telah diberikan kewenangan untuk mengurus daerahnya. Sementara di sisi lain, pemerintah pusat tidak lagi terlalu sibuk dengan urusan-urusan domestik. Ini agar pusat bisa lebih berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro strategis serta lebih punya waktu untuk mempelajari, memahami, merespons, berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat darinya.

Otonomi Daerah dewasa ini diharapkan bisa memacu prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah untuk bisa menjalankan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan keseriusan agar

kebijakan ini bisa berhasil dijalankan. Pokok-pokok penyelenggaraan otonomi daerah meliputi:

1. Penyerahan kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepada daerah. Kecuali untuk bidang ketahanan dan keamanan, politik luar negeri, peradilan, pertahanan, keagamaan serta beberapa bidang kebijakan pemerintahan yang bersifat strategis nasional, maka pada dasarnya semua bidang pemerintahan yang lain dapat didesentralisasikan.
2. Dalam otonomi pemerintahan daerah terbagi atas dua ruang lingkup, bukan tingkatan, yaitu daerah kabupaten dan kota yang diberi status otonomi penuh dan provinsi yang diberi otonomi terbatas. Otonomi penuh berarti tidak adanya operasi pemerintahan pusat di daerah kabupaten dan kota, kecuali untuk bidang-bidang yang dikecualikan tadi. Otonomi terbatas berarti adanya ruang yang tersedia bagi pemerintah pusat untuk melakukan operasi di daerah provinsi.
3. Gubernur provinsi, selain berstatus kepala daerah otonom, juga sebagai wakil pemerintah pusat. Karena sistem otonomi tidak bertingkat (tidak ada hubungan hierarki antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota), maka hubungan provinsi dan kabupaten bersifat koordinatif, pembinaan dan pengawasan. Sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur mengkoordinasikan tugas-tugas pemerintahan antar kabupaten dan kota di wilayahnya. Gubernur juga melakukan supervisi terhadap pemerintah kabupaten/kota atas pelaksanaan berbagai kebijakan

pemerintah pusat serta bertanggung jawab mengawasi penyelenggaraan pemerintah berdasarkan otonomi daerah di dalam wilayahnya.

4. Adanya pengujian peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah. Otonomi daerah memberi kewenangan untuk mempertegas DPRD dalam menilai keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan kepala daerah. Selain itu untuk memfungsikan peran pemberdayaan dan penyalur aspirasi masyarakat yang sebenarnya.
5. Peningkatan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui pembersihan organisasi dan institusi yang dimiliki agar lebih sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah didesentralisasikan setara dengan beban tugas yang dipikul, selaras dengan kondisi daerah serta lebih responsif dengan kebutuhan daerah.
6. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang jelas atas sumber-sumber pendapatan negara dan daerah, pembagian revenue dari sumber penerimaan yang berkait dengan kekayaan alam, pajak dan retribusi, serta tata cara dan syarat untuk pinjaman dan obligasi daerah.
7. Perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi subsidi dari pemerintah pusat yang bersifat "block grant", pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian keleluasaan kepada daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan, serta optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat melalui lembaga-lembaga swadaya

8. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial dan solidaritas sosial suatu bangsa.

Dalam otonomi daerah, ada pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah yang diatur menurut UU No.32 tahun 2004. Pembagian wewenang itu meliputi tiga bagian besar. Pertama, kewenangan pemerintah pusat (Pasal 10 ayat 3) meliputi: (a) politik luar negeri; (b) pertahanan; (c) keamanan; (d) yudisi; (e) moneter dan fiskal serta (f) agama.

Kedua, kewenangan pemerintah provinsi (Pasal 13 ayat 1 UU. No. 32 Tahun 2004) yang meliputi (1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan; (2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; (3) Penyelenggaraan ketertarikan umum dan ketenteraman masyarakat; (4) Penyediaan sarana dan prasarana umum; (5) Penanganan bidang kesehatan; (6) Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; (7) Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; (8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; (9) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota; (10) Pengendalian lingkungan hidup; (11) Pelayanan pertambangan termasuk lintas kabupaten/kota; (12) Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; (13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan; (14) Pelayanan administrasi pemerintahan umum termasuk lintas kabupaten/kota; (15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota ; dan (16) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ketiga, kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Pasal 14 ayat 1, UU No. 32 Tahun 2004) meliputi (a) perencanaan dan pengendalian pembangunan; (b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; (c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; (d) penyediaan sarana dan prasarana umum; (e) penanganan bidang kesehatan; (f) penyelenggaraan pendidikan; (g) penanggulangan masalah sosial; (h) pelayanan bidang ketenagakerjaan; (i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; (j) pengendalian lingkungan hidup; (k) pelayanan pertanahan.

Gerak daerah dalam konteks pembangunan ada pada wilayah kewenangan sebagaimana disebutkan di atas. Kewenangan memberikan batas pada masing-masing unit pemerintahan untuk melaksanakan tugasnya. Ndraha (2005:1992) menegaskan bahwa :

Studi tentang fenomena pemerintahan (*governance*) dapat dilakukan melalui dua macam cara pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan kekuasaan (negara) yang mengutamakan kepentingan negara di atas segala-galanya. Dalam hubungan ini, ilmu pemerintahan diletakkan di salah satu pojok ilmu-ilmu politik. Yang kedua, pendekatan manusia dan lingkungannya.

Dalam demarkasi Ndraha di atas, jelas bahwa pemerintahan daerah yang dipetakan disini adalah pemerintahan yang menggunakan pendekatan manusia. Karena unit pemerintahan yang paling dekat dengan manusia adalah kabupaten/kota, maka pembangunan daerah adalah pembangunan kabupaten/kota ini sendiri. Pembangunan mana didasarkan pada pelayanan segenap manusia warga daerah.

Dadang Sulihim (2005:14) mengemukakan bahwa pembangunan hanya dapat dilaksanakan melalui suatu perencanaan yang matang di level daerah. Definisi praktis Perencanaan Pembangunan Daerah adalah

Suatu usaha yang sistematis dari pelbagai pelaku (aktor), baik umum (publik) atau pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berhadapan untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya dengan cara: secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah (solusi), dan melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan.

Karena itu perencanaan pembangunan daerah memprasyaratkan adanya hal-hal seperti (a) siklus perencanaan pembangunan Daerah, (b) perumusan tujuan, (c) mengidentifikasi strategi alternatif, (d) pengujian alternatif strategi atau program seleksi alternatif dan penentuan strategi, (e) program penganggaran pelaksanaan/implementasi, (f) monitoring dan evaluasi, serta (g) pemeliharaan Visi dan Misi.

Pembangunan daerah yang memadai akan menghitung semua fakta potensi dan analisa potensi. Fakta potensi adalah potensi riil yang dimiliki daerah termasuk potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sementara analisis potensi adalah analisis yang dilakukan guna memperoleh data dan informasi secara sistematis tentang kondisi utama lingkungan, fisik, sosial, ekonomi, budaya, politik, administratif dan kelembagaan dari suatu daerah yang sedang dikaji dan direncanakan pembangunannya. Tujuan yang menyeluruh dari analisis daerah adalah untuk meningkatkan pemahaman para perencana daerah dan

masyarakat tentang situasi kini yang mendasar dan relevan untuk perumusan kebijakan dan pembantuan keputusan bagi pembangunan daerah. Analisis dimulai dengan kondisi kualitatif pembangunan daerah pada saat ini, analisis kuantitatif, hingga pengidentifikasian persoalan daerah beserta sebab dan akibatnya, serta penggalian potensi daerah yang ada. Hal ini diperlukan untuk merumuskan dan mendefinisikan tujuan, untuk mengevaluasi strategi atau pilihan dan dampaknya, serta untuk pengambilan keputusan strategi pembangunan yang akan diterapkan.

2.1.1.3. Pembangunan Partisipatif

Pembangunan adalah sebagai sebuah proses multidimensional yang menenun berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping, tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengurangan kemiskinan (Todaro, 2000 : 20). Pembangunan juga diartikan sebagai suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimungkinkan untuk mencapai kemajuan sosial dan material (termasuk bertumbuhnya kesetaraan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. (Rogers, 1983 : 25).

Pada hakikatnya pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau pengorganisasian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu

kondisi kehidupan yang lebih serba baik, secara material maupun spritual (Todaro, 2000 : 20). Banyak aspek yang harus diperhatikan, yang diantaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan. Asumsi dasar adalah semakin tinggi kepedulian atau partisipasi masyarakat pada proses-proses perencanaan akan memberikan output yang lebih optimal. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan yang akan dicapai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan indikator utama dan menentukan keberhasilan pembangunan.

Hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat dan pembangunan berencana merupakan dua terminologi yang tidak dapat dipisahkan. Pendapat atau teori tersebut secara rasional dapat diterima, karena secara ideal tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu sangatlah pantas masyarakat terlibat di dalamnya.

Korten dalam Supriatna (2001 : 65) mengatakan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia, dalam pelaksanaannya sangat measyunkan keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program pembangunan (partisipasi pembangunan). Karena hanya dengan partisipasi masyarakat penerima program, maka hasil pembangunan ini akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kesesuaian ini maka hasil pembangunan akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima

program. Begitu juga Menurut Conyers (1991 : 154), yang mengatakan terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam pembangunan.

Pertama, partisipasi merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa ketidiriannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Alasan kedua, yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut. Ketiga, adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri.

Gagasan tentang pelibatan peran warga dalam kajian masalah pembangunan, terutama melalui model pemberdayaan masyarakat guna peningkatan partisipasi sesungguhnya bukanlah topik yang baru. Semestinya timbulnya kesadaran bahwa perspektif pertumbuhan ekonomi (Economic Growth) meninggalkan permasalahan kesenjangan ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam pembagian manfaat pembangunan, maka berkembanglah berbagai pandangan yang ingin memberikan alternatif kepada pandangan yang hanya mengandalkan pertumbuhan, diantaranya teori-teori Redistribution With Growth yang dikembangkan oleh Chenery (1974), Human Development oleh Justin Filans (1976), dan People centre Development oleh David C. Korten (1986). Perbedaan pandangan tentang pendekatan pembangunan tersebut berlangsung cukup lama, yang mana tujuannya adalah mengakhiri era Delivered Development

dimana pembangunan direncanakan sepenuhnya dari atas dan menempatkan warga sebagai obyek pembangunan dan kemudian ingin diganti dengan era Partisipatory Development dimana pembangunan direncanakan dari bawah dengan melibatkan warga, dan menempatkan mereka sebagai subyek dalam proses pembangunan. (Ponna Wignaraja dalam David C Korten, 1986 : 60).

Namun tidak dapat juga di sangkal bahwa perencanaan dengan melibatkan masyarakat dianggap tidak efektif dan cenderung menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Ada beberapa pertimbangan untuk kemudian tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yaitu waktu yang lebih lama, serta kemungkinan besar akan banyak sekali pihak-pihak yang menentang pembangunan itu. Menurut Soetrisno (1995 : 48) hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan proses pembangunan yang partisipatif adalah belum dipahaminya makna sebenarnya dari konsep partisipasi oleh pihak perencana dan pelaksanaan pembangunan.

Defenisi partisipasi yang berlaku di kalangan lingkungan aparat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan adalah kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah.

Dadang Solihin (2005) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan selayaknya dimulai dari tahap penyusunan visi dan misi pemerintah daerah. Perumusan Misi yang melibatkan semua pelaku seperti Kepala Daerah, DPRD, organisasi non pemerintah (Ornop), sektor swasta, perangkat pemerintah daerah, unsur masyarakat lainnya serta Pihak lain yang

berkepentingan dengan daerah yang bersangkutan mengkaji dan menilai lingkungan yang sangat berguna untuk menentukan apakah misi daerah tidak bertentangan atau memiliki konflik secara internal dan eksternal, misalnya dengan kebijakan atau peraturan yang lebih tinggi.

Kebijakan daerah yang memperhatikan pelibatan masyarakat, akan dengan sendirinya berpihak pada keselarian masyarakat. Dampaknya jika ada kebijakan yang kurang sesuai masyarakat dapat segera mengkritisi kebijakan tersebut dan penyelenggara pemerintahan yang hidup 'bersama' masyarakatnya mau-tidak mau harus merespon aspirasi masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan lokal yang lebih dinamis ini telah menimbulkan suatu kebutuhan bersama untuk mengatur pelibatan masyarakat. Berhubungan dengan peran serta masyarakat maka Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1999 menggariskan hak-hak masyarakat meliputi (a) hak mencari dan memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan negara, (b) hak menyampaikan saran dan pendapat, (c) hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara Negara, dan (d) hak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan hak-haknya diatas.

2.1.2. Konsep Partisipasi

Partisipasi berasal dari baha latin : "part" artinya bagian; dan "cipare" artinya mengambil bagian atau dapat juga disebut peran serta atau keikutsertaan. Dengan demikian maka secara sederhana partisipasi masyarakat adalah peran serta atau keikutsertaan masyarakat. Dalam teori sistem sosial, Adam Smith berkecukupan (dalam Campbell) terjemahan F. Budi Hardiman, 1994 : 117) bahwa

"setiap manusia ... jauh lebih dalam berkepentingan akan apa saja yang langsung menyangkut dirinya sendiri, dari pada akan apa yang menyangkut orang lain".

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memang merupakan suatu insentif yang bersifat *conditio sine qua non* apabila kita menginginkan masyarakat mau berkorban untuk pembangunannya. Akan tetapi, untuk mendorong rakyat mau berpartisipasi dalam proses pembangunan itu sendiri masih merupakan permasalahan yang perlu dicari pemecahannya. Mendorong, bukan mengghruskan partisipasi masyarakat seperti halnya mendorong masyarakat untuk mau berkorban, juga membutuhkan insentif-insentif tersendiri. Tidak cukup kita mengatakan bahwa karena pembangunan itu untuk masyarakat, maka adalah mutlak bila rakyat mau berpartisipasi dalam pembangunan. Pengalaman pembangunan membuktikan bahwa seringkali pembangunan yang dikatakan untuk kepentingan rakyat ternyata tidak sesuai dengan harapan rakyat. Disamping itu, kemunculan partisipasi masyarakat dalam membangun berkaitan pula dengan definisi yang kita gunakan dalam mengartikan konsep partisipasi.

Secara *harfiah*, partisipasi berarti turut berperan serta dalam suatu kegiatan, atau dapat juga disebut sebagai keikutsertaan atau peran serta dalam suatu kegiatan, atau peran serta aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan. Partisipasi dapat didefinisikan secara luas sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (*intrinsik*) maupun dari luar dirinya (*ekstrinsik*) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan.

Hoofsteede (dalam Khairudin, 1992 : 124), memberi pengertian partisipasi adalah ambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses.

Menurut Westra (1981 : 136), partisipasi adalah :

Penyertaan mental emosi seseorang dalam suatu situasi kelompok yang mendorong mereka untuk mengembangkan daya pikir dan perasaan mereka bagi tercapainya tujuan organisasi dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap organisasi tersebut.

Bhattacharyya dalam Ndraha (1987 : 102), mengartikan partisipasi sebagai :

Pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Dalam kamus sosiologi modern menyebutkan partisipasi adalah suatu keadaan dimana seseorang ikut merasakan bersama-sama dengan orang lain sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial. Ini merupakan kesadaran manusia yang dimotivasi oleh kebutuhan untuk berkelompok, serta melalui komunikasi dan kegiatan bersama.

Dengan demikian, dapat dikemukakan yang dimaksud dengan pengertian partisipasi masyarakat adalah keterlibatan fisik, mental, dan emosi, yang timbul dari masyarakat untuk berkontribusi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan fungsionalisasi dari semua potensi yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia pada situasi dan kondisi yang kondusif, yang ditujukan pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat desa. Kesiediaan masyarakat desa untuk mengambil bagian penyelenggaraan suatu program pembangunan adalah merupakan indikasi adanya kemampuan awal dari masyarakat untuk berkembang secara mandiri.

Menurut Ndraha (1982 : 26), di dalam partisipasi tercakup tiga hal penting yaitu :

1. Titik berat partisipasi adalah pada keterlibatan mental dan emosional. Kehadiran secara pribadi/fisik di dalam suatu kelompok tanpa keterlibatan tersebut bukanlah partisipasi.
2. Kesiediaan untuk memberi kontribusi, tergerak. Wujud kontribusi di dalam pembangunan ada bermacam-macam, misalnya : barang, uang, bahan-bahan jasa, buah pikiran, keampuhan dan sebagainya.
3. Kesiediaan untuk turut bertanggung jawab, terbangkitkan.

Selanjutnya dalam hubungannya dengan partisipasi Tjokroamidjono (1983 : 207), mengatakan bahwa "keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi, dan kebijaksanaan pembangunannya yang dilakukakan pemerintah".

Kabo (1997 : 114), menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang, yaitu : 1). Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan; 2). Partisipasi dalam pelaksanaan; 3). Partisipasi dalam pemantauan hasil; 4). Partisipasi dalam pengawasan dan evaluasi.

Davis (1962 : 42), mendefinisikan partisipasi sebagai berikut :

Participation is defined as mental and emotional involvement of person in a group goals and share responsibility in them. (partisipasi merupakan suatu dorongan mental dan emosi dari seseorang atau kelompok yang menggerakkan mereka bersama-sama mencapai tujuan dan ikut bertanggung jawab).

Sering pemerintah mengklaim telah berbuat yang terbaik untuk masyarakat dalam setiap sektor sesuai fungsi pemerintah di bidang pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Tetapi pada kondisi tertentu masyarakat dengan berbagai macam alasan menggugat pemerintah karena dianggap tidak *aspiratif* dan *acomodatif* dalam pelaksanaan pelbagai program kegiatan dan proyek

pembangunan. Salah satu penyebabnya adalah partisipasi masyarakat baik dalam proses perumusan rencana, pelaksanaan, dan penguasaan maupun dalam menikmati hasil dari pembangunan tersebut. Berdasarkan sinyalsamen tersebut maka Abullah (1997 : 16), berpendapat bahwa :

Karena manusia juga merupakan sasaran pembangunan, maka manusia harus dilibatkan. Keterlibatan ini mulai dari proses perencanaan sampai pada proses pelaksanaan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh persoalan apakah pembangunan itu "bermanfaat" bagi masyarakat, tetapi juga apakah masyarakat dilibatkan dalam usaha peningkatan kesejahteraan (sosial, ekonomi, dan politik) terhadap diri mereka.

Relevan dengan hal tersebut, maka Tjokmanidjaja (1995 : 222) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus memperhatikan empat aspek yaitu :

1. Arah dan tujuan pembangunan hendaknya mencerminkan kepentingan masyarakat ;
2. Perlu dikembangkan kemampuan-kemampuan masyarakat dan terutama organisasi-organisasi masyarakat sendiri untuk mendukung proses pembangunan ;
3. Kegiatan yang dilakukan harus nyata dan konsisten dengan arah, strategi, dan rencana yang telah ditentukan ;
4. Memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi menyangkut kesejahteraan mereka serta dalam memetik hasil program pembangunan.

Secara umum konsep partisipasi masyarakat lebih dipahami sebagai keterlibatan masyarakat dalam pembangunan khususnya dalam perencanaan pembangunan. Disisi lain konsep mengenai perencanaan sering dijelaskan sebagai suatu proses analitis dalam pengambilan keputusan (*decision making*) yang berakhir apabila suatu rencana tersebut dilaksanakan dan dimanifestasikan.

Joedono (dalam Tjokronidjojo, 1985 : 208) mengemukakan bahwa : "masalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah masalah kesempatan untuk memproduksi dan menikmati pendapatan dari hasil produksi".

Penggunaan partisipasi dalam pengambilan keputusan akan menjadikan suatu organisasi lebih efektif sebab partisipasi masyarakat akan sangat membantu dalam proses penentuan alternatif dalam pemecahan masalah (*problem solving*). Sejalan dengan pemikiran tersebut Salusu. (1996 : 60) mengatakan bahwa : "yang dimaksud dengan pengambilan keputusan ialah proses memilih suatu alternatif baru bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi".

Pentingnya partisipasi masyarakat dilaksanakan menurut pendapat Conyers (terjemahan Zainal, 1991 : 154) didasarkan kepada ketiga alasan utama yaitu :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat ;
2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika dilibatkan dalam proyek persiapan dan perencanaannya karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut ;
3. Adanya anggapan bahwa suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Untuk melaksanakan partisipasi masyarakat tersebut, Moskau, (1994 : 43) menyatakan bahwa banyak sekali ditentukan oleh : 1). Kebutuhan masyarakat; 2). Interes masyarakat; 3). adat istiadat; dan 4). Sifat-sifat komunal yang mengikat setiap anggota masyarakat satu sama lain.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan seseorang, baik mental emosional maupun fisik dalam situasi kelompok tertentu yang mendorong untuk mendukung atau menunjang tercapainya tujuan-tujuan

kelompok serta bertanggung jawab atas keberhasilan tujuan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mengandung pengertian keterlibatan aktif masyarakat dalam suatu kegiatan bersama baik fisik, mental, maupun emosional, untuk mencapai tujuan kelompok atau komunitas masyarakat bersangkutan.

Relevan dengan itu Siagian (1988 : 30) menegaskan bahwa, "partisipasi dari masyarakat luas mutlak diperlukan karena mereka itulah yang pada akhirnya melaksanakan pelbagai kegiatan dalam pembangunan, rakyat banyak pada akhirnya memegang peranan sekaligus subjek dan objek pembangunan".

2.1.3. Lembaga Swadaya Masyarakat

2.1.3.1. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah adaptasi dari istilah asing non-government organization (NGO). Dalam kode etik LSM Bab I Nomor 1 disebutkan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi non-pemerintah yang independen dan mandiri, dan karena itu bukan merupakan bagian atau berafiliasi dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan. Ini juga berarti bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi non-partisan dan karena itu tidak merupakan bagian atau berafiliasi dengan partai-partai politik dan tidak akan menjalankan politik praktis dalam arti mengejar kekuasaan. Lembaga swadaya masyarakat adalah organisasi yang tumbuh secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri, ditengah masyarakat, dan berminal serta bergerak dalam bidang lingkungan hidup.

LSM dalam menjalankan tugasnya di tengah-tengah masyarakat memiliki prinsip-prinsip keberadaannya yaitu integritas, transparansi, independensi, anti kekerasan, kesetaraan gender, dan keuangan. Ageng Nata Praja (2005) memperkirakan saat ini lebih dari 10.000 LSM beroperasi di Indonesia baik di tingkat nasional, provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota, dimana dari tahun ketahun jumlah ini semakin bertambah.¹ Perkembangan politik, demokrasi, pembangunan ekonomi dan kemajuan teknologi informasi merupakan faktor-faktor yang mendorong terus bertambahnya jumlah LSM di Indonesia. Bergulirnya era reformasi menggantikan era orde baru diikuti pula dengan peningkatan jumlah LSM. Jika pada tahun 1997 ditaksir ada sekitar 4000-7000 LSM, maka pada tahun 2002 jumlah LSM menurut Departemen Dalam Negeri menjadi sekitar 13.500 LSM.

Ageng Nata Praja (2005) memperkirakan saat ini lebih dari 10.000 LSM beroperasi di Indonesia baik di tingkat nasional, provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota, dimana dari tahun ketahun jumlah ini semakin bertambah.¹ Perkembangan politik, demokrasi, pembangunan ekonomi dan kemajuan teknologi informasi merupakan faktor-faktor yang mendorong terus bertambahnya jumlah LSM di Indonesia. Bergulirnya era reformasi menggantikan era orde baru diikuti pula dengan peningkatan jumlah LSM. Jika pada tahun 1997 ditaksir ada sekitar 4000-7000 LSM, maka pada tahun 2002 jumlah LSM menurut Departemen Dalam Negeri menjadi sekitar 13.500 LSM.² Iklim segar yang dibawa oleh angin reformasi menciptakan keleluasaan yang luas dalam upaya-upaya penyaluran aspirasi.

Kebebasan menyampaikan pendapat, berekspresi, berserikat dan berkumpul dijamin penuh oleh undang-undang. Dominasi pemerintah pada masa orde baru yang dijalankan melalui depolitisasi atau partisipasi terkontrol yang bertujuan untuk menjamin hegemoni pemerintah dan mengontrol masyarakat melalui pembatasan kegiatan partai politik dan organisasi sosial dengan dalih menciptakan kestabilan politik, semakin terkikis oleh tuntutan-tuntutan untuk mengurangi fungsi kontrol pemerintah terhadap masyarakat dan dilain pihak meningkatkan kemandirian masyarakat dalam segala aspek kehidupan yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan bidang-bidang lainnya.

Ruang politik yang semakin terbuka lebar pada era reformasi, seiring dengan diberikannya kebebasan yang luas memberikan kesempatan pada kelompok-kelompok masyarakat untuk berekspresi dalam berbagai bentuk organisasi sosial politik non pemerintah dengan mengusung berbagai asas dan tujuan masing-masing. Tidak ada lagi hegemoni ideologi yang dijalankan lewat berbagai undang-undang yang mendudukkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi setiap organisasi seperti pada masa orde baru yang menyebabkan aktifitas LSM dan organisasi sosial politik lainnya berada dalam ruang yang sempit. Partai-partai politik dengan latar belakang berbagai ideologi bermunculan, dengan dimulainya era kebebasan ini. Organisasi-organisasi sosial politik termasuk LSM tumbuh dengan subur.

LSM secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh

keuntungan dari kegiatannya. Menurut Budi Setyono (Suara Merdeka 15 Oktober 2003), LSM merupakan lembaga/organisasi non partisan yang berbasis pada gerakan moral (*moral force*) yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik. LSM dipandang mempunyai peran signifikan dalam proses demokratisasi. Jenis organisasi ini diyakini memiliki fungsi dan karakteristik khusus dan berbeda dengan organisasi pada sektor politik-pemerintah maupun swasta (*private sector*), sehingga mampu menjalankan tugas tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh organisasi pada dan sektor tersebut.

Berbeda dengan organisasi politik yang berorientasi kekuasaan dan swasta yang berorientasi komersial, secara konseptual, LSM memiliki karakteristik yang berisikan: nonpartisan, tidak mencari keuntungan ekonomi, bersifat sukarela, dan bersendi pada gerakan moral. Ciri-ciri ini menjadikan LSM dapat bergerak secara luwes tanpa dihatasi oleh ikatan-ikatan motif politik dan ekonomi. Ciri-ciri LSM tersebut juga membuat LSM dapat menyuarakan aspirasi dan melayani kepentingan masyarakat yang tidak begitu diperhatikan oleh sektor politik dan swasta.

Kemunculan LSM merupakan reaksi atas melemahnya peran kontrol lembaga-lembaga Negara, termasuk partai politik, dalam menjalankan fungsi pengawasan ditengah dominasi pemerintah terhadap masyarakat. Sehingga pada awal sejarah perkembangan lahirnya LSM, tentukan yang bergerak dibidang sosial politik, tujuan utama pembentukan LSM adalah bagaimana mengontrol kekuasaan Negara, tuntutan pers yang bebas, tuntutan kebebasan berorganisasi, advokasi terhadap kekerasan Negara dan kebijakan-kebijakan yang merugikan

rakyat. Pada masa orde baru LSM menjadi sebuah kelompok kritis yang memberikan tekanan pada pemerintah. Meuthia Ganie-rochman (2002:182) menyebut pola hubungan LSM pada masa ini sebagai pola hubungan yang konfliktual, dimana dari sisi pemerintah juga berupaya mencampuri dan mempengaruhi organisasi, cara kerja dan orientasi LSM.

Namun dalam sistem politik yang demokratis, LSM dan pemerintah dapat bersama-sama memberikan sumbangan penting dalam hal peningkatan hak-hak rakyat. Perubahan yang diawali era reformasi menyebabkan wajah kekuasaan menjadi tidak sewelid dulu, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengungkapkan pikiran dan tuntutananya. Dengan kehidupan politik yang lebih demokratis saat ini, membuat banyak LSM mulai meninggalkan strategi konfrontatif dengan pemerintah, dengan cara berusaha menjalin kerjasama dengan pemerintah ketika peluang politik tersedia. LSM saat ini tidak lagi memanjung pemerintah setajam dulu, meskipun demikian masih terdapat kesadaran luas dikalangan LSM bahwa pemerintah tetap potensial menjadi pengekan rakyat.⁵

Menurut Hikam (2003:256) LSM merupakan bagian dari *civil society* yang kuat dan mandiri. Sedangkan pemherdayaan *civil society* merupakan *sine qua non* bagi proses demokratisasi di Indonesia. Konsep mengenai *civil society* sendiri dapat diartikan sebagai suatu latanan sosial atau masyarakat yang memiliki peradaban (*civilization*) dimana didalamnya terdapat asosiasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terhangun sebuah jaringan hubungan berdasarkan berbagai ikatan yang sifatnya independen terhadap negara. Kegiatan masyarakat

sepeutuhnya bersumber dari masyarakat itu sendiri, sedangkan negara hanya merupakan fasilitator. Akses masyarakat terhadap lembaga negara dijamin dalam *civil society*, artinya individu dapat melakukan partisipasi politik secara bebas. Warga Negara bebas mengembangkan dirinya secara maksimal dan leluasa dalam segala aspek kehidupan yang meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan bidang-bidang lainnya.

Menurut Einstadt dalam Afno Gaffar (2003:180) *civil society* memiliki empat komponen sebagai syarat; pertama Otonomi, kedua akses masyarakat terhadap lembaga Negara, ketiga arena publik yang bersifat otonom dan keempat arena publik yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat⁹. Berdasarkan komponen-komponen tersebut, *civil society* mempersyaratkan adanya organisasi sosial politik dan kelompok kepentingan yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi. Diantara organisasi sosial dan politik yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi adalah LSM dan media massa. LSM memiliki tingkat keleluasaan bergerak, serta kebebasan dan kemandirian yang cukup tinggi yang dapat dijadikan sumber daya politik yang potensial dalam menyiapkan *civil society*. Dalam artian *civil society* sebagai suatu ruang publik antara negara dan masyarakat. Kekuasaan Negara dibatasi didalam ruang publik oleh partisipasi politik masyarakat dalam rangka pembentukan kebijaksanaan publik.

2.1.3.2. Lembaga Swadaya Masyarakat di Subkultur Sosial

Keterlibatan LSM dalam pembangunan dapat mencapai suatu ruang yang sangat luas. Dalam lingkup aturan LSM bahkan dapat terlibat langsung membuat

peraturan daerah. Hal ini bermakna semakin menguatnya peran masyarakat. Dalam konstruksi kybernologi, dipahami bahwa subkultur sosial adalah tempat dimana kekuatan sosial bertumpu. tentang pentingnya subkultur sosial (SKS) dalam masyarakat.

SKS pada hakikatnya terdiri dari dua kualitas: sebagai pelanggan dan sebagai konstituen, yang memiliki hak eksistensial, HAM, dan hak-hak derivatif. Sebagai pelanggan ia menyampaikan kebutuhannya ke hulu melalui kualitasnya sebagai konstituen, dan memoney redistribusi nilai oleh SKK di hilir. Kebijakan otonomi Daerah berdasarkan UU 32/04, Pasal 1 butir 2, 3 dan 4, sesuai dengan teori ini. Di sana dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan jajarannya, *local government*) bersama DPRD adalah penyelenggara pemerintahan Daerah. "Pemerintahan" Daerah dalam hubungan itu setara dengan *local governance*.

Peran dan posisi LSM sebagai kekuatan subkultur sosial telah diposisikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kekuatan mana bermula dari pengumpulan kekuatan masyarakat dan berakhir pada artikulasi kepentingan.

2.1.3.3. Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat

Partisipasi secara sederhana dapat diartikan sebagai keterlibutan. Keith Davis (1962:427) mendefinisikan partisipasi sebagai "*mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them.*" Dengan kata lain, partisipasi adalah keterlibutan mental dan emosi seseorang di dalam suatu situasi kelompok.

yang mendorongnya untuk memberikan sumbangnn kepada tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab di dalam kelompok itu.

Pada defmisi di atas, Davis menunjukkan bahwa elemen-elemen partisipasi terdiri dari : (1) *mental and emotional involvement* atau keterlibatan mental dan emosi, (2) *motivates person to contribute to the situation* atau memotivasi perorangan untuk memberikan kontribusi dalam suatu situasi, dan (3) *encourages people to accept responsibility in activity* atau mendorong orang untuk menerima tanggungjawab.

Partisipasi, dengan demikian, menunjukkan bukan hanya keterlibatan emosi dan mental sebagai ukuran, tetapi juga kesediaan seseorang untuk menerima tanggung jawab dalam komunitas kelompoknya.

Secara khusus, konsep partisipasi senantiasa dihubungkan dengan konsep pembangunan. Kondisi inilah yang memunculkan konsep partisipasi pembangunan. Cohen dan Uphoff (1977:8) mendiskripsikan bahwa ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terdiri atas (1) *participation in decision making* (partisipasi dalam pembuatan keputusan), (2) *participation in implementation* (partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan), (3) *participation in benefits* (partisipasi dalam penandatangan), dan (4) *participation in evaluation* (partisipasi dalam evaluasi).

Ndraha (1990:1015) dengan memanfaatkan temuan Goldsmith dan Bulstain menyimpulkan bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika :

- 1) Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.
- 2) Partisipasi memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.

- 3) Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat.
- 4) Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang, jika mereka tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan.

Definisi UNDP (1996) tentang partisipasi memasukkan semacam kategori tingkatan partisipasi masyarakat yang terdiri atas (1) *manipulation*, yakni partisipasi tingkatan terendah yang diikuti oleh indoktrinasi, (2) *konsultasi*, dimana terjadi komunikasi dua arah tetapi stake holder tidak memiliki harapan bahwa usulan mereka akan diterima sesuai harapan mereka. Model ini disebut juga "participating in participation", (3) *pembangunan konsensus*, yakni suatu interaksi saling memahami dan dalam posisi saling bernegosiasi serta toleransi, (4) *Pembuatan keputusan*, yakni tahapan dimana konsensus didasarkan atas keputusan kolektif dan pada rasa tanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu, (5) *Pembagian resiko*, yaitu tingkatan dimana proses keputusan didasarkan pada pertimbangan akibat dari hasil yang menyangkut keuntungan, hambatan dan implikasi, (6) *Partnership*, yakni kerjasama secara equal menuju hasil yang saling menguntungkan, dan (7) *Self-management* yakni puncak dari partisipasi dimana stakeholder berinteraksi dalam proses saling belajar (*learning process*) untuk mengoptimalkan hasil.

Pada proses dimana interaksi menjadi unsur paling penting, James Robert Puallin (dalam Widya Praja, 2005) memaknai partisipasi sebagai (1) kelikutsetaan masyarakat dalam setiap aktivitas pemerintahan, sebagai bentuk kepedulian rakyat terhadap pemerintah yang telah diberikan kepercayaan oleh rakyat, dan (2) pemerintah berperan aktif mendorong dan memberi ruang bagi peran serta rakyat

dalam setiap aktivitasnya, dengan memberikan informasi, akses, dan implementasi mekanisme kontrol.

Dalam sifatnya yang hampir *omnibus* (apa saja dapat dikategorikan ke dalam dirinya), partisipasi berkaitan dengan praktek pemerintahan dan pembangunan yang demokratis mencakup tiga bagian besar yang meliputi partisipasi politik, partisipasi sosial, dan partisipasi warga. Berkaitan dengan relasi pemerintah-warga maka Pualilin menetapkan bentuk-bentuk dan tingkatan partisipasi yaitu : (1) manipulasi, (2) pencatraman, (3) sosialisasi, (4) konsultasi, (5) kemitraan, (6) pendelegasian kekuasaan, dan (7) pengawasan oleh warga.

Pada bentuk partisipasi prosedural. Nuraha (1990:103-104) mengemukakan bahwa bentuk dan tahap partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah :

1. partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain.
2. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi.
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan.
4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
5. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan.
6. Partisipasi dalam menilai pembangunan

Dari berbagai uraian di atas, dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu elemen penting dalam rangka pembangunan. Dalam kaitannya dengan pergeseran paradigma pembangunan dari *production centered development* ke arah *human centered development* maka secara otomatis manusia menduduki posisi selaku subjek pembangunan. Hanya saja, persoalannya lebih jeli dipotret oleh Supriatna (1985:32) yang menulis :

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak datang dengan sendirinya tetapi harus diusahakan terus menerus secara tekun dan diberi kesempatan untuk tumbuh, berakar, dan berkembang secara wajar sehingga masyarakat mempunyai sikap, orientasi, persepsi, dan identifikasi selaku subyek di dalam penyelenggaraan pembangunan...

Bagi Davis sendiri, dimensi-dimensi partisipasi tidak lain adalah (1) *mental and emotional involvement* atau keterlibatan mental dan emosi, (2) *group situation* atau situasi kelompok, (3) *contribute to group goal* atau kontribusi pada tujuan kelompok, dan (4) *share responsibility* atau pembagian tanggung jawab.

Keterlibatan mental dan emosional adalah keikutsertaan yang mengatasi kehadiran tubuh fisik belaka. Ini adalah bentuk keterikatan moral dan emosional yang bersifat permanen. Semua ini didukung oleh situasi kelompok yang kurang lebih menempatkan satu dari sekian kondisi yang menjatikan mentalitas orang-orang yang terlibat dalam kegiatan bersifat tetap. Situasi dapat diatur atau tidak dapat diatur tergantung pada siapa yang menentukan arah partisipasi. Tetapi seberapa besar situasi memiliki pengaruh ditentukan ternyata oleh tujuan-tujuan akhir dari suatu kerjasama dalam apa yang disebut partisipasi. Karena itu, pembagian tanggung jawab menjadi kunci utama. Pembagian tanggung jawab memungkinkan semua yang terlibat merasa diikat secara moral

Partisipasi dan kerjasama LSM dalam pembangunan daerah dimaknai sebagai keterlibatan mental dan emosi dalam suatu situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab di dalam kelompok itu.

Gambar 1
Tingkatan Dan Bentuk Partisipasi Masyarakat

Derajat	Partisipasi Masyarakat	Contoh
Tinggi	Memiliki Kontrol	Lembaga Pemerintah, legislatif, LSM, mendorong masyarakat, untuk mengidentifikasi masalah, tujuan, maksud dan kesimpulan-kesimpulan kunci. Lembaga memiliki kemauan membantu masyarakat dalam setiap langkah-langkah dalam menyelesaikan tujuan-tujuan tersebut.
	Memiliki Kekuasaan yang terlegasi	Lembaga – pemerintah, legislatif, LSM – mengidentifikasi masalah dan menyampaikannya kepada masyarakat, mendefinisikan keterbatasan serta membuat keputusan-keputusan yang dapat digabungkan dalam suatu rencana yang diterima
	Keterlibatan dalam perencanaan	Lembaga - pemerintah, legislatif, LSM – menyampaikan perencanaan tentative dan terbuka untuk menerima perubahan dari subjek yang dipengaruhi. Mengharapkan perubahan rencana paling sedikit dan mungkin lebih dari itu.
	Saran	Lembaga - pemerintah, legislatif, LSM – menyampaikan rencana dan mengundang tanggapan masyarakat. Rencana hanya dipersiapkan untuk dimodifikasi, jika memang diperlukan
	Dikonsultasi	Lembaga - pemerintah, legislatif, LSM – mencoba menawarkan rencana. Mencari dukungan agar, memperoleh penerimaan atau memberi sanksi, sehingga pengadaan administrasi tercapai seperti yang diharapkan.
	Menerima informasi sosialisasi	Lembaga – pemerintah, legislatif, LSM – membuat perencanaan dan mengumumkannya. Masyarakat dikerahkan untuk tujuan mendengarkan informasi. Masyarakat berkumpul menjadi suatu yang diharapkan.
Rendah	Tidak ada sama sekali	Masyarakat tidak mengetahui sama sekali.

Sumber: *Community participation for health for all*. London, Community participation group of the United Kingdom for all network, 1991 dalam Suhardi Suryadi dan Juhanaayah 2001

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan untuk melihat bentuk-bentuk partisipasi lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah serta kebijakan pemerintah yang memungkinkan hadirnya partisipasi dimaksud. Secara teoritis, Davis mengungkapkan bahwa partisipasi ditentukan oleh (1) *mental and emotional involvement* atau keterlibatan mental dan emosi, (2) *group situation* atau situasi kelompok, (3) *contribute to group goal* atau kontribusi pada tujuan kelompok, dan (4) *share responsibility* atau pembagian tanggung jawab.

Keterlibatan mental dan emosional adalah keikutsertaan yang mengatasi kehadiran tubuh fisik belaka. Ini adalah bentuk keterikatan moral dan emosional yang bersifat permanen. Semua ini didukung oleh situasi kelompok yang kurang lebih menempatkan satu dari sekian kondisi yang menjadikan mentalitas orang-orang yang terlibat dalam kegiatan bersifat tetap. Situasi dapat diatur atau tidak dapat diatur tergantung pada siapa yang menentukan arah partisipasi. Tetapi seberapa besar situasi memiliki pengaruh ditentukan ternyata oleh tujuan-tujuan akhir dari suatu kerjasama dalam apa yang disebut partisipasi. Karena itu, pembagian tanggung jawab menjadi kunci utama. Pembagian tanggung jawab memungkinkan semua yang terlibat merasa diikat secara moral.

Partisipasi LSM dalam pembangunan daerah bermakna adanya keterlibatan mental dan emosi dalam suatu situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab di dalam pembangunan daerah. Partisipasi semacam ini memiliki prasyarat utama yaitu hubungan antara pihak yang baik dan saling memahami. Artinya, baik

pemerintah daerah maupun lembaga masyarakat selayaknya menjalin hubungan yang memungkinkan partisipasi dapat terlaksana. Hubungan mana mencakup aspek-aspek emosi, situasi, kontribusi dan tanggung jawab.

Emosi berasal dari bahasa latin *emovere* yang berarti bergerak ke luar. Sementara istilah mental merujuk pada perpaduan antara hasil kerja pikir dan kesadaran sebagai 'suatu kualitas baru.' Dalam penjelasan Abraham Maslow (dalam Boeree, 2004:284-285) dapat ditemukan bagaimana keterlibatan mental dan emosi manusia bergerak secara linear dalam apa yang disebutnya sebagai 'kebutuhan aktualisasi diri'. Pada kondisi semacam ini, yang diperlukan adalah suatu kondisi kesehatan mental – dan sekaligus emosi – yang mencakup apa yang oleh Fromm (2004:499) adalah:

kemampuan untuk mencintai dan mencipta, untuk mengatasi ikatan inses berzina dengan suku dan tanah air, ditandai oleh cita rasa akan identitas yang didasarkan pada pengalaman diri sendiri sebagai subjek dan pelaku daya-daya pribadi seseorang; oleh kemampuan untuk memahami kenyataan di dalam dan di luar diri sendiri, yaitu perkembangan objektivitas dan akal budi.

Dari pernyataan Fromm dapat disimpulkan bahwa keterlibatan mental dan emosi ditopang oleh faktor-faktor : (1) kemampuan mencipta dan mencintai, (2) upaya pencegahan dekadensi moral, dan (3) cita rasa identitas. Pada bentuk yang paling sederhana, individu nampaknya merupakan alamat dari proses dimana mental dan emosi terlibat secara langsung.

Dalam kaitannya dengan konsep situasi kelompok, teori perkembangan kelompok Robbins (2006:305-306) menjelaskan bahwa secara mendasar situasi kelompok sangat ditentukan oleh, pada tahap mana suatu kelompok berada. Robbins mengemukakan lima tahap perkembangan kelompok meliputi (1) tahap

pengembangan kelompok yang dicirikan oleh banyaknya ketidakpastian, (2) tahap keributan yang dicirikan oleh konflik dalam kelompok, (3) tahap penormaan yang dicirikan oleh hubungan dan kekohesifan yang erat, (4) tahap pengerjaan dimana fungsi-fungsi kelompok dapat berkembang dengan baik, dan (5) tahap peristirahatan yang dicirikan oleh perhatian ke penyelesaian aktivitas dan bukan pada kinerja tugas. Tetapi dalam hubungannya dengan partisipasi politik dapat dilihat bahwa hanya tiga faktor pertama yaitu (1) situasi ketidakpastian, (2) situasi konflik, dan (3) situasi hubungan yang erat, yang benar-benar mempengaruhi situasi kelompok.

Mengenai kontribusi pada tujuan bersama, Paloma (1994:356) dengan mengutip pernyataan Amitai Etzioni menegaskan bahwa kontribusi pada tujuan bersama dimaksud dipengaruhi oleh dua faktor yaitu (1) mekanisme kerja, (2) mekanisme kontrol, dan (3) pengarahan aktor.

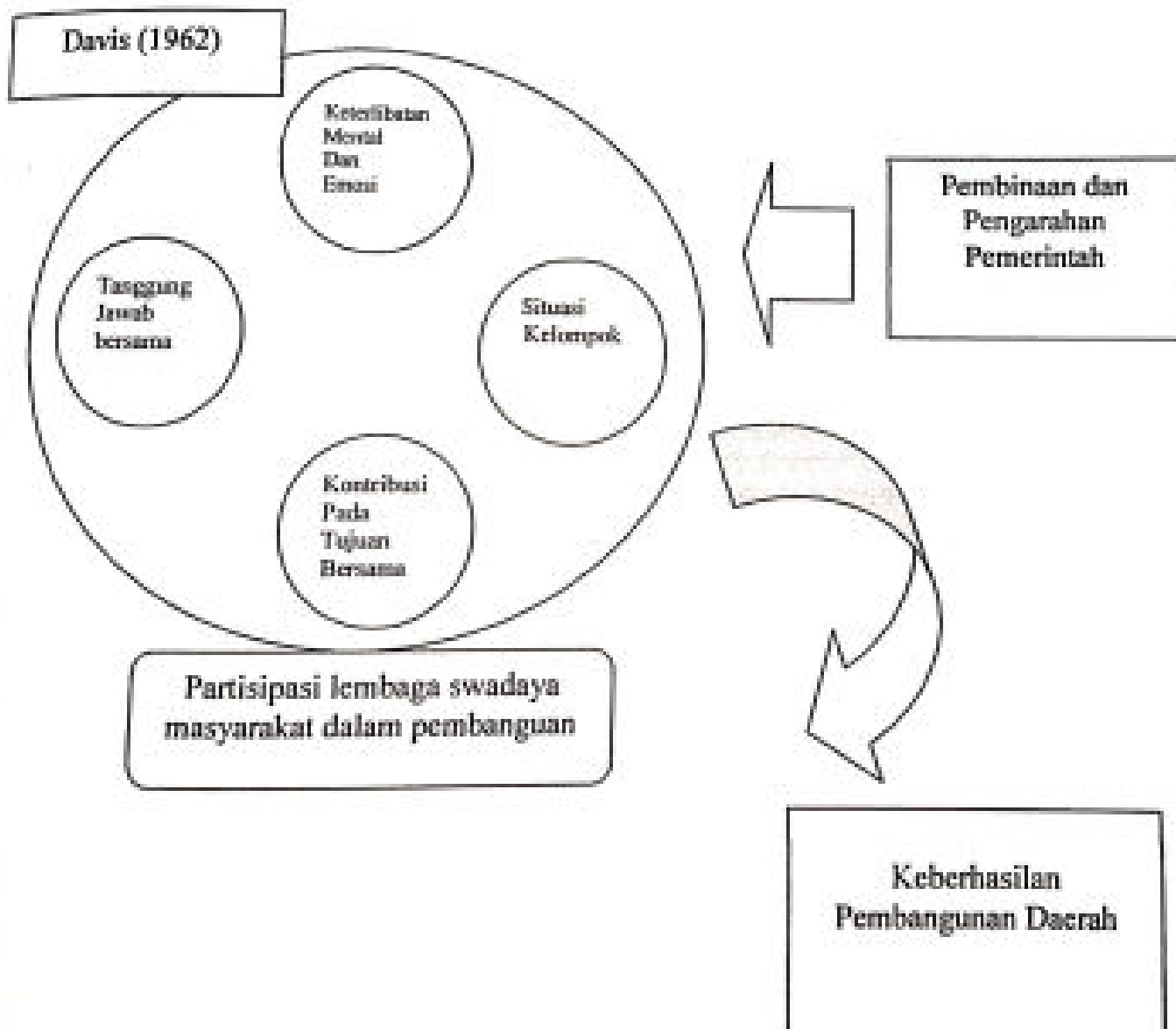
Sementara tanggung jawab bersama dapat dilihat semata-mata mengarah pada penciptaan ketertiban sosial. Paloma (1994:362) menjelaskan bahwa tanggung jawab bersama berkenaan dengan model rasional dimana ada pertimbangan terhadap faktor-faktor (1) informasi tindakan alternatif beserta konsekuensinya, (2) perhitungan untung rugi berbagai nilai, dan (3) seperangkat nilai yang telah disepakati.

Pemenuhan semua aspek partisipasi sebagaimana disebutkan di atas merupakan prasyarat pokok bagi munculnya hipotesis partisipasi aktif lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan. Artinya, partisipasi hanya mungkin manakala aspek keterlibatan mental, situasi kelompok, kontribusi pada tujuan

bersama dan pembagina tanggung jawab terpenuhi. Pada semua aspek itu, peran pemerintah pada subkultur kekuasaan menjadi dominan untuk mengarahkan partisipasi lembaga swadaya masyarakat pada subkultur sosial.

Hubungan antar konsep yang menjadi dasar teori penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2
Kerangka Pemikiran



Sumber: Adaptasi penulis terhadap model partisipasi Davis, 1962.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sebagaimana semua penelitian kualitatif, penelitian ini diarahkan pada upaya mengungkapkan fenomena yang tersembunyi di balik tampilan numerus subjek dan objek penelitian.

Dalam penelitian ini, objek penelitian adalah fenomena partisipasi dan kerjasama LSM dan Pemerintah dalam pembangunan. Sedangkan subjek dari penelitian ini adalah para birokrat pemerintah, LSM, kaum intelektual dan masyarakat yang berada di Kabupaten Sidrap.

Penelitian kualitatif diarahkan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan tindakan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Hal ini dianggap relevan dalam mengkaji ilmu pemerintahan yang selalu bersentuhan dengan masyarakat.

Pada metode ini yang lebih ditekankan adalah kemampuan seorang peneliti menggunakan teknik observasi dalam kegiatan penelitian. Dengan teknik observasi partisipatif diharapkan dapat dijangkau keterangan-keterangan yang empiris yang detail dan aktual dari unit analisis penelitian. Apakah itu menyangkut kehidupan individu maupun unit-unit sosial tertentu dalam masyarakat.

Secara lebih rinci studi kasus mengisyaratkan keunggulan-keunggulan (Durhan Bungin; 2003 : 23) sebagai berikut:

1. Studi kasus dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan antar variable serta proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih luas.
2. Studi kasus memberikan kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep dasar perilaku manusia. Melalui penyelidikan intensif peneliti dapat menemukan karakteristik dan hubungan-hubungan yang (mungkin) tidak diharapkan/diduga sebelumnya.
3. Studi kasus dapat menyajikan data-data dan temuan-temuan yang sangat berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan bagi perencanaan penelitian yang lebih besar dan mendalam dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu social.

3.2. Variabel Penelitian

Penelitian kualitatif cenderung tidak menyebut variabel penelitian. Dalam penelitian kualitatif fenomena penelitian yang dipandang sebagai variabel. Fenomena penelitian ini adalah gejala partisipasi lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan. Melalui pendekatan teoritik dan emik, gejala ini akan ditampilkan sebagai focus utama penelitian.

3.3. Unit Analisis, Populasi, Sampel dan Responden

Unit analisis, populasi dan responden merupakan istilah yang diterima dalam penelitian kuantitatif. Meski demikian, penelitian ini akan mencoba menggunakan beberapa istilah di atas kecuali pada istilah responden akan diganti menjadi informan.

3.3.1. Unit Analisis

Unit analisa penelitian ini adalah para ketua lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berada di Kabupaten Sidrap. Melalui mereka diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan fenomena partisipasi lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan.

3.3.2. Populasi

Populasi penelitian ini meliputi semua lembaga swadaya masyarakat dan instansi pemerintah serta lembaga sosial lainnya yang berada dalam wilayah Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah lembaga swadaya masyarakat ada 22, jumlah lembaga pemerintah ada 34, dan jumlah lembaga adat ada 4.

3.3.3. Sampel

Sampel adalah istilah yang dikenal dalam penelitian kuantitatif. Penelitian ini tidak menggunakan sampel tetapi memilih secara sengaja (purposive) kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang diketahui berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah kabupaten Sidrap.

3.3.4. Informan

Sumber data penelitian ini adalah pengalaman dan persepsi lembaga swadaya masyarakat dan aparat pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan. Sumber data utama digali melalui observasi. Dalam penelitian ini sumber data adalah informan yang dapat dibagi dalam beberapa kelompok yaitu :

1. Informan dasar, yaitu orang yang memberikan data secara tertulis dan lisan (kata-kata maupun tindakan) yang berkaitan dengan dirinya sendiri sebagai subjek penelitian. Informan dasar ditentukan oleh peneliti sendiri sesuai dengan kapasitas informan dalam hubungannya dengan variabel penelitian. Pada tahap akhir dari penyusunan kerangka pikir, variabel dan indikator penelitian telah dapat didefinisikan dengan jelas yang memungkinkan peneliti menentukan informan dasar dari penelitian ini.
2. Informan kunci (*key Informan*), yaitu orang-orang yang menyajikan data melalui kata-kata serta tindakan yang direkam serta yang mengetahui betul masalah yang diteliti berkaitan dengan dirinya atau orang lain. Adapun mereka yang ditunjuk menjadi informan kunci adalah aparat pemerintah daerah Kabupaten Sidrap, tokoh masyarakat Sidrap, tokoh politik di Sidrap, pimpinan organisasi massa, tokoh agama di Sidrap, aktivis LSM dan akademisi. Sedangkan cara menentukannya dengan teknik *snow-balling* yaitu data yang diterima dari nara sumber pertama langsung diolah sehingga informasi yang diterima tersebut dapat dijadikan dasar dalam penentuan

informan dan informasi berikutnya. Penghentian perputaran roda informan dilakukan apabila telah dicapai tahap '*saturation*' dalam pengambilan data.

Informan dalam penelitian ini adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Sidrap yang terdiri atas Bupati, Wakil Bupati, Para Asisten dan Kepala Bagian, serta Pimpinan SKPD, legislatif daerah yang terdiri dari Pimpinan DPRD Kabupaten Sidrap, pelaku lembaga swadaya masyarakat yang terdiri dari ketua dan anggota lembaga swadaya masyarakat Kabupaten Sidrap dan tokoh masyarakat Kabupaten Sidrap. Informan penelitian ini secara rinci dapat disebutkan sebagai berikut :

Tabel 3
Daftar Informan Penelitian

Nomor	Informan	Jumlah
1.	Bupati Sidrap	1
2.	Wakil Bupati Sidrap	1
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap	1
4.	Asisten Bupati Bidang Pembangunan	1
5.	Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab.Sidrap	1
6.	Kepala Bappeda Kabupaten Sidrap	1
7.	Ketua DPRD Kabupaten Sidrap	1
8.	Ketua Masyarakat Adat Kabupaten Sidrap	1
9.	Ketua LSM Kompleks	1
10.	Ketua LSM LPEK	1
11.	Ketua LSM KIPFA-RI	1
		11

3.4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari aktivitas :

- 1) Wawancara. Adalah percakapan dengan nara sumber atau informan terhadap objek yang diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk merekam persepsi dan opini tentang objek penelitian secara langsung dari kata-kata dan tindakan informan.
- 2) Pengamatan/Observasi, Pengamatan dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap fenomena dari objek yang akan diteliti, untuk merekam perilaku dan tindakan objek penelitian.
- 3) Telaah dokumen, yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah, dan mengelompokkan dokumen-dokumen atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan studi ini.

Secara rinci maka upaya memasuki kancah penelitian terdiri atas langkah-langkah berikut.

1. Tahap persiapan
 - a). Menyusun rancangan penelitian
 - b). Memilih lapangan penelitian
 - c). Mengurus perijinan
 - d). Menjajaki dan menilai keadaan lapangan
 - e). Memilih dan menetapkan nara sumber
 - f). Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap pekerjaan lapangan

Memahami latar penelitian dan persiapan diri.

a). Pembatasan latar penelitian

Sebelum memasuki pekerjaan lapangan, diperlukan untuk dapat memahami latar penelitian ini disamping mempersiapkan fisik dan mental. Latar penelitian ini ditemukan ditempat terbuka.

b). Pengenalan hubungan penelitian dan persiapan diri.

Hubungan keakraban antara peneliti dengan subjek penelitian perlu untuk diciptakan, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan perolehan data dan informasi secara akurat.

c). Jumlah waktu studi

Diupayakan seefisien dan seefektif mungkin oleh peneliti, dengan pedoman pada jadwal penelitian.

3. Memasuki lapangan

Pada saat memasuki lapangan keakraban hubungan peneliti dengan subjek penelitian perlu dijaga selama proses pengumpulan data, selain itu objektivitas peneliti tetap dipelihara sehingga tidak terbawa arus oleh subjek penelitian.

4. Berperan sambil mengumpulkan data

a). Pengarahan batas study

b). Mencatat data.

c). Petunjuk tentang cara mengingat data

Instrumen utama penelitian ini adalah diri peneliti sendiri. Hal itu yang membedakan penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Penelitian ini juga

diharapkan mampu mengkaji secara mendalam masalah yang menjadi fokus penelitian, yang kemudian dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang diajukan.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data tentang gambaran umum wilayah Kabupaten Sidrap yang meliputi kondisi geografi dan administrasi serta faktor yang merupakan variable yang berkaitan dengan partisipasi lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan dengan indikatornya yaitu :

- 1) Keterlibatan mental dan emosi lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan.
- 2) Situasi kelompok lembaga swadaya masyarakat
- 3) Kontribusi lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan.
- 4) Tanggung jawab bersama lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan.
- 5) Pembinaan dan pengarahan pemerintah daerah terhadap lembaga swadaya masyarakat.

3.5. Teknik Analisis

Setelah data terkumpul, maka penelitian kualitatif membutuhkan pengujian keabsahan data. Keabsahan data menurut (Moleong, 2003 : 320) adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi unsur :

1. Mendemonstrasikan nilai yang benar.
2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan.

3. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) menurut versi positivisme dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri. Untuk itu dalam pengujian keabsahan data pada penelitian ini, peneliti memakai teknik Triangulasi.

Pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. *Trianggulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut (Moleong, 2004: 330). Trianggulasi dapat dilakukan dengan sumber data dan peneliti atau pengamat lainnya.

Dalam hal ini yang terpenting adalah bahwa jangan terlampaui banyak mengharapkan bahwa hasil pembandingan tersebut merupakan kesamaan pandangan, pendapat, atau pemikiran. Yang penting disini adalah bisa mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh (Patton 1987 : 329) tersirat dalam karangan Moleong bahwa pada metode Trianggulasi terdapat dua strategi, yaitu :

1. Bahwa pengecekan derajat kepercayaan dilakukan dengan penemuan hasil penelitian dalam beberapa teknik pengumpulan data.
2. Bahwa pengecekan derajat kepercayaan dilakukan dengan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

3. Pada teknik Triangulasi jenis yang ketiga ini ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.

Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data. Pada dasarnya penggunaan suatu tim penelitian dapat direalisasikan dilihat dari segi teknik ini. Caranya adalah dengan membandingkan hasil pekerjaan seorang analis dengan analis lainnya.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan kesatuan uraian dasar. Tahap analisis data meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Mengedit (editing) data, maksudnya adalah kegiatan memeriksa data yang terkumpul, apakah sudah terisi secara sempurna atau tidak, lengkap atau tidak cara pengisiannya sudah benar atau tidak atau yang belum lengkap atau belum benar cara pengisiannya dapat disisihkan (tidak ikut dianalisis) atau menyempurnakannya dengan jalan melakukan pengumpulan data ulangan ke sumber-sumber bersangkutan.
2. Mengodekan data, yaitu memberikan kode-kode tertentu pada masing-masing kategori atau nilai dari setiap variable yang dikumpulkan datanya.
3. Menganalisis dan menginterpretasikan data, analisis data menunjuk pada kegiatan mengorganisasikan data kedalam susunan-susunan tertentu didalam rangka menginterpretasikan data, ditabulasi sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab hipotesis penelitian.

Analisis dilanjutkan dengan penafsiran. Penafsiran data penelitian kualitatif menurut (Moleong, 2002:198) yaitu : Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menerapkan prosedur; (1) analisis deskriptif dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan, (2) Penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori yang sesuai.

Mengacu pada pendapat diatas maka data yang sudah dikumpulkan, diolah dan diinterpretasikan secara kualitatif dengan menjawab masala penelitian. Data tersebut ditafsirkan menjadi kategori-kategori yang berarti menjadi bagian dari teori atau mendukung teori yang diformulasikan secara deskriptif.

3.6.Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini berlangsung di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan dan mengambil latar (*setting*) atau situasi di mana berlangsungnya observasi dan wawancara mengenai partisipasi LSM dalam pembangunan. Sedangkan yang menjadi lapangan (*field*) penelitian ini adalah birokrasi Kabupaten Sidrap.

Guna mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal, maka penelitian ini diarahkan pada suatu manajemen penelitian dengan jadwal yang disusun sebagai berikut;

Tabel 4
Kegiatan dan Jadwal Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	2011-2012									
		Agst 2011- Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agp	Sept	
1	Observasi										
	Pembuatan Proposal										
	Bimbingan										
	Ujian Proposal										
	Revisi Proposal										
	Ujian Tesis										
	Revisi Tesis										

Sumber : Jadwal Kalender Akademik MAPD 2012.

Penelitian tentang partisipasi dan kerjasama LSM dan Pemerintah dalam pembangunan Kabupaten Sidrap periode 2010-2012 ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pengamatan yang telah dilakukan penulis sejak awal penelitian. Tahapan ini ditempuh guna mendapatkan suatu konstruk konsep tentang fenomena yang terjadi di lapangan dengan fenomena yang dipahami penulis.

Pada tahap kedua, dilakukan penelitian yang meliputi pembuatan proposal, pengajuan proposal, ujian proposal, penelitian lapangan, pengolahan data, pembimbingan dan penulisan tesis, ujian tesis, dan revisi tesis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi dan Institusi Penelitian

4.1.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Sidrap terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi. Secara Geografis wilayah Sidrap berada pada 3043⁰ sampai 4009⁰ Lintang Selatan dan 119041⁰ sampai dengan 120010⁰ Bujur Timur. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sidenreng. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.506,19 km². Penduduk asli daerah ini adalah suku Bugis yang ta'at beribadah dan memegang teguh tradisi saling menghormati dan tolong-menolong. Dimana-mana dapat dengan mudah ditemui bangunan masjid yang besar dan permanen.

Wilayah Sidrap berbatasan dengan:

- (a) Kabupaten Pinrang dan Enrekang di bagian Utara
- (b) Kabupaten Barru dan Soppeng di bagian Selatan
- (c) Kabupaten Pinrang dan Kota Pare-pare di bagian Barat
- (d) Kabupaten Luwu dan Wajo di Timur.

Berdasarkan letak geografis ini, maka Kabupaten Sidrap merupakan wilayah yang relatif strategis karena sebagian besar wilayahnya dilalui jalur transportasi utama di pulau Sulawesi, selain bahwa jalur itu merupakan jalur pariwisata ke tanu Toraja yang dapat memberi keuntungan luar biasa apabila dimanfaatkan.

Secara topografi, kondisi alam Sidrap beraneka jenis. Pada wilayah landaian dimana kondisi topografisnya berupa rawa dengan air payau dimana tumbuh dan berkembang vegetasi *palmaria* dan *mangrove*. Bergerak ke barat, terdapat lebih banyak dataran.

Musim penghujan dan kemarau di wilayah Sidrap berimbang. Pada periode Juni sampai September arus angin datang dari arah Australia mengakibatkan musim kemarau. Sementara pada periode Desember hingga Maret, angin dari Asia dan Samudra Pasifik menghasilkan hujan yang merata di Sidrap. Curah hujan Sidrap rata-rata 412,6mm dengan lama 22 hari. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 67,3mm.

Struktur geologi Sidrap tersusun dari batuan sedimen yang membentuk formasi dataran, sementara endapan permukaan wilayah ini terdiri dari aluvium dan rawa yang ditemui di beberapa daerah. Tanah di Sidrap terdiri dari jenis tanah organosol, Litosol, Aluvial, Hidromorf, Klei Humaus, dan beberapa jenis umum lainnya.

Kondisi geografis ini sedikit banyak berhubungan dengan alokasi pemanfaatan lahan Sidrap. Hingga tahun 2011 (data statistik 2012), areal penggunaan lahan pertanian bukan *swabody land* merupakan yang terbesar dengan angka 4,648 Ha.

4.1.1.2. Kondisi Demografi

Budaya daerah Sidrap sangat beragam. Penduduk utama Kabupaten adalah suku Bugis. Mereka mendiami daerah ini untuk periode yang lama. Peristiwa tana peyeharan suku-suku di Sulawesi dapat ditandai sebagai periode awal

pendudukan Sirap oleh masyarakat Bugis. Dari sisi potensi, Sidrap memiliki kualitas sumber daya manusia cukup memadai. Dari total 271.801 jiwa menurut data statistik tahun 2010. Jumlah penduduk laki-laki ada 131.954 jiwa. Sementara jumlah penduduk perempuan mencapai 139.84. Jumlah angkatan kerja daerah ini mencapai 135.737 jiwa angkatan kerja (49,94%). Perkembangan jumlah angkatan kerja selama periode 2001-2012 mencapai rata-rata 2,25%. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten pada kurun waktu 1990-2011 mencapai 1,64% per tahun. Secara ringkas, profil penduduk, tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduk Sidrap pada tahun 2012 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5
Jumlah Penduduk, Tingkat Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Sidrap Tahun 2012

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk Per tahun 2004-2012(%)	Luas Wilayah (Ha)	Tingkat Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Tellu Limpoe	13.879	1,53	227,8	87,49
2	Panca Lautang	13.739	1,52	211,4	64,85
3	Watang Pulu	32.197	1,76	304	106,24
4	Baranti	29.077	2,06	201	144,66
5	Panca Rijang	13.459	0,81	227,2	59,23
6	Kulo	12.478	2,27	206,1	60,54
7	Martengae	47.127	2,45	228	206,70
8	Sidenreng	28.589	0,0	403,1	70,92
9	Pitu Riawa	28.558	0,0	406	70,34
10	Dua Pitu	27.207	0,0	400,3	67,97
11	Pitu Riase	25.491	1,05	2.506,19	10,17
Total		271.801	1,64		

Sumber : Profil Kabupaten Sidrap, 2012, h.10.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Watang Pulu merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar dan demikian pula dengan volume tekanan penduduk pada lahan. Meski demikian, laju pertumbuhan

penduduk terbesar ada di kabupaten Baranti. Sementara laju pertumbuhan di tiga kabupaten yaitu Maritengae.

Penduduk Sidrap merupakan penduduk dengan aktivitas luar rumah yang tinggi. Jika tidak bersekolah, penduduk beraktivitas di pasar, perumahan, atau pekerjaan jasa lainnya. Aktivitas penduduk dalam rumah tangga hingga tahun 2012 tercatat hanya 18,11%. Sementara penduduk yang duduk di bangku sekolah sebesar 7,75%. Hal ini menunjukkan bahwa gerak aktivitas sangat tinggi dalam kegiatan produksi dan kegiatan lainnya.

Kabupaten Sidenreng Rappang secara geografis dikelilingi oleh delapan Kabupaten/Kota tetangga yang juga sekaligus berada di tengah-tengah jazirah Sulawesi Selatan, menempatkannya sebagai jalur perlintasan transportasi utara-selatan dan timur-barat begitupun sebaliknya khususnya di kawasan ajatappareng. Kondisi ini otomatis juga menjadikan Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki daya akses yang luas dan mudah dari segala penjuru, sehingga merupakan nilai tambah bagi Kabupaten Sidenreng Rappang dibanding dengan daerah lainnya. Posisi dan kekuatan yang dimiliki tersebut sangat berperan penting dalam mewujudkan cita-cita Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang seperti yang tertuang dalam visinya yaitu Terwujudnya Sidenreng Rappang sebagai Pusat Agribisnis Modern dan Lima Terbaik di Sulawesi Selatan dalam Pembangunan Manusia.

Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang dimiliki Kabupaten Sidenreng Rappang seperti tanahnya yang subur dengan berbagai

Sidenreng Rappang memiliki keunggulan kompetitif untuk pengembangan pertanian dan menghasilkan berbagai produk pertanian dalam arti luas (termasuk komoditi tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan). Struktur Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang sampai Tahun 2010 masih didominasi oleh Sektor Pertanian yang memberikan kontribusi paling dominan terhadap PDRB yaitu sebesar 42,79 %, pertumbuhan sektor ini mencapai 1,52 %. Terbesar kedua dicatatkan oleh Sektor Jasa.

Hal ini dikarenakan meningkatnya secara signifikan sub-sektor administrasi pemerintah di Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga mampu menggeser sektor perdagangan menjadi penyumbang ketiga terhadap perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang. Sektor jasa menghasilkan kontribusi sebesar 24,35 % pada PDRB tahun 2010 dengan pertumbuhan 3,85 %, dengan pertumbuhan rata-rata dari tahun 2008 sampai 2010 sebesar 6,12 %. Dan sektor ketiga adalah perdagangan, hotel dan restoran yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah di tahun 2009, mencapai 11,45 % dengan pertumbuhan rata-rata 9,46 % per tahun dalam kurun waktu tahun 2008 sampai 2010. Melihat statistik ini, maka sub-sektor perdagangan sangat potensial untuk dikembangkan sebab disamping telah memberikan porsi yang cukup berpengaruh terhadap PDRB, juga karena sektor ini mengalami pertumbuhan rata-rata 8,97 % setiap tahun sejak tahun 2007.

Secara umum laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2008-2010) mengalami peningkatan yang cukup mengembirakan. Tingkat Pendapatan Regional Perkapita atau biasa

disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (PDRB Perkapita) di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2008 sebesar Rp. 9.596.593,-. Ini meningkat pada Tahun 2009 hingga 21,51 persen atau sebesar Rp. 11.660.748,-. Dan pada Tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 12.387.006,- atau 6,23 persen. Jika diakumulasikan maka rata-rata pertumbuhan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mencapai 16,56 persen.

4.1.1.3. Kondisi Budaya dan Faktor Pendorong Perencanaan Pembangunan

Dari akar sejarahnya, Sidrap merupakan daerah yang dihuni oleh banyak suku bangsa. Karenanya, isu pluralisme merupakan sebuah bentuk loyalitas masyarakat kepada kesatuan komunitas mereka. Impelementasi isu ini adalah pembinaan generasi muda yang diarahkan untuk meningkatkan semangat dan kebanggaan dan tanggung jawab kepada daerah. Hanya sayangnya bahwa pembinaan budaya tradisional Sidrap berjalan amat lamban dan terkesan reaksional.

Apabila budaya di sini berkaitan dengan pembicaraan tentang etnis dan suku bangsa maka budaya Sidrap bertumpu pada beberapa etnis asli dan pokoknya yaitu Bugis. Daerah seperti Pitu Riase, Maritengae dan Tellu Limpoe adalah basis kebudayaan Bugis di sana. Selain etnis asli tersebut telah berkembang pula penduduk yang berasal dari etnis luar seperti : Jawa, Makasar, Sunda, dan lain lain. Keberadaan berbagai etnis yang ada diseluruh penjuru daerah ini memperkaya khazanah budaya Bhinneka Tunggal Ika.

Masing-masing etnis memelihara budaya nenek moyang mereka sebagai suatu kebanggaan. Kendati demikian mereka mencair dan berakulturasi. Bentuk yang paling sederhana ialah adanya saling tukar menukar seni budaya dalam masyarakat Sidrap. Orang-orang Pitu Riase berusaha belajar serta menampilkan lagu dan kesenian etnis Makassar, sementara orang-orang Jawa belajar menguasai bahasa Kulo.

Dari segi kehidupan beragama, Sidrap mewarisi tradisi toleransi yang agung yang ditinggalkan jejak kerajaan dahulu. Hingga tahun 2012, penduduk Sidrap memeluk dan beribadah dalam bermacam agama, dengan komposisi terbesar dikonfigurasi oleh masyarakat Islam yang memberi warna pada karakter dan corak budayanya. Jumlah pemeluk agama Islam di Sidrap pada tahun 2012 mencapai 260.037 jiwa (94,2%). Sementara pemeluk agama Katolik mencapai 1,65%, Kristen Protestan ada 1,60%, Hindu 0,94%, dan Budha dianut 1,6%

Distribusi sarana peribadatan di Sidrap bervariasi bila dibandingkan dengan jumlah pemeluk agama. Hingga tahun 2012, di Sidrap terdapat 3.872 masjid, 1.665 mushola dan 2.383 langgar. Sementara gereja protestan gereja Katolik, pura, dan vihara masing-masing 1 buah. Pemerintah Daerah terus memfasilitasi pembangunan sarana peribadatan dalam tujuan menjamin kebebasan beribadah tiap warga negara.

Kehidupan toleransi antar beragama di Sidrap tergolong baik. Kerjasama antar umat beragama dipertahankan dalam konteks sosial kemasyarakatan. Demikian juga dialog antar tokoh agama dipelihara dalam rangka mempererat tali komunikasi atas dasar saling pengertian. Umat Islam memainkan peran

dominan dalam upaya membuka dialog dan kerjasama antar umat beragama dalam tujuan menjawab permasalahan-permasalahan sosial yang tidak tertangani oleh pemerintah.

Kerukunan antar umat beragama merupakan kekuatan pokok perencanaan pembangunan di Sidrap. Forum-forum diskusi keagamaan biasanya mengangkat isu-isu kemiskinan, kemelaratan, dan agenda untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Usulan forum diskusi dikirim kepada pemerintah melalui Bappeda. Pemerintah biasanya memenuhi permintaan forum diskusi terkait dengan agenda perencanaan dan penuntasan kemiskinan.

Tahun 2011 ada 11 proyek pembangunan dengan tema penyelesaian kemiskinan yang dirilis pemerintah daerah. Kesebelas proyek itu adalah usulan dari kelompok diskusi antar umat beragama. Selain itu, Bappeda juga memiliki kriteria sendiri dalam penentuan sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan. Dalam hubungannya dengan forum musyawarah antar umat beragama, jika usulan itu datang dari pemerintah, maka tokoh agama akan dilibatkan dalam pengawasan pembangunan di daerahnya.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Pembangunan Kabupaten Sidrap dan Hasilnya

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang 2009-2013 yang telah memasuki Tahun ketiga didasarkan untuk mewujudkan visi didalam RPJMD yaitu "Terwujudnya Sidenreng Rappang sebagai Pusat Agribisnis Modern dan Lima Terbaik di Sulawesi Selatan dalam Pembangunan Manusia ", maka dirumuskan misi

Kabupaten Sidenreng Rappang yang bertujuan : 1.Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Agribisnis-Agroindustri; 2.Membantapkan Peningkatan Kualitas Manusia; 3.Membangun dan Mengembangkan Sarana dan Prasarana Daerah; 4.Memelihara Iklim Kondusif dalam kehidupan Masyarakat; 5.Mengefektifkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance).

Strategi dasar pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan pemerintah melalui upaya-upaya pelayanan dalam rangka pemberdayaan, pembangunan dan pengaturan (regulasi) serta pada intisi yaitu Penciptaan Lingkungan Kondusif serta Pemihukan Kepada Kelompok Masyarakat Kecil tanpa mengabaikan keberadaan dan peran masyarakat menengah keatas. Sedangkan arah kebijakan umum pembangunan daerah mengandung arti sebagai operasionalisasi dari visi dan misi daerah untuk jangka waktu tertentu, olehnya itu arah dan kebijakan pembangunan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana strategis harus seoptimal mungkin memperbaiki kondisi obyektif, lingkungan strategis dan peluang yang dapat dicapai.

Kebijakan umum pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yang dijabarkan dalam sembilan poin kebijakan umum dapat saling terkait dan bersinergi satu sama lain, yaitu :

- 1.Peningkatan nilai produksi dan nilai tambah usaha tani;
- 2.Penciptaan zona agribisnis dan agroindustri;
- 3.Peningkatan akses dan kualitas pendidikan;
- 4.Peningkatan akses dan derajat kesehatan;
- 5.Pemantapan struktur ekonomi daerah;

6. Pengembangan lapangan kerja dan usaha;
7. Pembangunan sarana dan prasarana daerah;
8. Penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan;
9. Penguatan kelembagaan pemerintahan.

Dalam hal penyelenggaraan fungsi pemerintahan, penyelenggaraan kewenangan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (desentralisasi) terbagi atas pelaksanaan urusan wajib dan pilihan.

Penyelenggaraan urusan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013. Secara garis besar capaian pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun Anggaran 2010-2011 adalah sebagai berikut:

4.2.1.1. Penyelenggaraan Urusan Wajib

1. Pendidikan Pada Tahun Pelajaran 2011/2012

Jumlah siswa SD/MI/Paket A sebanyak 35.180 jiwa, jumlah siswa SMP/MTs/Paket B sebanyak 14.523 jiwa, sedangkan, jumlah siswa SMA/SMK/MA/Paket C sebanyak 9.731 jiwa. Sementara itu, jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011 sebanyak 3.800 jiwa.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam penyelenggaraan Urusan Pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun

2011 direalisasikan mencapai 87,38 persen. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 273.327.232.200,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 238.828.879.563,- mencakup program dan kegiatan, antara lain :

- a) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang dilaksanakan dengan kegiatan :
 1. Pengembangan anak usia dini (pendidikan gratis TK);
 2. Peringatan Hari Anak Aksara;
 3. Dana sharing PPAUD dan LOAN.
- b) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) Sembilan (9) Tahun, yang dilaksanakan dengan kegiatan :
 1. Pembangunan gedung sekolah;
 2. Pembangunan pagar, taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir sekolah;
 3. Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan;
 4. Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 5. Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Dasar;
 6. Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun lainnya;
 7. Pendidikan gratis SD/MI, SLTP/MTs;
 8. Dana percepatan infrastruktur pendidikan.
- c) Program Pendidikan Menengah, yang dilaksanakan dengan kegiatan::
 1. Pembangunan ruang kelas sekolah;
 2. Pembangunan ruang guru sekolah;
 3. Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah;

4. Pembangunan ruang ibadah;
 5. Pengadaan meubeler sekolah;
 6. Pendidikan gratis SMA/SMK.
- d) Program Pendidikan Pendidikan Non Formal yang dilaksanakan dengan kegiatan:
1. Monitoring evaluasi dan pelaporan;
 2. Pendidikan non formal lainnya.
- e) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan dengan kegiatan:
1. Pelaksanaan sertifikasi;
 2. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan.
- f) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan yang dilaksanakan dengan kegiatan:
1. Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan;
 2. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 4. Pengembangan Data Pokok Pendidik (DAPODIK);
 5. Manajemen Pelayanan Pendidikan lainnya
- g) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang dilaksanakan dengan kegiatan:
1. Pedoman penyusunan penilaian kinerja pegawai.;
 2. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

2. Kesehatan

Penyelenggaraan Urusan Kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang dilaksanakan oleh 3 (tiga) SKPD, yaitu :

- a) Dinas Kesehatan;
- b) Rumah Sakit Umum Nene Mallomo dan;
- c) Rumah Sakit Umum Arifin Nuamang.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam penyelenggaraan Urusan Kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011 alokasi anggaran sebesar Rp. 69.328.385.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 61.418.231.785,- atau 88,59 persen.

Rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk masing-masing SKPD penyelenggaraan Urusan Kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011, yakni : (1) **D i n a s K e s e h a t a n** disediakan anggaran : Rp. 37.154.227.000 teralisasi Rp. 32.363.075.122; (2) **R S U N e n e M a l l o m o** tersedia anggaran : Rp. 20.807.276.000 dan terrealisasi Rp. 18.788.180.062; (3) **R S U A r i f i n N u a m a n g a** dialokasikan anggaran Rp. 11.366.882.000 dan terrealisasi Rp. 10.266.976.601.

Beragam program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh 3 SKPD pelaksana dalam penyelenggaraan Urusan Kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, antara lain :

- 1) Program Obat dan Pembekalan Kesehatan, dilaksanakan dengan kegiatan :
 - a) Pengadaan Obat dan Pembekalan Kesehatan;
 - b) Peningkatan Pemcrutan Obat dan Pembekalan Kesehatan

- c) Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunikasi dan Rumah Sakit;
 - d) Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Pembekalan Kesehatan;
 - e) Pengadaan obat dan pembekalan kesehatan lainnya.
- 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dilaksanakan dengan kegiatan:
- a) Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya;
 - b) Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan;
 - c) Revitalisasi Sistem Kesehatan;
 - d) Peningkatan Kesehatan Masyarakat;
 - e) Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan;
 - f) Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan;
 - g) Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan;
 - h) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - i) Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil dan Perbatasan;
 - j) Pembinaan Kesehatan Remaja;
 - k) Pelayanan laboratorium kesehatan daerah;
 - l) Pelayanan laboratorium kesehatan lingkungan;
 - m) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
- 3) Program Pengawasan Obat dan Makanan, dilaksanakan dengan kegiatan:
- a) Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di bidang Obat dan Makanan;
 - b) Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya;
 - c) Peningkatan Penyelidikan dan Penegakan Hukum dibidang Obat dan Makanan.

- 4) Program pengembangan obat asli Indonesia, dilaksanakan dengan kegiatan; peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan di luar negeri.
- 5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dilaksanakan dengan kegiatan :
 - a) Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan;
 - b) Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan berbahaya lainnya
- 6) Program Perbaikan Gizi Masyarakat, dilaksanakan dengan kegiatan :
 - a) Pemberian tambahan makanan dan vitamin;
 - b) Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro;
 - c) Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi.
- 7) Program Pengembangan Lingkungan Sehat, dilaksanakan dengan kegiatan :
 - a) Pengkajian Lingkungan Sehat;
 - b) Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat.
- 8) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dilaksanakan dengan kegiatan :
 - a) Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk;
 - b) Pengadaan Vaksin Penyakit Menular;
 - c) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
 - d) Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik;

- e) Peningkatan imunisasi;
 - f) Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah;
 - g) Peningkatan KIE pencegahan dan pemberantasan penyakit.
- 9) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dilaksanakan dengan kegiatan :
- a) Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk;
 - b) Pengadaan Vaksin Penyakit Menular;
- 10) Program Standarisasi Kesehatan, dilaksanakan dengan kegiatan :
- Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan.
- 11) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, dilaksanakan dengan kegiatan
- Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan.
- 12) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, dilaksanakan dengan kegiatan :
- a) Pembangunan Puskesmas Pembantu;
 - b) Pembangunan Posyandu;
 - c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas;
 - d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu;
 - e) Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu;
 - f) Pemeliharaan perbekalan kesehatan;
 - g) Pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana lainnya.

13) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata, dilaksanakan dengan kegiatan :

- a) Pengembangan ruang gawat darurat;
- b) Pengembangan tipe rumah sakit;
- c) Pembangunan instalasi pengelolaan limbah RS;
- d) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit;
- e) Pengadaan obat-obatan rumah sakit;
- f) Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry dan lain-lain);
- g) Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit;
- h) Pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit.

14) Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RSI/RS Paru-paru/RS Mata, yang dilaksanakan dengan kegiatan :

- a) Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit;
- b) Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan.

15) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita, yang dilaksanakan dengan kegiatan :

- a) Penyuluhan Kesehatan Anak Balita;
- b) Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita.

16) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia, dilaksanakan dengan kegiatan:

- a) Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lanjut Usia;

b) Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan Lansia.

17) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, dilaksanakan dengan kegiatan Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Tidak Mampu.

18) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, dilaksanakan dengan kegiatan :

- a) Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat;
- b) Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis;
- c) Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan.

19) Program Perencanaan, Pengawasan, pengujian dan Pengendalian Muta, dilaksanakan dengan kegiatan; survey dan desain.

3.Lingkungan Hidup

Pencapaian program dan kegiatan dalam penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2011 sebesar 80,02 persen. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.916.485.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.133.860.075,-. Volume Sampah yang ditangani sebanyak 222.120 m^3 . Sementara, Volume Produksi Sampah sebanyak 247.855 m^3 . Jadi, persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011 sebesar 89,62 persen. Sedangkan Jumlah Daya Tampung TPS di Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 7.988,4 m^3 .

Sedangkan jumlah penduduk Tahun 2011 sebanyak 271.801 Jiwa. Jadi rasio TPS per-1000 penduduk sebesar 29,08. Beragam program dan kegiatan yang

telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011, yaitu:

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan, dilaksanakan dengan kegiatan :
 - 1). Penyediaan prasarana dan sarana persampahan;
 - 2) Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan.
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup, dilaksanakannya dengan kegiatan :
 - 1) Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura;
 - 2) Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup;
 - 3) Koordinasi Penyusunan AMDAL;
- c. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, dilaksanakan dengan kegiatan: peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air.
- d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dilaksanakan dengan kegiatan :
 - 1) Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan;
 - 2) Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan;
 - 3) Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah;
 - 4) Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup lainnya.
- e. Program Peningkatan Pengendalian Polusi, dilaksanakan dengan kegiatan: Pengujian kadar Polusi limbah padat dan limbah cair.

f. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dilaksanakan dengan kegiatan; pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) lainnya.

4. Pekerjaan Umum

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011 dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga bersama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yaitu, alokasi anggaran sebesar Rp.75.215.757.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 53.872.885.983,- atau 71,62 persen keuangan.

Anggaran yang dialokasikan dalam mendukung penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011, menurut instansi masing-masing, yakni :

- 1) D i n a s B i n a M a r g a Anggaran : Rp. 49.728.331.000, terealisasi Rp. 34.203.866.454.
- 2) D i n a s P S D A Anggaran : Rp. 25.491.426.000, terealisasi Rp. 19.669.019.529, -

Seluruh Jalan di Kabupaten Sidenreng Rappang sampai akhir Tahun 2011 sepanjang 1.009,49 km. Sementara, Jalan Kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 906,59 km. Jadi, persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik sebesar 89,81 persen. Pada Tahun 2011, Luas Irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang, yakni 35.466 Ha.

Sementara, Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik mencapai 35.439 Ha. Jadi, persentase Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik, mencapai 99,92

persen. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011, yaitu :

- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, alokasi anggaran Rp. 20.935.720.000,- dan realisasi Rp. 11.772.056.125,- dilaksanakan dengan kegiatan:
 - 1) Pembangunan jalan;
 - 2) Pembangunan jembatan;
 - 3) Peningkatan jalan dan jembatan lainnya.
- b. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, dilaksanakan dengan kegiatan; pembangunan saluran drainase/gorong-gorong lainnya.
- c. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, dilaksanakan dengan kegiatan; Pembangunan Turap/Talud/Bronjong.
- d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dilaksanakan dengan kegiatan :
 1. Rehabilitasi pemeliharaan jalan;
 - 2.Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan.
- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, alokasi anggaran Rp. 434.555.000,- dengan realisasi Rp. 431.933.000,- dilaksanakan dengan kegiatan Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan; dan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat.

- f. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, alokasi Rp. 1.011.756.000,- dengan realisasi Rp. 707.800.200,- dilaksanakan dengan kegiatan: Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur.
- g. Program Pembangunan Infrastruktur pedesaan, alokasi Rp. 3.632.059.000,- dengan realisasi Rp. 1.622.015.050,- dilaksanakan dengan kegiatan; pembangunan jalan dan jembatan pedesaan.
- h. Program Perencanaan, Pengawasan, Pengujian dan Pengendalian Mutu, dilaksanakan dengan kegiatan; survey dan desain.
- i. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dilaksanakan dengan kegiatan; intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- j. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengaliran Lainnya, dilaksanakan dengan kegiatan :
- Pengembangan dan Perencanaan Jaringan Irigasi;
- 1) Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi;
 - 2) Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun;
 - 3) Pemberdayaan Petani Pemakai Air;
 - 4) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengaliran lainnya;
 - 5) Percepatan/Penguatan Infrastruktur daerah.

5. Penataan Ruang

Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan dalam penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011, yakni sebesar 84,21 persen. Dan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.181.574.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.837.098.200. Program dan kegiatan yang diselenggarakan dalam Urusan Penataan Ruang, diantaranya :

- a. Program Perencanaan Tata Ruang, yang dilaksanakan melalui kegiatan:
 - 1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang;
 - 2) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
- b. Program Pemanfaatan Ruang, yang dilaksanakan melalui kegiatan :
 - 1) Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang;
 - 2) Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, yang dilaksanakan melalui kegiatan; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, yang dilaksanakan melalui kegiatan: peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.
- e. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), alokasi Rp. 379.353.000,- dengan realisasi Rp. 349.865.200,- yang dilaksanakan melalui kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- f. Program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

6. Perencanaan Pembangunan

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011 mencapai 81,05 persen. Dan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.618.232.450,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.311.539.215. Berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan di oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011, yaitu :

- a. Program Perencanaan Pembangunan Kota-Kota Menengah dan Besar, yang dilaksanakan melalui kegiatan:
 - 1) Operasional penunjang kegiatan fisik dan prasarana;
 - 2) Operasional PMU untuk pelaksanaan USDRP.
- b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, yang dilaksanakan melalui kegiatan :
 - 1) Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik;
 - 2) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- c. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, yang dilaksanakan melalui kegiatan:
 - 1) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
 - 2) Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan.

- d. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, yang dilaksanakan melalui kegiatan :
- 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Sosial Budaya;
 - 2) Peningkatan Kualitas SDM Perencana dan Lihang.
- e. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam, yang dilaksanakan melalui kegiatan :
- 1) Operasional Pendamping WISMP;
 - 2) Perencanaan prasarana wilayah dan SDA lainnya (Op. PNPM-MP).
- f. Program Perencanaan Tata Ruang, yang dilaksanakan melalui kegiatan:
- 1) Penyusunan rencana Perda tentang RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - 2) Luncuran penyusunan revisi RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang.
- g. Program Lingkungan Sehat Perumahan, yang dilaksanakan melalui kegiatan; Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat (PAMSTMAS).

7. Perumahan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan Urusan Perumahan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011, mencapai 53,95 persen. Dan alokasi anggaran sebesar Rp. 77.209.188.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 43.202.346.842. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan Bidang Cipta Karya pada Dinas Kimprasda dalam penyelenggaraan Urusan Perumahan (Cipta Karya) di Kabupaten Sidenreng Rappang yakni :

- a. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong, yang dilaksanakan melalui kegiatan; Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.
- b. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, yang dilaksanakan melalui kegiatan; PNPM- Mandiri Perkotaan.
- c. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, alokasi Rp. 2.430.047.000,- dengan realisasi Rp. 1.848.247.701,- yang dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Prasarana Pengambilan dan saluran pembawa serta Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan Sumber Daya Air.
- d. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, yang dilaksanakan melalui kegiatan; Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan.
- e. Program perencanaan, pengawasan, pengujian dan pengendalian mutu, yang dilaksanakan melalui kegiatan :
 - 1) Survey dan desain;
 - 2) Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi badan usaha.
- f. Pemberdayaan komunitas perumahan, yang dilaksanakan melalui kegiatan; fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat.
- g. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, yang dilaksanakan melalui kegiatan; peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.

8. Kepemudaan dan Olahraga

Program dan Kegiatan dalam penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011 telah terealisasi mencapai 79,86 persen. Alokasi anggaran yang diberikan sebesar Rp. 1.816.409.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.450.635.650. Beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata dalam penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Sidenreng Rappang diantaranya :

- a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda, yang dilaksanakan melalui kegiatan; Pengembangan dan Kerjasama Kebijakan Pemuda Lainnya.
- b. Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda dan Pelatihan keterampilan bagi pemuda.
- c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, yang dilaksanakan melalui kegiatan; Peningkatan pengembangan ketahanan ideologi negara.
- d. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, alokasi Rp. 345.200.000,- realisasi Rp. 211.830.000,- yang dilaksanakan melalui kegiatan :
 - 1) Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat;
 - 2) Peningkatan kesegaran jasmani dan rohani;
 - 3) Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga;
 - 4) Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga lainnya.

- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, yang dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga.

9. Penanaman Modal

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011 mencapai 82,47 persen dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 114.413.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 94.355.500. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah;

- a. Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi, dengan kegiatan;

- 1) Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.
- 2) Peningkatan kegiatan pentantraan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

10. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011 mencapai 74,65 persen. Alokasi anggaran sebesar Rp.721.390.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 538.547.744. Adapun

program dan kegiatan dalam penyelenggaraan Urusan KUKM oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011, yaitu :

- a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, alokasi Rp. 73.635.000,- realisasi Rp. 38.595.000,- dilaksanakan dengan kegiatan :
 - 1) Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan;
 - 2) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD;
 - 3) Sosialisasi HAKI kepada usaha mikro kecil dan menengah.
- b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, dilaksanakan dengan kegiatan :
 - 1) Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah;
 - 2) Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah.
- c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dilaksanakan dengan kegiatan :
 - 1) Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi;
 - 2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - 3) Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011 sebanyak 18.760 unit. Sementara, jumlah seluruh UKM sampai akhir Tahun 2011 sebanyak 19.021 unit. Jadi, persentase Usaha Mikro dan Kecil, mencapai 98,63 persen.

11. Kependudukan dan Catatan Sipil

Program dan Kegiatan dalam penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011 telah direalisasikan mencapai 61,38 persen. Dan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.664.839.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.021.839.947. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu:

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan, yang dilaksanakan dengan kegiatan:
 - 1) Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan;
 - 2) Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil;
 - 3) Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 4) Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Catatan Sipil.

Jumlah Penduduk Wajib KTP (usia >17 dan atau Pernah / Sudah Menikah) di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011 didasarkan pada data pelayanan KTP dan KK sebanyak 237.754 jiwa. Sementara, jumlah Penduduk yang memiliki KTP 225.561 jiwa. Jadi, persentase Kepemilikan KTP hanya 94,87 persen. Jumlah Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011 sebanyak 274.648 Jiwa. Sementara, jumlah Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran hanya 17.009 jiwa. Jadi, Kepemilikan Akta Kelahiran per-1000 Penduduk hanya 61,93 jiwa.

12. Ketenagakerjaan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011, hanya mencapai 35,00 persen. Alokasi anggaran sebesar Rp. 357.082.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 124.989.000. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011, adalah :

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, yang dilaksanakan melalui kegiatan; Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.
- b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, yang dilaksanakan melalui kegiatan; Kerjasama pendidikan dan pelatihan.
- c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, yang dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan serta perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan lainnya.

13. Ketahanan Pangan

Realisasi Pelaksanaan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011, yaitu mencapai 94,05 persen. Alokasi anggaran sebesar Rp. 10.706.834.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.070.243.694. Program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan dalam penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011, yaitu :

- a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang dilaksanakan melalui kegiatan; PENAS.
- b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, yang dilaksanakan melalui kegiatan; Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- c. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, alokasi Rp. 201.020.000,- dengan realisasi Rp. 100.010.500,- yang dilaksanakan melalui kegiatan; Dana Pendamping Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan.
- d. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Rp. 542.301.500,- dengan realisasi Rp. 497.948.250,- yang dilaksanakan melalui kegiatan :
 - 1) Analisa dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplay Pangan;
 - 2) Pengembangan Cadangan Pangan;
 - 3) Pengembangan Desa Mandiri Pangan;
 - 4) Demonstrasi Olahan Pangan Lokal Ciriakan Makanan Beragam, Bergizi dan Berimbang.
- e. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, yang dilaksanakan melalui kegiatan :
 - 1) Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan;
 - 2) Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian (DAK);
 - 3) Monitoring dan Evaluasi Program Penyuluhan;
 - 4) Bimbingan dan Cara Penyuluhan Angka Kredit Tk. DPP.

14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Realisasi Pelaksanaan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011 mencapai 76,49 persen dan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.762.260.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.347.968.123. Sejumlah program dan kegiatan telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011, antara lain sebagai berikut :

a. Program Peningkatan sarana dan prasarana kantor, yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD;
- 2) Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender;
- 3) Evaluasi, monitoring dan pelaporan;
- 4) Pembinaan refasitas dan jaringan kelenyahaan pemberdayaan perempuan;
- 5) Fasilitas upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan;
- 6) Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam pembangunan keluarga;
- 7) Bimbingan usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha;
- 8) Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender;
- 9) Pameran hasil karya perempuan pembangunan;
- 10) Pembinaan keluarga berencana;
- 11) Pembinaan keluarga sejahtera.

15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011 hanya mencapai 45,91 persen. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.243.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 570.699.000. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2011 di Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu :

a. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Perempuan, yang dilaksanakan melalui kegiatan;

- 1) Pelatihan Konseling KIB bagi petugas KB dan Kader;
- 2) Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KIRC lainnya;
- 3) Penyiapan tenaga pendamping kelompok baik keluarga kecamatan lainnya;
- 4) Pengembangan model operasional BKB Posyandu (PADU);
- 5) Rapat Kerja Daerah (Rakerda);
- 6) Pengadaan sarana mobilitas KB keliling.

16. Pertubungan

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam penyelenggaraan Urusan Pertubungan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011, yakni mencapai 86,24 persen, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.362.167.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.174.691.226,- Jumlah angkutan darat

yang tercatat sebanyak 1.979 unit sedangkan jumlah penumpang yang dapat diangkut sebanyak 3.996 orang. Beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan Urusan Perhubungan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011, antara lain :

- a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, yang dilaksanakan melalui kegiatan; Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat;
- b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas L.LAJ, yang dilaksanakan melalui kegiatan :
 - 1) Rehab/Pemeliharaan Simpa alat pengujian kendaraan bermotor;
 - 2) Rehab/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas;
 - 3) Rehab/pemeliharaan Warning Light (lampu pengatur lalu lintas).
- c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, yang dilaksanakan melalui Peningkatan Disiplin Masyarakat menggunakan Angkutan;
 - 1) Temu wicara pengelolaan angkutan umum guna peningkatan keselamatan penumpang
 - 2) Penataan Tempat-tempat Penberhentian Angkutan Umum;
 - 3) Penciptaan Pelayanan cepat, tepat, mudah, dan murah;
 - 4) Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan;
 - 5) Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan;
 - 6) Fasilitas perizinan di bidang perhubungan;
 - 7) Pemilihan dan pemberian penghargaan supir/juru mudi kendaraan;

- d. Program Peningkatan Keluikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, yang dilaksanakan melalui kegiatan; Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor.

17. Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan maka pemerintah senantiasa menyediakan informasi yang aktual melalui website resmi pemerintah pada www.sidenreng-rappangkab.go.id Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011 telah terealisasi mencapai 84,38 persen.

Alokasi anggaran yang diberikan sebesar Rp. 121.140.000,- dengan realisasi mencapai Rp. 102.218.000,-. Heherapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sidenreng Rappang sepanjang Tahun 2011, yakni :

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, yang dilaksanakan melalui kegiatan :
 - b. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informatika;
 - c. Pengadaan komputer;
 - d. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi;
 - e. Penyiaran komunikasi, informatika media massa daerah,
- b. Program Kerjasama Media Massa, yang dilaksanakan melalui kegiatan:
 - 1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah;

2. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat.

18. Pertanahan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam penyelenggaraan Urusan Pertanahan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011 terealisasi hanya mencapai 82,81 persen. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.177.374.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.459.320.020,-

- a. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah, yang dilaksanakan melalui kegiatan; Penataan, Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah.
- b. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan, yang dilaksanakan melalui kegiatan; fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan.
- c. Program pengembangan sistem informasi pertanahan, yang dilaksanakan melalui kegiatan; pengembangan sistem informasi pertanahan lainnya.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yakni 93,50 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.686.318.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.513.934.698,- Adapun pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja jumlah anggaran sebesar Rp. 2.797.580.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 2.584.551.209,- atau 92,39 persen.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Sidaureng Rappang Tahun 2011, yakni :

- a. Program peningkatan disiplin aparatur, yang dilaksanakan melalui kegiatan; pengadaan pakaian kerja lapangan.
- b. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, yang dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan formal.
- c. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, yang dilaksanakan melalui kegiatan :
 - 1) Perbangunan pos jaga/ronda;
 - 2) Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan;
 - 3) Pengendalian keamanan lingkungan;
 - 4) Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan lainnya.
- d. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal, yang dilaksanakan melalui kegiatan :
 - 1) Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan;
 - 2) Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi dengan TNI/POLRI dan kejaksaan;
 - 3) Pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal lainnya.

e. Program Pengembangan Wawasan Kehungsaan, yang dilaksanakan melalui kegiatan;

- 1) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama;
- 2) Pengembangan wawasan kebangsaan lainnya.

f. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Keterlibatan dan Keamanan, yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Pembentukan satuan keamanan di lingkungan masyarakat.
- 2) Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertibn dan keamanan lainnya.

20. Organisasi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian di Kabupaten Sidoareng Rappang pada Tahun 2011 dilaksanakan oleh :

n. Sekretariat Daerah Kabupaten (10 Bagian) :

- 1) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
- 2) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
- 3) Bagian Administrasi Kemasyarakatan;
- 4) Bagian Administrasi Pembangunan;
- 5) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam;
- 6) Bagian Administrasi Perekonomian dan Penanaman Modal;
- 7) Bagian Hukum;

- 8) Bagian Organisasi;
- 9) Bagian Umum dan Keuangan;
- 10) Bagian Hubungan Masyarakat. yang dibantu oleh 11 Kecamatan, yakni
: 1.Kecamatan Panca Lautang; 2.Kecamatan Tella LimpoE;
3.Kecamatan Watang Pulu; 4.Kecamatan Baranti; 5.Kecamatan Kulo;
6.Kecamatan Panca Rijang; 7.Kecamatan MaritengngaE; 8.Kecamatan
Watang Sidenreng; 9.Kecamatan Dua PituE; 10.Kecamatan Pitu
Riawa; 11.Kecamatan Pitu Riase;

b.Sekretariat DPRD.

c.Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

d.Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda).

e.Inspektorat Kabupaten.

f.Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan, dilaksanakan dengan kegiatan; Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan.
- 2) Program penataan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan dengan kegiatan; Penataan Pembentukan Pemberdayaan Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan
- 3) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, yang dilaksanakan melalui kegiatan; Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah.

- 4) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, yang dilaksanakan dengan kegiatan :
- a. Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik (LKPI, LPPD);
 - b. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi (IPPD).
- 5) Program Peningkatan Disiplin Aparatur (umum dan keuangan), dengan kegiatan; Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya;
- 6) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah (umum dan keuangan), dengan kegiatan:
- a) Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan;
 - b) Penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri;
 - c) koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya;
 - d) Penyediaan jasa pengamanan rujab.
- 7) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (umum dan keuangan), dengan kegiatan :
- a) Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
 - b) Penyusunan sistem informasi pengelola keuangan daerah;
- 8) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (umum dan keuangan), dengan kegiatan; Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;

- 9) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (hukum), yang dilaksanakan melalui kegiatan: Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- 10) Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah, yang dilaksanakan melalui kegiatan (hukum); Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan.
- 11) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat (hukum), yang dilaksanakan dengan kegiatan: Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat lainnya;
- 12) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan (hukum), dilaksanakan dengan kegiatan kegiatan:
 - a) Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan;
 - b) Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan Perundang-Undangan;
 - c) Legalisasi rancangan peraturan perundang-undangan;
 - d) Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - e) Publikasi peraturan perundang-undangan;
 - f) Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah;

- 13) Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda (kemasyarakatan), dengan kegiatan; perumusan kebijakan kewirausahaan pemuda.
- 14) Program peningkatan peran serta kepemudaan (kemasyarakatan), dengan kegiatan; fasilitasi pekan temu wicara organisasi.
- 15) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (kemasyarakatan), dilaksanakan dengan kegiatan; Rapat koordinasi unsur Muspida;
- 16) Program Pendidikan Politik Masyarakat (kemasyarakatan), dilaksanakan dengan kegiatan; Penyusunan bantuan purpol;
- 17) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan (kemasyarakatan), dengan kegiatan; fasilitasi kemitraan swasta dan UKM di pedesaan;
- 18) Program fasilitas SDM bidang informasi dan komunikasi (humas).
- 19) Program penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (humas).
- 20) Program pengadaan sarana dan prasarana (humas).
- 21) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, dengan kegiatan; pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah (ekonomi);

- 22) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/peternakan, dengan kegiatan; monitoring harga produksi komoditi pertanian (ekonomi);
- 23) Program perlindungan konsumen dan penguatan perdagangan, dengan kegiatan; peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa (kontrol pengawasan pupuk dan pestisida) (ekonomi);
- 24) Program pengkajian dan penelitian informasi dan komunikasi, dengan kegiatan; pengkajian dan penelitian informasi dan komunikasi lainnya (pembangunan);
- 25) Program pengelolaan keseragaman budaya, dengan kegiatan; monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan keanekaragaman budaya (pembangunan);
- 26) Program perencanaan, pengawasan, pengujian dan pengendalian mutu (pembangunan), dengan kegiatan :
- a) Pemilihan jasa konstruksi;
 - b) Operasional procurement anchor unit;
 - c) Unit layanan pengadaan barang dan jasa;
 - d) Pengendalian administrasi dan monitoring.
- 27) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, dengan kegiatan; optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (pembangunan);
- 28) Program penataan peraturan perundang-undangan, dengan kegiatan; fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan (pembangunan);

- 29) Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan, dengan kegiatan: monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C (sda);
- 30) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan kegiatan: monitoring, evaluasi dan pelaporan (sdu);
- 31) Program Peningkatan produksi pertanian dan perkebunan (sda), dengan kegiatan:
 - a) Peningkatan produksi pertanian/perkebunan lainnya.
 - b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 32) Program Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah (sda), dengan kegiatan:
 - a) Musyawarah Tudang Sipulung Terpadu tingkat kecamatan dan kabupaten Tahun 2011.
 - b) Monitoring dan evaluasi Musyawarah Tudang Sipulung MT. Gadu.
- 33) Program peningkatan produksi hasil peternakan, dengan kegiatan: monitoring evaluasi dan pelaporan (sda);
- 34) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, dengan kegiatan: pembinaan organisasi perempuan (kesra);
- 35) Program Pendidikan Luar Biasa, dilaksanakan dengan kegiatan: Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan (kesra).

- 36) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, dengan kegiatan; pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial lainnya (kesra).
- 37) Program peningkatan kapasitas disiplin aparatur, dengan kegiatan; pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
- 38) Program peningkatan sumber daya aparatur, dengan kegiatan; bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
mm. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, dengan kegiatan :
- a) Pembahasan rancangan peraturan daerah;
 - b) Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemda;
 - c) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan;
 - d) Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah;
 - e) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.
- 39) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, dengan kegiatan; penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik. O
- 40) Program penataan peraturan perundang-undangan, dengan kegiatan :
- a) Penyusunan renja rancangan peraturan perundang-undangan;
 - b) Penataan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 41) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan melaksanakan kebijakan BKD, yang dilaksanakan dengan kegiatan :
- a) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;
 - b) Belanja modal pengadaan printer;

- e) Belanja modal pengadaan barometer;
 - d) Inventarisasi temuan pengawasan;
 - e) Evaluasi berkala temuan pengawasan.
- 42) Program penanggulangan bencana dan tanggap darurat, yang dilaksanakan dengan kegiatan :
- a) Sosialisasi yang menyangkut cepat tanggap darurat dan kejadian luar biasa;
 - b) Pelatihan yang menyangkut penanggulangan bencana dan tanggap darurat; Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kedaruratan dan logistik.
- 43) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, dilaksanakan dengan kegiatan :
- a) Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana;
 - b) Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman bencana alam;
 - c) Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara;
 - d) Sosialisasi masalah pencegahan dan penanggulangan bencana alam.
- 44) Program pengelolaan keseragaman budaya, yang dilaksanakan melalui kegiatan; pendidikan dan pelatihan formal.
- 45) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, yang dilaksanakan melalui kegiatan :

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Penyusunan laporan Keuangan Semesteran; Penyusunan pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran; Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun.

46) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dilaksanakan melalui kegiatan : Penyusunan analisa standar belanja; Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2012; Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD2012; Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2011; Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 2011; Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2010; Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2010; Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah; Peningkatan manajemen aset/barang daerah; Peningkatan manajemen investasi daerah; Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah; Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah lainnya.

47) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan melalui kegiatan: Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota; Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD

e. Program Pengembangan Wawasan Kehungsaan, yang dilaksanakan melalui kegiatan;

- 1) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama;
- 2) Pengembangan wawasan kebangsaan lainnya.

f. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Keterlibatan dan Keamanan, yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Pembentukan satuan keamanan di lingkungan masyarakat.
- 2) Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertibn dan keamanan lainnya.

20. Organisasi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011 dilaksanakan oleh :

n. Sekretariat Daerah Kabupaten (10 Bagian) :

- 1) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
- 2) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
- 3) Bagian Administrasi Kemasyarakatan;
- 4) Bagian Administrasi Pembangunan;
- 5) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam;
- 6) Bagian Administrasi Perencanaan dan Penanaman Modal;
- 7) Bagian Hukum;

- 8) Bagian Organisasi;
- 9) Bagian Umum dan Keuangan;
- 10) Bagian Hubungan Masyarakat. yang dibantu oleh 11 Kecamatan, yakni
: 1.Kecamatan Panca Lautang; 2.Kecamatan Tella LimpoE;
3.Kecamatan Watang Pulu; 4.Kecamatan Baranti; 5.Kecamatan Kulo;
6.Kecamatan Panca Rijang; 7.Kecamatan MaritengngaE; 8.Kecamatan
Watang Sidenreng; 9.Kecamatan Dua PituE; 10.Kecamatan Pitu
Riawa; 11.Kecamatan Pitu Riase;

b.Sekretariat DPRD.

c.Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

d.Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda).

e.Inspektorat Kabupaten.

f.Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan, dilaksanakan dengan kegiatan; Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan.
- 2) Program penataan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan dengan kegiatan; Penataan Pembentukan Pemberdayaan Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan
- 3) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, yang dilaksanakan melalui kegiatan; Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah.

- 4) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, yang dilaksanakan dengan kegiatan :
- a. Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik (LKPI, LPPD);
 - b. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi (IPPD).
- 5) Program Peningkatan Disiplin Aparatur (umum dan keuangan), dengan kegiatan; Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya;
- 6) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah (umum dan keuangan), dengan kegiatan:
- a) Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan;
 - b) Penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri;
 - c) koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya;
 - d) Penyediaan jasa pengamanan rujab.
- 7) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (umum dan keuangan), dengan kegiatan :
- a) Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
 - b) Penyusunan sistem informasi pengelola keuangan daerah;
- 8) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (umum dan keuangan), dengan kegiatan; Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;

- 9) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (hukum), yang dilaksanakan melalui kegiatan: Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- 10) Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah, yang dilaksanakan melalui kegiatan (hukum); Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan.
- 11) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat (hukum), yang dilaksanakan dengan kegiatan: Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat lainnya;
- 12) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan (hukum), dilaksanakan dengan kegiatan kegiatan:
 - a) Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan;
 - b) Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan Perundang-Undangan;
 - c) Legalisasi rancangan peraturan perundang-undangan;
 - d) Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - e) Publikasi peraturan perundang-undangan;
 - f) Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah;

- 13) Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda (kemasyarakatan), dengan kegiatan; perumusan kebijakan kewirausahaan pemuda.
- 14) Program peningkatan peran serta kepemudaan (kemasyarakatan), dengan kegiatan; fasilitasi pekan temu wicara organisasi.
- 15) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (kemasyarakatan), dilaksanakan dengan kegiatan; Rapat koordinasi unsur Muspida;
- 16) Program Pendidikan Politik Masyarakat (kemasyarakatan), dilaksanakan dengan kegiatan; Penyusunan bantuan purpol;
- 17) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan (kemasyarakatan), dengan kegiatan; fasilitasi kemitraan swasta dan UKM di pedesaan;
- 18) Program fasilitas SDM bidang informasi dan komunikasi (humas).
- 19) Program penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (humas).
- 20) Program pengadaan sarana dan prasarana (humas).
- 21) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, dengan kegiatan; pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah (ekonomi);

- 22) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/peternakan, dengan kegiatan; monitoring harga produksi komoditi pertanian (ekonomi);
- 23) Program perlindungan konsumen dan penguatan perdagangan, dengan kegiatan; peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa (kontrol pengawasan pupuk dan pestisida) (ekonomi);
- 24) Program pengkajian dan penelitian informasi dan komunikasi, dengan kegiatan; pengkajian dan penelitian informasi dan komunikasi lainnya (pembangunan);
- 25) Program pengelolaan keseragaman budaya, dengan kegiatan; monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan keanekaragaman budaya (pembangunan);
- 26) Program perencanaan, pengawasan, pengujian dan pengendalian mutu (pembangunan), dengan kegiatan :
- a) Pemilihan jasa konstruksi;
 - b) Operasional procurement anchor unit;
 - c) Unit layanan pengadaan barang dan jasa;
 - d) Pengendalian administrasi dan monitoring.
- 27) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, dengan kegiatan; optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (pembangunan);
- 28) Program penataan peraturan perundang-undangan, dengan kegiatan; fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan (pembangunan);

- 29) Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan, dengan kegiatan: monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C (sda);
- 30) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan kegiatan: monitoring, evaluasi dan pelaporan (sdu);
- 31) Program Peningkatan produksi pertanian dan perkebunan (sda), dengan kegiatan:
- a) Peningkatan produksi pertanian/perkebunan lainnya.
 - b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 32) Program Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah (sda), dengan kegiatan:
- a) Musyawarah Tudang Sipulung Terpadu tingkat kecamatan dan kabupaten Tahun 2011.
 - b) Monitoring dan evaluasi Musyawarah Tudang Sipulung MT. Gadu.
- 33) Program peningkatan produksi hasil peternakan, dengan kegiatan: monitoring evaluasi dan pelaporan (sda);
- 34) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, dengan kegiatan: pembinaan organisasi perempuan (kesra);
- 35) Program Pendidikan Luar Biasa, dilaksanakan dengan kegiatan: Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan (kesra).

- 36) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, dengan kegiatan; pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial lainnya (kesra).
- 37) Program peningkatan kapasitas disiplin aparatur, dengan kegiatan; pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
- 38) Program peningkatan sumber daya aparatur, dengan kegiatan; bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
mm. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, dengan kegiatan :
- a) Pembahasan rancangan peraturan daerah;
 - b) Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemda;
 - c) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan;
 - d) Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah;
 - e) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.
- 39) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, dengan kegiatan; penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik. O
- 40) Program penataan peraturan perundang-undangan, dengan kegiatan :
- a) Penyusunan renja rancangan peraturan perundang-undangan;
 - b) Penataan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 41) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan melaksanakan kebijakan BKD, yang dilaksanakan dengan kegiatan :
- a) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;
 - b) Belanja modal pengadaan printer;

- e) Belanja modal pengadaan barometer;
 - d) Inventarisasi temuan pengawasan;
 - e) Evaluasi berkala temuan pengawasan.
- 42) Program penanggulangan bencana dan tanggap darurat, yang dilaksanakan dengan kegiatan :
- a) Sosialisasi yang menyangkut cepat tanggap darurat dan kejadian luar biasa;
 - b) Pelatihan yang menyangkut penanggulangan bencana dan tanggap darurat; Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kedaruratan dan logistik.
- 43) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, dilaksanakan dengan kegiatan :
- a) Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana;
 - b) Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman bencana alam;
 - c) Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara;
 - d) Sosialisasi masalah pencegahan dan penanggulangan bencana alam.
- 44) Program pengelolaan keseragaman budaya, yang dilaksanakan melalui kegiatan; pendidikan dan pelatihan formal.
- 45) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, yang dilaksanakan melalui kegiatan :

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Penyusunan laporan Keuangan Semesteran; Penyusunan pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran; Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun.

46) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dilaksanakan melalui kegiatan : Penyusunan analisa standar belanja; Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2012; Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD2012; Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2011; Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 2011; Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2010; Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2010; Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah; Peningkatan manajemen asset/barang daerah; Peningkatan manajemen investasi daerah; Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah; Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah lainnya.

47) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan melalui kegiatan: Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota; Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD

Kabupaten/Kota; Evaluasi dan penyusunan laporan DAK dan Dana Percepatan; Evaluasi dan penyusunan laporan gaji; Penyusunan data rekonsiliasi; Review Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD; Review Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban APBD; Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota.

48) Program peningkatan sistem pengowusan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, yang dilaksanakan melalui kegiatan : Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala; Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH; Tindak lanjut hasil temuan pengawasan; Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif; Pengendalian pelaksanaan bantuan dan bugi hasil keuangan daerah; Pengendalian pembiayaan daerah.

49) Program penentuan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan melalui kegiatan; penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan;

50) Program pembinaan dan pengembangan aparatur, yang dilaksanakan melalui kegiatan; monitoring, evaluasi dan pelaporan.

51) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, yang dilaksanakan melalui kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD; Penyusunan laporan Keuangan Semesteran; Penyusunan pelaporan

Prognosis Realisasi Anggaran; Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun.

- 52) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dilaksanakan melalui kegiatan : Peningkatan manajemen asset/barang daerah; Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- 53) Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur, yang dilaksanakan melalui kegiatan; peningkatan kapasitas sumber daya aparatur lainnya.
- 54) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, yang dilaksanakan melalui kegiatan : Deregulasi dan Deshierarkisasi kelembagaan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang; Deregulasi dan Deshierarkisasi ketatalaksanaan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang; Indeks kepuasan masyarakat. ddd. Program pembinaan dan pengembangan aparatur, dengan kegiatan : Penyusunan instrumen analisis jabatan (syarat jabatan); Asistensi tamhahan penghasilan pemkah; Pembinaan dan pengembangan aparatur lainnya.
- 55) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, diluksunukan dengan kegiatan : Peningkatan Disiplin Aparatur lainnya. Proses izin cerai/permusuluhun keluarga. Orientasi calon PNS.

- 56) Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS, dilaksanakan dengan kegiatan: Proses pensiun janda/duda dan yatim serta pensiun atas permintaan sendiri; dan Pelepasan/pemberian cenderungata PNS yang pensiun, pensiun janda/duda dan atas permintaan sendiri;
- 57) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dilaksanakan dengan kegiatan: Pendidikan dan pelatihan formal. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah.
- 58) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, melalui kegiatan: Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator realisasi kinerja SKPD.
- 59) Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah : Penyusunan Rencana Pembinaan Karier; Seleksi penerimaan calon PNS; Penempatan PNS; Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah; Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi; Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS; Pembinaan Disiplin Pegawai Seleksi penerimaan SIKS dan IPDN.
- 60) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penerangan Sementara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Kecamatan merupakan fasilitasi semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan, Dinas dan Kantor yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang. Program dan kegiatan tersebut, yaitu:

- 61) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan kegiatan: Pembinaan Organisasi Kepemudaan;
- 62) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan kegiatan: Pemberian Stimulan Pembangunan Desa;
- 63) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan: Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah;
- 64) Program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Hasil Daerah, dengan kegiatan: Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan retribusi Daerah;
- 65) Program Pengelolaan Keragaman budaya, dengan kegiatan: pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah;
- 66) Program Peningkatan Peranserta Gender dalam Pembangunan, yang dilaksanakan melalui kegiatan: Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011, yakni hanya

mencapai 83,28 persen. Alokasi anggaran sebesar Rp. 567.781.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 472.832.730,-. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011, yakni mencapai 77,79 persen (fisik), dan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.035.519.350,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.253.342.121. Sementara Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan di Kecamatan, yakni mencapai 70,53 persen (fisik), dan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.539.703.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.317.894.847,-. Adapun Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan penyelenggaraan Administrasi Keuangan Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011, mencapai 61,01 persen (fisik). Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.896.989.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.461.801.997,- Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011 mencapai 100 persen secara fisik dan 71,86 persen secara keuangan atau sebesar Rp. 409.180.500,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 569.415.000,- Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam penyelenggaraan Urusan Kepegawaian di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011, mencapai 81,26 persen dan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.678.060.000,- dengan realisasi anggaran

sebesar Rp. 2.176.335.130,- Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam penyelenggaraan Urusan Persandian di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011, mencapai 92,45 persen dan alokasi anggaran sebesar Rp. 771.100.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 712.803.593,- Adapun dalam pelaksanaan pemerintahan telah diterapkan dan dikembangkan berbagai sistem informasi manajemen dalam rangka mendukung terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih. Di antaranya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD), Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (RIPLD) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pelaksanaan PKK dan Posyandu sangat berperan penting dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat demi terciptanya generasi yang mandiri, sehat dan berprestasi, olehnya itu pelaksanaan kegiatan-kegiatan PKK terus menjadi penggerak kemajuan di 106 desa/kelurahan diseluruh Kabupaten Sidenreng Rappang. Sementara Posyandu yang ada sebanyak 309 tersebar diseluruh wilayah Kabupaten. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011 mencapai 48,25 persen, dari alokasi anggaran sebesar Rp. 3.938.041.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.900.253.807.

Berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011, yaitu :

- 67) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, yang dilaksanakan melalui kegiatan: Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan lainnya; Sosialisasi peraturan perundang-undangan; Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa; Monitoring Evaluasi dan Pelaporan; Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa lainnya;
- 68) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, yang dilaksanakan melalui kegiatan: Pelatihan aparat pemerintah desa dalam bidang keuangan desa; Pembinaan dan Evaluasi Pengisian Data Profil Desa/Kelurahan.

22. Kesejahteraan Sosial

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011 mencapai 87,26 persen dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.360.478.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.187.190.611,-. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Urusan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011, yaitu :

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, yang

dilaksanakan melalui kegiatan :Peningkatan Kemampuan (capacity building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, PMKS lainnya; Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin.

- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan :Koordinasi Penunasan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan;Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut Tanggap Darurat dan Kejadian Luar Biasa; Penanganan Tempat-tempat Rintisan Kemerdekaan dan Nilai-nilai Kepahlawanan.
- c. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma, dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks-Trauma.
- d. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks-Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya), dengan kegiatan; Pemantauan Kemajuan Perubahan Sikap Mental Eks Penyandang Penyakit Sosial.
- e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan : Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha;
- f. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial lainnya.

23.Kelaudayaan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan penyelenggaraan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011 alokasi anggaran sebesar Rp. 261.189.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 167.477.100,-

atau 64,12 persen. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang senantiasa mendukung setiap kegiatan pelestarian budaya dan pengembangan kesenian daerah, hal ini ditondoi dengan dibangunnya 18 buah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya.

24. Statistik

Informasi berupa data tabulasi pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam kurun waktu satu tahun disusun menjadi Sidenreng Rappang dalam Angka 2011 dan PDRB Sidenreng Rappang 2011 sebagai media yang efektif dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Urusan Statistik di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011, yakni Program Pengembangan Data Informasi, yang dilaksanakan melalui kegiatan: a. Operasional website; b. Penyusunan dokumen KUA dan PPAS; c. Pengembangan data dan informasi lainnya. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam penyelenggaraan Urusan Statistik di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011 hanya mencapai 37,43 persen, dan alokasi anggaran sebesar Rp. 123.044.550,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.058.550,-.

25. Kearsipan

Program serta kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Urusan Kearsipan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011, sebagai berikut: Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, yang dilaksanakan

dengan kegiatan : Pengumpulan data; Pengklasifikasi data; Pengadaan sarana penyimpanan.

26.Perpustakaan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Urusan Perpustakaan pada Tahun 2011 di Kabupaten Sidenreng Rappang, diaktualisasikan melalui kegiatan-kegiatan berikut :a.Pemasyarakatan Minat Baca dan Budaya Baca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar; b.Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan; c.Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah. Jumlah Koleksi Judul Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah sebanyak 1.216 buku, dengan jumlah Koleksi Buku sebanyak 6.220 buku adapun jumlah kunjungan sebanyak 301 orang. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan penyelenggaraan Urusan Perpustakaan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011, banyak mencapai 67,13 persen dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 191.584.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 128.111.000,-

4.2.1.2. Penyelenggaraan Urusan Pilihan

1. Peternakan dan Perikanan

Program dan kegiatan telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan Urusan Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2011 : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, yang dilaksanakan

2. Partisipasi dalam bentuk menyerap informasi masyarakat

Penyerapan informasi masyarakat adalah salah satu fungsi pokok lembaga swadaya masyarakat dalam rangka partisipasi pembangunan. Aspirasi dimaksud diserap dalam berbagai media dan kegiatan. Dari hasil pengolahan data penelitian ditemukan bahwa penyerapan aspirasi terbesar adalah melalui pengaduan masyarakat. Pengaduan itu dapat berbentuk tertulis maupun lisan.

Berikut ini ditampilkan data penyerapan informasi masyarakat yang dilakukan oleh LSM di Kabupaten Sidrap.

Tabel 7
Jumlah Aktivitas Penyerapan Informasi Masyarakat
LSM Kabupaten Sidrap Tahun 2010-2011

No.	Media Penyerapan Informasi	Frekuensi
1.	Surat resmi	7
2.	Surat lisan	55
3.	Informasi lisan	22
4.	Informasi media massa	212
Jumlah		296

Sumber : Olah Data Penelitian 2012.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa informasi terbesar datang dari media massa. Hal ini menunjukkan bahwa media massa memiliki kemampuan menyerap aspirasi masyarakat lebih baik dari lembaga swadaya masyarakat. Hanya saja, besaran jumlah aspirasi masyarakat dalam media massa sama sekali tidak menjelaskan tentang efektivitas informasi itu dalam pengawasan pembangunan. Media massa lebih tertarik memaparkan isu dan berita yang bersifat sesaat dan setelahnya menghilang.

Topik hangat yang mencuat selama beberapa bulan terakhir adalah mengenai penyelenggaraan kegiatan pada dinas Pekerjaan Umum dalam hal pengelolaan air bersih dengan besaran anggaran Rp.75.215.757.000. Demikian pula proyek yang dilaksanakan untuk penguduan perumahan yang menyerap anggaran sebesar Rp. 77.209.188.000. Kedua urusan wajib ini dipandang mengalami deviasi dalam hasil. Deviasi yang berdampak pada kebocoran dana daerah. Ketidaktelitian bukti media massa menyebabkan upaya pengawasan dimaksud luntar begitu saja.

Sebaliknya, lembaga swadaya masyarakat justru mampu melakukan optimalisasi pengawasan melalui 7 buah surat resmi yang diterima. Fokus laporan masyarakat diarahkan pada kegiatan bidang lingkungan hidup yang dilaporkan salah sasaran, kegiatan bidang penanaman modal yang diduga mengalami kebocoran anggaran hingga 32%, dan kegiatan bidang ketahanan pangan yang diduga mengalami kebocoran hingga 7% anggaran.

3. Partisipasi dalam bentuk perencanaan pembangunan

Dari hasil pengamatan, partisipasi lembaga swadaya masyarakat dalam perencanaan pembangunan hampir-hampir tidak ada sama sekali. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah. Keterlibatan lembaga swadaya masyarakat dalam hal perencanaan hanya sebatas penggelembungan isu dan komentar umum di media massa.

4. Partisipasi dalam bentuk pelaksanaan operasional pembangunan

Partisipasi lembaga swadaya masyarakat dalam operasional pembangunan sama sekali nihil. Demikian pula halnya dengan partisipasi dalam hal pelestarian hasil-hasil pembangunan. Ada wacana dimana lembaga swadaya masyarakat dilibatkan dalam operasional pembangunan. Hanya saja wacana itu tidak memiliki dasar aturan yang pasti. Pelaksanaan pembangunan daerah mengacu pada dokumen rencana pembangunan tahunan daerah yang bersumber dari rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Meskipun dalam visi dan misi disebutkan peran lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan, namun rincian teknis dalam bentuk operasional kegiatan sama sekali tidak ada. Lebih daripada itu, pembangunan yang dilaksanakan oleh daerah kabupaten Sidrap dengan biaya APBD tidak mungkin untuk dilakukan oleh lembaga lain diluar pemerintah.

Sejak tahun 2010 telah muncul beberapa lembaga swadaya masyarakat yang ikut mengerjakan proyek pemerintah dalam skala terbatas. Proyek yang dikerjakan antara lain proyek pelatihan masyarakat pertanian, pelatihan UKM, dan pemetaan ruang wilayah desa. Meski demikian, keterlibatan itu sebatas pada keikutsertaan lembaga swadaya masyarakat mengerjakan kegiatan pemerintah. Belum ada kegiatan yang dikerjakan operasionalisasinya secara penuh kepada lembaga swadaya masyarakat.

Aktivitas pengerjaan kegiatan semacam ini memberikan keuntungan pragmatis berupa tambahan finansial. Namun dari sisi peran, pengerjaan kegiatan melemahkan peran kontrol LSM kepada pemerintah.

5. Partisipasi dalam bentuk menilai pembangunan

Partisipasi dalam bentuk penilaian pembangunan adalah aktivitas utama dimana peran lembaga swadaya masyarakat dapat diidentifikasi secara jelas. Penilaian pembangunan disini adalah upaya lembaga swadaya masyarakat memajukan fungsi kontrol selaku bagian dari subkultur sosial.

Dari data 2010-2011 terlihat bahwa bentuk penilaian pembangunan yang paling utama adalah melalui tanggapan LSM di media massa. Sementara bentuk paling rendah dari penilaian pembangunan adalah surat resmi LSM kepada pemerintah. Berikut ditampilkan data lengkap penilaian pembangunan.

Tabel 8
Jumlah Aktivitas Penilaian Pembangunan oleh
LSM Kabupaten Sidrap Tahun 2010-2011

No.	Jenis Media Penilaian	Frekuensi
1.	Tanggapan LSM di Media Massa	49
2.	Surat resmi LSM kepada Pemerintah	1
3.	Forum bedah pembangunan daerah	16
4.	Demonstrasi Massa	8
	Jumlah	74

Sumber : Olah Data Penelitian 2012.

Khusus mengenai demonstrasi massa, aktivitas ditaksud menyusut seiring dengan meningkatnya aktivitas forum bedah pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Sidrap menyelenggarakan forum bedah pembangunan setiap bulan satu kali dalam rangka menarik aspirasi dan kritik LSM atas pembangunan. Wadah forum bedah pembangunan daerah makin diminati karena tindak lanjut pemerintah daerah atas masukan LSM sangat cepat dan tepat.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat

Peran lembaga swadaya masyarakat secara umum adalah memninkan fungsi kontrol sosial dalam pelaksanaan tugas pemerintah. Dalam konstruksi ilmu pemerintahan, Ndraha menyebut peran ini sebagai konsumerisme. Konsumerisme adalah model kontrol sosial dimana pihak yang diperintah memberikan respons atas apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam bentuk paling umum, konsumerisme adalah kontrol sosial.

Bupati Sidrap mengungkapkan peran kontrol sosial sebagai:

...suatu cara dimana pemerintah memberikan dirinya untuk dikoreksi secara terbuka oleh masyarakat. Baik masyarakat agama, masyarakat politik, masyarakat adat, dan lembaga sosial lainnya. Kontrol membuktikan pada pemerintah bahwa pekerjaan yang dilakukannya bukan saja diawasi oleh masyarakat, tetapi juga dipandang penting oleh masyarakat¹.

Apa yang diungkapkan Bupati Sidrap nampaknya sejalan dengan konsep Sukarna (1990:1) tentang kontrol sosial. Menurutnya, kontrol sosial adalah paduan untuk konsep-konsep pemerintahan demokrasi dimana perlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah dan keputusan publik diniscayakan. Bahkan lebih lanjut, disebutkan, bahwa istilah kontrol sosial memiliki relevansi dengan apa yang disebut "*open management*" dalam konteks administrasi publik.

Sukarna menyebut empat unsur kontrol sosial meliputi :

- 1) *Social Participation* (keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan)
- 2) *Social Responsibility* (pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat)

¹ Hasil wawancara studi Juli 2012.

3) *Social Support* (dukungan rakyat terhadap pemerintah)

4) *Social Control* (kontrol masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah)

Terhadap keempat unsur kontrol sosial ini, Sukarna tidak membaginya secara parsial dalam kelompok *kontrol sosial formal* dan kelompok *kontrol sosial informal*. Nampaknya Sukarna memandang keempat unsur ini sebagai media, melalui mana kontrol sosial diselenggarakan. Kesimpulan semacam ini dimungkinkan oleh pendefinisian Sukarna (1990:2) sendiri tentang kontrol sosial yang disebutnya sebagai :

sikap dan tingkah laku masyarakat secara perorangan atau berkelompok yang ditujukan terhadap perorangan atau berkelompok dengan maksud untuk memperbaiki keadaan dengan bentuk lisan atau tulisan yang disalurkan secara langsung terhadap aparat pemerintah atau lembaga-lembaga masyarakat yang terkait sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Apa yang disebut oleh Sukarna tidak selalu dapat ditemui dalam praktek pelaksanaan fungsi kontrol LSM. Wakil Bupati Sidrap memberikan kritik terhadap peran minimal yang dimainkan oleh LSM dalam pelaksanaan fungsi kontrol dengan menyebutkan bahwa :

...”Tidak mudah untuk mendapatkan LSM yang benar-benar memberikan kontrol sosial pada pemerintah. Terkadang kontrol ini dilakukan dengan tekanan-tekanan dan paksaan. Yang kita inginkan tentu saja bahwa LSM memberikan kontribusi secara seimbang. Mengkritik tentu boleh. Tapi hasil-hasil pembangunan juga wajib untuk disebutkan. Yang sering muncul justru LSM menafikan peran pemerintah daerah. Seakan-akan pemerintah tidak melakukan fungsi apapun”.

¹ Hasil Wawancara Juli 2012.

Apabila pendapat Wakil Bupati benar, maka tentu saja peran dan fungsi kontrol LSM di Kabupaten Sidrap belum dapat dimasukkan dalam substansi penguatan peran subkultur sosial. Jika mengacu pada pernyataan Wakil Bupati tentang sikap lebih suka menekan daripada merumuskan kebersamaan, maka ada kesan bahwa lembaga swadaya masyarakat menekankan peran kontrol politik daripada kontrol sosial. Ndraba (2005:37) melawankan kontrol sosial dengan kontrol politik. Kontrol politik, tulis Ndraba, merupakan kontrol yang menggunakan pemilahan umum sebagai mekanismenya. Sementara kontrol sosial, yang ditutamakan dalam kybernetologi, terjadi pada saat transaksi antara pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah terjadi. Pelaku dalam kontrol sosial adalah pelanggan, pengguna, korban dan mangsa.

Tetapi Ketua LSM Kompleks menolak pendapat Wakil Bupati:

...LSM berbicara tentu saja atas nama kepentingan rakyat. LSM berjuang untuk rakyat dan bersama-sama dengan rakyat. Adapun LSM lebih banyak menyuarakan kekurangan pemerintah adalah akibat dari macetnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah seringkali meminta masyarakat untuk memahami arah kebijakan pemerintah. Sebaliknya, pemerintah tidak pernah bertanya, mana kebutuhan riil masyarakat¹.

Apa yang diungkapkan oleh Ketua LSM Kompleks mengarah pada kesimpulan umum Sukarna tentang kontrol sosial. Bagi Sukarna, terdapat dua kemungkinan maksud yang tersembunyi dibelakang kontrol sosial. *Pertama*, dapat saja dikatakan bahwa kontrol dapat bersifat formal dan kontrol informal. Kontrol sosial formal dalam definisi Sukarna adalah kontrol yang ditujukan kepada

¹ Hasil Wawancara Juli 2012.

pemerintah, sedangkan kontrol sosial informal adalah kontrol yang ditujukan kepada lembaga masyarakat. *Kedua*, dengan cetak tebal perhatian pada muara dari definisi Sukarna, ia nampaknya melihat kontrol sosial semata-mata adalah kontrol formal yang sah sepanjang itu berlangsung sesuai dengan aturan.

Dalam pandangan peneliti, kontrol sosial sebagai fungsi utama lembaga swadaya masyarakat memang harus berjalan dalam dua segi yang disebut Sukarna. Ada kontrol-kontrol formal dan ada kontrol-kontrol informal. Kontrol formal ditujukan langsung kepada pemerintah sementara kontrol non-formal, tertetak pada saling kritik diantara sesama lembaga swadaya masyarakat.

4.2.1.1. Visi dan Misi Daerah yang Memberi Ruang Partisipasi

Peran lembaga swadaya masyarakat, sekecil apapun itu, hanya dimungkinkan oleh dibukanya kran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dari pengalasan penulis selama aktif dalam lingkungan lembaga swadaya masyarakat, tiap kepala daerah memiliki pandangan yang herbada-beda terhadap keberadaan lembaga swadaya masyarakat. Pada masa sepuluh tahun silam, perlakuan kepala daerah terhadap LSM jauh berbeda dengan apa yang dapat ditemui saat ini. Ketika saat ini pemerintah membuka diri, maka peran lembaga swadaya masyarakat dapat muncul dan teramati.

Nampak bagi penulis bahwa terjadi pola pergeseran paradigma pembangunan dan pemerintahan. Ada gejala dimana fungsi dan pekerjaan tidak semuanya dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi justru dibuat sedemikian rupa sehingga ada

sharing dan saling tukar informasi. Kewenangan – sebagaimana disebutkan dalam peraturan pemerintah tentang pembagian kewenangan - memberikan batas pada masing-masing unit pemerintahan untuk melaksanakan tugasnya. Ndraha (2005:1992) menegaskan bahwa :

Studi tentang fenomena pemerintahan (*governance*) dapat dilakukan melalui dua macam cara pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan kekuasaan (*negara*) yang mengutamakan kepentingan negara di atas segala-galanya. Dalam hubungan ini, Ilmu pemerintahan diletakkan di salah satu pojok ilmu-ilmu politik. Yang kedua, pendekatan manusia dan lingkungannya.

Pendekatan lingkungan nampaknya sangat menonjol di Kabupaten Sidrap. Pendekatan itu dirumuskan dalam kalimat yang singkat bermakna sebagaimana disebutkan oleh Bupati Sidrap :

...“bukannya karena pemerintah bisa melakukan segala hal maka ia disebut pemerintah. Sejujurnya, tidak ada pemerintahan semacam itu. Pemerintahan modern adalah pemerintah yang paling sedikit memerintah. Karena itu pemerintah harus membangun sebuah lingkungan herpermerintahan yang baik. Apa itu lingkungan pemerintahan? Lingkungan pemerintahan adalah lingkungan yang didalamnya berkecambah pemerintah, swasta, dan masyarakat yang dapat saling bersinergi...”⁴

Ucapan Bupati Sidenreng Rappung sejalan dengan rumusan visi dan misi daerah kurun waktu 2009-2013 sebagaimana termuat dalam RPJMD yaitu :

“Mewujudkan Kabupaten Sidenreng Rappung sebagai Pusat Agribisnis Modern dan Lima Terbaik di Sulawesi Selatan dalam Pembangunan Manusia”. Apa yang digariskan dalam pembangunan manusia adalah penciptaan lingkungan strategis bagi tumbuh dan berkembangnya bakat dan minat serta kemampuan manusia secara utuh.

⁴ Hasil Wawancara Juli 2012.

Lingkungan untuk menumbuhkan semua keinginan itu adalah lingkungan yang kondusif dan demokratis. Suatu kondisi yang hanya dapat dicapai melalui penguatan misi pembangunan daerah yang mencakup lima aspek masing-masing : (1) Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Agrobisnis-Agroindustri melalui upaya menciptakan iklim yang kondusif dalam pengembangan usaha agribisnis dan agroindustri; (2) memantapkan Peningkatan Kualitas Manusia; (3) Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana Daerah; (4) Memelihara iklim kondusif dalam kehidupan masyarakat yang didalamnya terdapat upaya fasilitasi jaringan dan kolaborasi organisasi lokal/daerah dan pengarus-utamaan kesetaraan dalam mewujudkan kesetaraan golongan, kesetaraan gender, keadilan sosial dan ekonomi dalam semua lini kehidupan masyarakat, dan memfasilitasi berfungsinya organisasi keagamaan, lembaga adat, organisasi wanita, lembaga swadaya masyarakat, Pemuda dan kemasyarakatan; (5) mengefektifkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Khusus pada misi ke-2 yaitu memantapkan Peningkatan Kualitas Manusia; dan misi ke-4 yaitu memelihara iklim kondusif dalam kehidupan masyarakat yang didalamnya terdapat upaya fasilitasi jaringan dan kolaborasi organisasi lokal/daerah dan pengarus-utamaan kesetaraan dalam mewujudkan kesetaraan golongan, kesetaraan gender, keadilan sosial dan ekonomi dalam semua lini kehidupan masyarakat, dan memfasilitasi berfungsinya organisasi keagamaan, lembaga adat, organisasi wanita, lembaga swadaya masyarakat, Pemuda dan kemasyarakatan, maka nampak jelas bahwa pemerintah ingin membangun kemitraan dengan lembaga

swadaya masyarakat. Disebutkannya lembaga swadaya masyarakat dalam misi pembangunan daerah adalah hal yang langka. Apa yang terbuka adalah bahwa pemerintah memang sudah sangat antusias menyambut ruang publik.

Ketua LSM LPEK (Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan) menyambut uluran Kepala Daerah dalam membuka diri dengan menyebutnya sebagai suatu :

..."harapan bagi masa depan daerah. Tidak semua pemerintah daerah mau membuka diri terhadap peran aktif masyarakat. Bahwa dalam rencana strategis (pembangunan daerah) peran lembaga swadaya masyarakat disebut secara eksplisit – sudah luar biasa. Sekarang tinggal generasi muda yang memberi jawaban konkret atas usulan dan maksud baik pemerintah".

Tentang mengapa pemerintah daerah membuka diri kepada masyarakat secara khusus Billah (dalam Prisma 8, Agustus 1996:40) mencatat penggunaan konsep kontrol sosial mengarah ke titik dimana :

konsep itu terutama dijumpai dalam analisa tentang tingkah laku menyimpang - yang merupakan satu segi dari teori Cap (*labelling theory*). Misalnya, secara paradoks dikatakan bahwa usaha untuk meningkatkan bentuk pukuatan kontrol sosial, seperti tindakan peningkatan pengawasan polisi atas kejahatan kriminal atau kelompok-kelompok sosial menyimpang (*deviant social group*), justru cenderung memperluas penyimpangan mereka.

Namun, peningkatan perhatian terhadap ketidakmampuan institusi resmi telah mendorong perluasan konsep kontrol sosial secara signifikan. Lewat peramuan konsep *compliance*, *coercion*, dan *commitment* yang dilakukan secara sistematis dan taat asas, individu anggota kelompok atau komunitas, telah didorong untuk mematuhi tradisi atau pola tingkah laku penting bagi berfungsinya kelompok

² Wawancara Juli 2012.

atau komunitas tersebut secara mulus. Karenanya, kontrol sosial, seperti diyakini Billah, merupakan tindakan intensional guna terciptanya ketertiban sosial (*social order*).

Kontrol sosial, dalam klasifikasi M.M. Billah (1996:41) bisa positif atau negatif, dan masing-masing kontrol sosial itu dapat bersifat formal dan juga dapat bersifat informal. Sampai disini, Billah nampaknya sepaham dengan konsep tentang bentuk-bentuk kontrol sosial. Tentang perbedaan sifat formal dan informal ini Billah mencatat :

Kontrol sosial formal meliputi sistem kewenangan (*system of authority*), dan hukum, paugeran (*rules*) dan peraturan yang menentukan ganjaran (sanksi positif yang terorganisasi seperti tanda lulus, uang, medali) atau hukuman (sanksi negatif yang terorganisasi seperti kematian, pemenjaraan, pelarangan) bagi pematuhun atau pelanggaran. Agama yang terorganisir juga memberikan satu sistem kontrol sosial yang formal dan informal. Kontrol sosial yang informal dapat terwujud dalam bentuk seperti pendapat umum (*public opinion*) dan *fashion*, dan didesak oleh sanksi-sanksi informal seperti sanjungan dan ejekan.

Apapun itu, fakta yang dapat penulis tampilkan adalah bahwa peran kontrol sosial dan konsumerisme yang ada sekarang di Sidrap, tidak dibangun di luar pemerintah. Sebaliknya, karena pemerintah memiliki itikad yang baik maka aktivitas lembaga swadaya masyarakat dimungkinkan untuk ditampung dalam konteks partisipasi.

4.2.1.2. Peran Dinamis LSM

Peran lembaga swadaya masyarakat saat ini mengalami metamorfosis. Peran itu meliputi suatu hirupunan tugas yang disebut tugas-tugas pemkorong partisipasi. Intinya adalah bahwa LSM menjadi semacam katalisator pembangunan yang diukur dari keterlibatan LSM dalam perencanaan dan pengawusan, bahkan terkadang pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Asisten Bidang Pembangunan Kabupaten Sikrap menyebutkan bahwa :

...”Peran katalisator pembangunan adalah peran terbaik yang dapat dilakukan oleh lembaga lainnya di luar pemerintah. Pada prinsipnya, sebagai katalisator maka lembaga-lembaga non pemerintah bertugas menampung aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi itu, dan mengontrol sampai sejauh mana aspirasi itu mendapatkan tempat dalam rencana kerja pemerintah. Katalisator juga bermakna jembatan informasi, melalui mana pekerjaan pemerintah dapat disosialisasikan⁹.

Dalam fungsi dan peran ini, lembaga swadaya masyarakat melakukan upaya untuk mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Upaya yang dilakukan dengan menghimpun kesadaran dan kekuatan masyarakat. Ini sejalan dengan pendapat Taliziduhu Ndraha (1987 : 5) menyatakan bahwa : “Pembangunan adalah usaha yang diselenggarakan secara sadar guna menciptakan perubahan dan pertumbuhan di segala bidang dalam rangka tujuan negara dan bangsa”. Demikian pula diterima dalam arti ini, suatu gerak pembangunan yang oleh Sondang. P. Siagian (1982 : 2-3) mendefinisikan pembangunan sebagai berikut : “ Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh

⁹ Data wawancara juli 2012.

suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*National Building*)”.

Bintoro Djokroamidjojo (1986 : 2) memberi pengertian yang lebih tajam pada pembangunan yaitu sebagai berikut : “...suatu rangkaian usaha dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa atau masyarakat bersamasama dengan negara atau pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan kemajuan bangsa. “

Tentang peran dinamis itu, Kepala Bagian Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap menilai :

“Pemerintah tetap merupakan motor utama dalam menggerakkan pembangunan. Peran lembaga non pemerintah terbatas pada fungsi mereka yang seluruhnya diulur oleh pemerintah. Fungsi itu meliputi peningkatan peran serta masyarakat dan kontrol yang efektif atas pembangunan. Tanpa pengaturan fungsi-fungsi dan peran oleh pemerintah, lembaga non pemerintah cenderung berjalan sendiri-sendiri”.

Apa yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Pembangunan sejalan dengan pendapat Ndraha tentang pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan pada tingkat lokal dan mengambil jalan berseberangan dengan pembangunan nasional. Apabila pendapat Ndraha di atas dapat dimodifikasi maka pembangunan daerah dapat diartikan sebagai “usaha yang diselenggarakan secara sadar guna menciptakan perubahan dan pertumbuhan di segala bidang dalam rangka tujuan daerah”.

Daerah sendiri memiliki kedudukan yang unik dalam tata pemerintahan Indonesia. Pengertian "otonom" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara bahasa adalah "berdiri sendiri" atau "dengan pemerintahan sendiri". Sedangkan "daerah" adalah suatu "wilayah" atau "lingkungan pemerintah". Secara istilah "otonomi daerah" adalah "wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri."

Pengertian lebih luas lagi adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.

Dalam kedudukan seperti itu, institusi pemerintah daerah merupakan pengarah bagi pelaksanaan pembangunan. Kepala Bappeda Kabupaten Sidrap menyatakan bahwa :

"Lembaga swadaya masyarakat adalah bagian dari pembangunan daerah, yang dinyatakan secara jelas dalam misi daerah Kabupaten Sidrap. Tugas lembaga ini adalah menampung aspirasi masyarakat. Pemerintah Daerah adalah unsur pokok dalam pembangunan. Dari pemerintah berasal sumber daya, sumber keuangan, dan juga penentuan alokasi potensi pembangunan. Pada intinya pemerintah yang mengarahkan pembangunan⁸."

Apa yang dikemukakan narasumber di atas sejalan dengan peta peran pemerintah daerah dalam undang-undang pemerintahan daerah. Dalam otonomi daerah, ada pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah yang diatur

⁸ Data hasil wawancara Juli 2012.

menurut UU No.32 tahun 2004. Pembagian wewenang itu meliputi tiga bagian besar. Pertama, kewenangan pemerintah pusat (Pasal 10 ayat 3) meliputi: (a) politik luar negeri; (b) pertahanan; (c) keamanan; (d) yustisi; (e) moneter dan fiskal serta (f) agama.

Kedua, kewenangan pemerintah provinsi (Pasal 13 ayat 1 UU. No. 32 Tahun 2004): yang meliputi (1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan; (2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; (3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; (4) Penyediaan sarana dan prasarana umum; (5) Penanganan bidang kesehatan; (6) Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; (7) Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; (8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; (9) Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota; (10) Pengendalian lingkungan hidup; (11) Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota; (12) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil; (13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan; (14) Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota; (15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota ; dan (16) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ketiga, kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Pasal 14 ayat 1, UU No. 32 Tahun 2004) meliputi (a) perencanaan dan pengendalian pembangunan; (b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; (c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; (d) penyediaan sarana dan prasarana

umum; (e) penanganan bidang kesehatan; (f) penyelenggaraan pendidikan; (g) penanggulangan masalah sosial; (h) pelayanan bidang ketenagakerjaan; (i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; (j) pengendalian lingkungan hidup; (k) pelayanan pertanahan.

Tetapi Ketua LSM KIPFA RI memiliki pendapat yang sedikit berbeda :

".....Peran Lembaga Swadaya Masyarakat adalah untuk menjaga agar pembangunan daerah kabupaten Sidrap tetap berada pada relnya. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten berasal dari uang rakyat. Karena itu rakyat juga memiliki hak kontrol dan hak suara. Benar bahwa semua peran lembaga-swadaya masyarakat diatur oleh pemerintah. Tetapi dalam konteks pemerintahan modern, tidak ada pemerintah yang tidak dikontrol oleh rakyatnya".

Apa yang dikemukakan di atas sejalan dengan pendapat Dadang Solihin (2005:14) mengemukakan bahwa pembangunan hanya dapat dilaksanakan melalui suatu perencanaan yang matang di level daerah. Definisi praktis Perencanaan Pembangunan Daerah adalah:

Suatu usaha yang sistematis dari pelbagai pelaku (aktor), baik umum (publik) atau pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya dengan cara: secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah (solusi), dan melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan.

4.2.2. Aspek-Aspek Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat

4.2.2.1. Keterlibatan Mental dan Emosi Pemerintah dan LSM

Dalam bentuknya yang paling dasar, partisipasi adalah ikatan mental dan emosi yang menyatukan pihak yang satu dengan pihak yang lain. Menurut Westra (1981 : 136), partisipasi adalah :

Penyertaan mental emosi seseorang dalam suatu situasi kelompok yang mendorong mereka untuk mengembangkan daya pikir dan perasuan mereka bagi tercapainya tujuan organisasi dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap organisasi tersebut.

Tentang penyertaan emosi dan mental antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Sidrap, Ketua Masyarakat Adat Sidrap memiliki :

Selalu ada ikatan antara pemerintah dan masyarakat, termasuk pemerintah dan LSM. Kita beruntung bahwa pimpinan daerah sangat memperhatikan daerahnya dan pimpinan daerah ingin agar semua pihak terlibat dalam pembangunan daerah, termasuk LSM. Masalahnya adalah tidak semua LSM sanggup untuk menangkap kehendak pimpinan daerah¹⁰.

Apa yang dikatakan ketua masyarakat adat Sidrap ada benarnya. Dari data partisipasi lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah terlihat bahwa hingga tahun 2012 terdapat 22 buah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam 4 bidang yaitu bidang politik dan hukum, bidang ekonomi dan pembangunan, bidang sosial budaya serta bidang agrarian dan masyarakat desa. Peningkatan paling

¹⁰ Data hasil Wawancara Juli 2012.

signifikan nampak pada jumlah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang politik dan hukum. Meski demikian, tidak selalu aktivitas lembaga swadaya masyarakat mendapat respons positif pemerintah daerah.

Dari 22 buah lembaga swadaya masyarakat yang ada pada tahun 2012, tercatat hanya 5 lembaga yang memiliki hubungan kerja resmi dengan pemerintah daerah. Isu-isu yang digarap juga terbatas pada bidang sosial mulai menempati posisi sentral dalam aktivitas lembaga swadaya masyarakat yang resmi terdaftar di Bappeda Kabupaten Sidrap. Masih terdapat lembaga swadaya masyarakat lainnya yang memiliki akte pendirian, tetapi belum terdaftar pada data base pemerintah daerah. Setiap lembaga memiliki peran penting dalam pengawasan pembangunan kabupaten.

Meski demikian, lembaga sosial masyarakat Kabupaten Sidrap membutuhkan lebih dari sekedar keterlibutan dalam program pemerintah. Peran dan posisi sebagai unsur subkultur sosial mengharuskan lembaga swadaya masyarakat Kabupaten Sidrap meredefinisi makna partisipasi dan kerjasama. Partisipasi lembaga swadaya masyarakat selama ini baru bergerak pada level media pemerintah. Artinya, lembaga swadaya masyarakat semata-mata ikut terlibat dalam program pemerintah. Keterbatasan sumber daya, baik keuangan maupun manusia menjadi kendala pemuknaan partisipasi. Dari sisi keuangan, secara umum lembaga swadaya masyarakat belum dapat disebut mandiri. Demikian pula dari sisi sumber daya manusia, dibutuhkan lebih banyak orang yang secara nurani terpenggil untuk memberdayakan lembaga swadaya masyarakat sebagai kekuatan subkultur sosial.

Bhattacharyya dalam Ndraha (1987 : 102), mengartikan partisipasi sebagai :

Pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Dalam kamus sosiologi modern menyebutkan partisipasi adalah suatu keadaan dimana seseorang ikut merasakan bersama-sama dengan orang lain sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial. Ini merupakan kesadaran manusia yang dimotivasi oleh kebutuhan untuk berkelompok, serta melalui komunikasi dan kegiatan bersama.

Dalam konteks yang dimaksudkan Bhattacharyya, maka partisipasi LSM di Sidrap masih jauh dari apa yang diharapkan. Meski demikian, peneliti berpendapat bahwa dengan kondisi sosial ekonomi yang masih terbatas sebagaimana yang ada di Kabupaten Sidrap, maka upaya perhatian entosi sepenuhnya harus dimulai dari pemerintah. Pemerintah yang harus lebih membuka diri pada LSM untuk tumbuh dan berkembang.

4.2.2.2. Situasi Kelompok

Situasi kelompok adalah bagian penting lainnya yang menentukan peran dan fungsi LSM di Sidrap. Dalam situasi kelompok yang baik partisipasi pembangunan memiliki makna yang mendalam sebagaimana diungkapkan Cohen dan Uphoff (1977:8) mendiskripsikan bahwa ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terdiri atas (1) *participation in decision making* (partisipasi dalam pembuatan keputusan), (2) *participation in implementation* (partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan), (3) *participation in benefits* (partisipasi dalam pemanfaatan), dan (4) *participation in evaluation* (partisipasi dalam evaluasi).

Dari hasil wawancara dengan LSM ditemukan bahwa partisipasi dalam

pembuatan keputusan pembangunan adalah sesuatu yang jarang ditemui. Tetapi partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan meningkat secara pesat. Sesuatu yang kini mulai dipandang dengan prihatin oleh asisten bidang Pembangunan:

“Saya khawatir jika partisipasi antara pemerintah dan LSM selalu diartikan sebagai keterlibatan LSM dalam mengerjakan program pembangunan daerah. Keterlibatan LSM mestinya terbatas pada tahap perumusan kebijakan dan pengalokasian sumber daya. LSM baru akan terlibat pada saat penilaian dan evaluasi program. Tapi seperti yang dapat dilihat, kondisi sekarang memang demikian. LSM sendiri salah tafsir tentang peran mereka dalam pembangunan.”

Pendapat di atas sejalan dengan apa yang diungkapkan Ndraha (1990:105) dengan memanfaatkan temuan Goldsmith dan Bulstain. Menurut Ndraha masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika :

- 1) Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.
- 2) Partisipasi memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.
- 3) Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat.
- 4) Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang, jika mereka tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan.

Jadi partisipasi dalam bentuk terlibat langsung adalah sesuatu yang seharusnya dihindari. Hal ini nampaknya didukung oleh pimpinan LSM Kompleks:

“Kita tidak dapat mengharapkan LSM tumbuh dan berperan seperti apa yang terlihat saat ini. Meskipun partisipasi LSM ada tetapi partisipasi itu mengarah pada hal yang tidak sehat. LSM tidak perlu terlibat dalam pengerjaan proyek pemerintah daerah. Saya melihat bahwa situasi kelompok seperti ini justru melemahkan LSM¹¹.”

¹¹ Data hasil wawancara Juli 2012.

Pendapat ini tentu saja mendukung pendapat badan PBB UNDP (1996) yang mengkategorikan tingkat partisipasi atas (1) *manipulation*, yakni partisipasi tingkatan terendah yang diikuti oleh indoktrinasi, (2) *konsultasi*, dimana terjadi komunikasi dua arah tetapi stake holder tidak memiliki harapan bahwa usulan mereka akan diterima sesuai harapan mereka. Model ini disebut juga "participating in participation", (3) *pembangunan konsensus*, yakni suatu interaksi saling memahami dan dalam posisi saling bernegosiasi serta toleransi, (4) *Pembuatan keputusan*, yakni tahapan dimana konsensus didasarkan atas keputusan kolektif dan pada rasa tanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu, (5) *Pendidikan resiko*, yaitu tingkatan dimana proses keputusan didasarkan pada pertimbangan akibat dari hasil yang menyangkut keuntungan, hambatan dan implikasi, (6) *Partnership*, yakni kerjasama secara equal menuju hasil yang saling menguntungkan, dan (7) *Self-management* yakni puncak dari partisipasi dimana stakeholder berinteraksi dalam proses saling belajar (*learning process*) untuk mengoptimalkan hasil.

4.2.2.3. Kontribusi LSM pada Tujuan Bersama

Tetapi dapatkah LSM di Kabupaten Sidrap dinilai berhasil apabila mereka tidak diikutsertakan dalam kegiatan proyek pembangunan? Pimpinan DPRD Kabupaten Sidrap memiliki pendapat yang menarik. Menurutnya, kontribusi LSM pada tujuan bersama hanya dapat dilihat jika LSM memang terlibat dalam kegiatan fisik,

"Sukar bagi anda untuk mengutakan orang berpartisipasi atau tidak dalam sebuah proyek pembangunan. Selayaknya memang LSM diberikan kesempatan ikut bekerja dalam pengerjaan proyek fisik. Dengan demikian, maka LSM tidak hanya dinilai dari pandai mengkritik. LSM yang hanya bisa mengkritik adalah LSM yang sudah lama berlalu¹²."

Peneliti berpendapat bahwa kontribusi pada tujuan pembangunan daerah tidak harus seperti apa yang tercatat di sana. Pengawasan LSM dalam proyek bantuan sosial bencana misalnya, telah berhasil mencegah kebocoran dana pembangunan daerah. Demikian juga pengawasan LSM atas program BOS di Kabupaten Sidrap yang berhasil mencegah salah sasaran BOS.

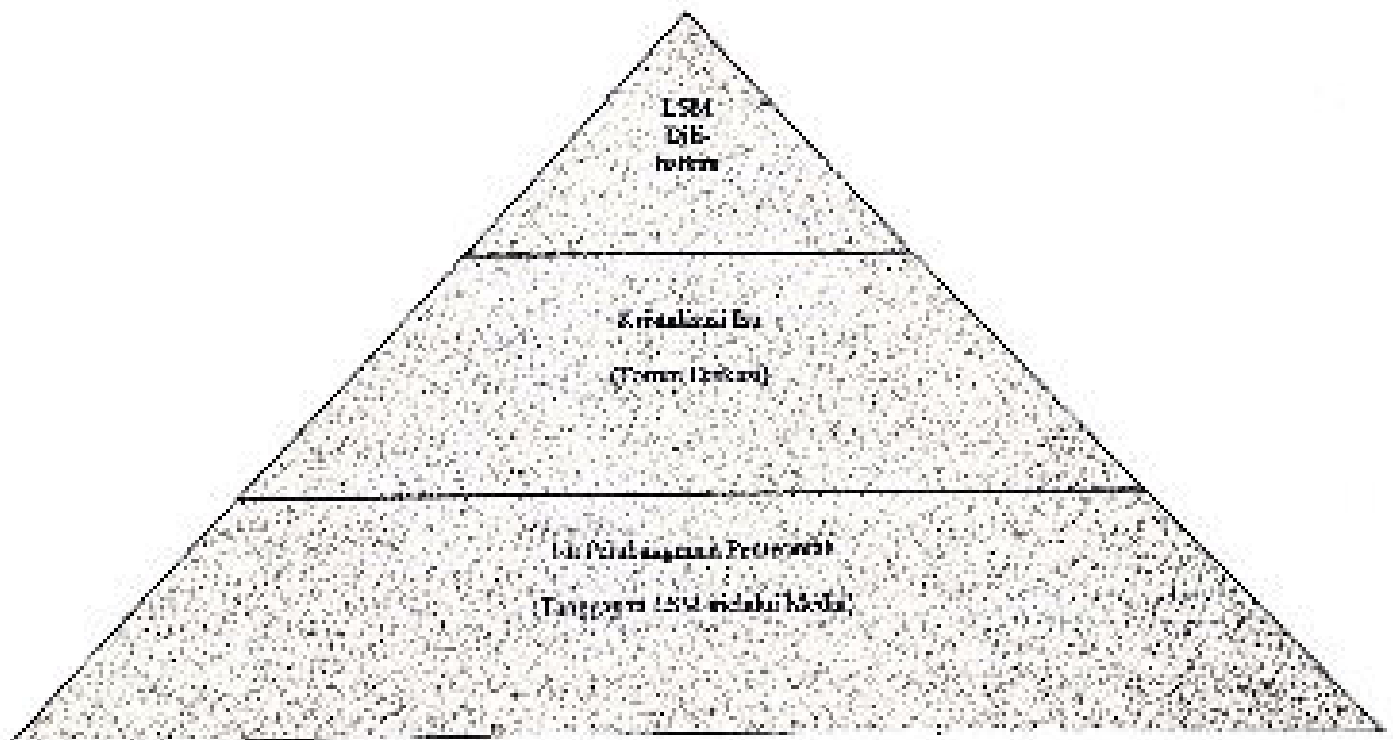
Mengenai kontribusi pada tujuan bersama, Paloma (1994:356) dengan mengutip pernyataan Amilai Etzioni menegaskan bahwa kontribusi pada tujuan bersama dimaksud dipengaruhi oleh dua faktor yaitu (1) mekanisme kerja, (2) mekanisme kontrol, dan (3) pengarahan aktor.

Mengenai mekanisme kerja pemerintah daerah sudah menentukan mekanisme dimana LSM dan pemerintah dapat bertemu pada satu titik. Mekanisme kerja itu dapat dilihat dari saat dimana isu mulai digulirkan pemerintah daerah. Tanggapan tahap pertama LSM adalah tanggapan media. Selanjutnya LSM dapat bertemu dengan pemerintah dalam forum diskusi. Dalam forum diskusi itulah LSM dapat membangun komunikasi aktif dengan pemerintah.

Secara rinci kontinuitas pertemuan dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4

Bentuk Kontak dan Kontribusi LSM bagi Pembangunan Daerah Sidrap



Pada kontak ditingkat kristalisasi isu nampak bahwa mekanisme kontrol menjadi sasaran utama Pemerintah Daerah. Pemerintah selalu ingin LSM dapat terlihat dalam semua kegiatan pembangunan, tetapi keterlibatan mereka dibatasi sebagaimana apa yang terlihat dalam table berikut ini.

Tabel 8
Pembatasan Kontrol LSM

No.	Kegiatan	Batas Kontrol	Tanggapan LSM
1	2	3	4
1.	Penyelenggaraan urusan wajib bidang pendidikan dan penyaluran BOS.	LSM diperkenankan hanya meminta data dari sekolah penerima BOS.	Kurang maksimal
2.	Kesetiaan dan kesehatan lingkungan	LSM diperkenankan mengawasi pembelian peralatan rumah sakit	Data disimpan
4.	Lingkungan	LSM diperkenankan mengawasi program AMDAL.	LSM kekurangan sumberdaya
5.	Pekerjaan Umum	LSM mengawasi kualitas konstruksi jalan kabupaten	LSM kekurangan sumber daya
6.	Perencanaan Pembangunan Daerah	LSM hanya dapat mengakses data hasil pembangunan	Hasil pengawasan tidak optimal
7.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	LSM terlibat dalam penyuluhan	Hasil optimal
8.	Kesatuan Bangsa	LSM terlibat dalam penciptaan kondisi sosial politik yang stabil	Hasil optimal
9.	Pengawasan rekrutmen pegawai pemerintah	LSM ikut dalam pengawasan data	LSM gagal mencapai hasil optimal karena beberapa oknum terlibat dalam perecahan.

Sumber : Olah Data Wawancara, 2012.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masalah partisipasi berpulang pada diri dan institusi LSM sendiri. Hal terpenting pertama tentu saja penguatan diri dan lingkungan dalam LSM. Supriatna (1985:32) yang menulis :

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak datang dengan sendirinya tetapi harus diusahakan terus menerus secara tekun dan diberi kesempatan untuk tumbuh, berakar, dan berkembang secara wajar sehingga masyarakat mempunyai sikap, orientasi, persepsi, dan identifikasi selaku subyek di dalam penyelenggaraan pembangunan...

Dari perspektif peneliti, masih banyak hal yang memang harus dibenahi dari dalam tubuh LSM itu sendiri. Karena tidak semua hal dapat dikerjakan. Sasaran pembenahan LSM ada tiga. Pertama, pembinaan sumber daya manusia. Kedua, pembinaan sumber daya keuangan. Ketiga, pembinaan sumber daya material.

4.2.2.4. Tanggung Jawab Bersama LSM

Tanggung jawab bersama dapat dilibut semua-mata mengarah pada penciptaan ketertiban sosial. Paloma (1994:362) menjelaskan bahwa tanggung jawab bersama berkenan dengan model rasional dimana ada pertimbangan terhadap faktor-faktor (1) informasi tindakan alternatif beserta konsekuensinya, (2) perhitungan untung rugi berbagai nilai, dan (3) seperangkat nilai yang telah disepakati.

Dalam kasus di Kabupaten Sidrap, dapat dikatakan bahwa pemerintah yang memiliki tanggung jawab terbesar untuk menggerakkan partisipasi. Penggerakan pemerintah dapat dibaca dalam tanggapan Bupati Sidrap:

"Pemerintah daerah harus memandang masyarakat, termasuk LSM sebagai

potensi yang harus diberdayakan. Dengan memberdayakan LSM berarti pemerintah sedang mendidik masyarakat ke arah yang lebih dewasa dan lebih baik. Agenda pemerintah daerah ke depan adalah menjalin kerjasama dalam bentuk permanen dengan LSM. Pemerintah dapat menentukan batas-batas peran mereka¹³.

Dari apa yang diungkapkan Bupati Sidrap, peneliti melihat adanya niatan tulus pemerintah untuk memberdayakan LSM. Karena menurut peneliti, sekuat apaun LSM, peran dan partisipasi mereka terbatas pada bidang-bidang yang kecil. Beberapa bidang yang lebih luas pernah dicoba untuk diterapkan peran. Tetapi sebagaimana dapat dilihat, peran LSM amat minim, beberapa bahkan melenceng.

Peran berhubungan dengan tanggung jawab bersama pada titik yang disebut Paloma sebagai ruang dimana rasionalisasi memiliki tempat. Rasionalisasi dalam keterlibatan lembaga swadaya masyarakat dapat diamati dalam jumlah informasi yang disebarkan media massa lokal, intensitas nilai lokal yang melingkupi informasi-informasi itu dan pandangan umum terhadap hubungan nilai dan informasi.

Pada kasus Kabupaten Sidrap, informasi pengawasan pembangunan yang berasal dari lembaga swadaya masyarakat meningkat tajam dari 56 buah pada tahun 2009 menjadi 111 pada tahun 2010 dan meningkat mencapai 488 pada tahun 2011. Nilai-nilai yang meliputi informasi itu sama sekali tidak berhubungan dengan nilai lokalitas. Pemberitaan media tentang hubungan lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah mengedepankan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Nilai-nilai manajemen modern yang jauh dari prinsip lokalitas.

¹³ Data wawancara Juli 2012.

4.2.3. Upaya Pemerintah Daerah Meningkatkan Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat.

4.2.3.1. Pembinaan Melalui Perjanjian Bersama

Perjanjian bersama merupakan salah satu bentuk dokumen yang menjelaskan tentang ketepatan para pihak yang bersepakat pada tujuan bersama. Dalam lingkup pemerintahan, perjanjian bersama dapat dilakukan antara unit-unit pemerintahan untuk tujuan tertentu dan dapat pula terjadi bahwa perjanjian itu mengikat pihak-pihak tertentu di luar pemerintahan yang memiliki hubungan dengan pemerintahan. Perjanjian bersama antara pemerintah daerah Kabupaten Sidrap dengan lembaga swadaya masyarakat merupakan upaya pemerintah daerah mewujudkan pembinaan terhadap kekuatan masyarakat yang berperan aktif dalam penguasaan pembangunan.

Perjanjian kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga swadaya masyarakat didasarkan pada peran pemerintah daerah selaku penanggungjawab kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Maksud dari perjanjian itu sendiri adalah memberikan jaminan dan kepastian hukum aktivitas lembaga swadaya masyarakat. Dalam pengertian teknis, lembaga kemasyarakatan yang memiliki hubungan kerjasama dengan pemerintah memiliki perlindungan hukum atas semua tindakan dan aktivitasnya. Sebaliknya, tampak jelas bahwa pemerintah memberikan pembinaan dalam arti pembatasan fungsi lembaga swadaya masyarakat.

Menarik untuk mencermati bahwa hanya ada lima lembaga swadaya masyarakat yang memiliki hubungan kerja resmi dengan pemerintah daerah Kabupaten Sidrap. Kelima lembaga dimaksud masing-masing LSM-KOMPLEKS

(lembaga swadaya masyarakat komite masyarakat pemantau legislatif dan eksekutif), LSM IPEK (lembaga swadaya masyarakat lembaga pemberdayaan ekonomi kerakyatan), LSM KIPFA RI, lembaga mitra lingkungan, dan PKBI (perkumpulan keluarga berencana Indonesia). Menarik untuk dicermati bahwa kelima lembaga ini ternyata aktif dalam proses pemilihan kepala daerah tahun 2008. Pandangan bahwa pemerintah daerah hanya memilih lembaga swadaya masyarakat yang terlibat aktif dalam pemilihan kepala daerah selanjutnya diperhatikan pemerintah.

Suara protes yang datang dari 17 lembaga swadaya masyarakat telah ditanggapi pemerintah daerah dalam pertemuan 13 April 2010. Pemerintah menyatakan akan menjalin hubungan kerjasama yang diikat dalam perjanjian bersama selama lembaga swadaya masyarakat memenuhi semua persyaratan dasar yang diminta dalam perjanjian kerjasama. Tiga masalah mendasar bagi 17 lembaga swadaya masyarakat adalah (a) lembaga swadaya masyarakat tidak memiliki akta pendirian yang disahkan akte notaris, (b) lembaga swadaya masyarakat tidak memiliki sumber dana tetap, dan (c) lembaga swadaya masyarakat tidak memiliki kantor tetap.

Keinginan pemerintah untuk menertibkan lembaga swadaya masyarakat dengan memperlakukan persyaratan di atas terkesan berlebihan. Tetapi fakta bahwa banyak lembaga swadaya masyarakat hanya merupakan lembaga papan nama atau lembaga yang seribu mencantumkan nama tanpa aktivitas, telah meresahkan masyarakat Kabupaten Sidrap. Persyaratan yang diajukan pemerintah pada akhirnya lebih terlihat realistis daripada tuntutan lembaga swadaya masyarakat.

Perjanjian kerjasama pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat memberikan keuntungan baik kepada pemerintah maupun LSM. Bagi pemerintah, pengendalian populasi LSM cukup penting karena kontrol tanpa arah dapat berakhir pada tindakan chaos. Sementara bagi lembaga swadaya masyarakat, pemberian pembinaan bermakna pemberian bantuan keuangan.

4.2.3.2. Bantuan Keuangan

Hingga tahun 2011, jumlah dana yang tersalur dalam kegiatan pembinaan lembaga sosial masyarakat adalah sebanyak Rp. 115.000.000. Dana itu berasal dari pos pembinaan kelembagaan Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sidrap. Jumlah itu merupakan jumlah akumulasi yang berawal dari tahun 2009 sebesar Rp.7.000.000, tahun 2010 sebesar Rp.33.000.000, dan tahun 2011 sebesar Rp.75.000.000. Susunan pemberian bantuan adalah lembaga-lembaga yang memiliki hubungan langsung dengan pemerintah daerah.

Pada tahun 2009 dan 2010, bantuan keuangan seluruhnya diberikan dalam bentuk bantuan tunai. Tetapi sejak tahun 2011, bantuan keuangan diberikan dalam bentuk bantuan tunai maupun non-tunai. Jumlah bantuan tunai tahun 2011 untuk kelima lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Sidrap adalah Rp.25.000.000 dan sisanya berbentuk paket program pembinaan sumber daya manusia sebesar Rp.50.000.000.

Program yang dilakukan sehubungan dengan lembaga swadaya masyarakat adalah program pembinaan sumber daya manusia, program pengenalan perencanaan

pembangunan dan pengawasan, serta program pengembangan aplikasi informasi. Program dimaksud dilaksanakan sepanjang tahun 2011 dan melibatkan semua unsur lembaga swadaya masyarakat. Artinya bahwa, sejak tahun 2011, semua lembaga swadaya masyarakat telah mendapat bantuan keuangan tetapi dikemas dalam bentuk pelatihan.

4.2.3.3. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia lembaga swadaya masyarakat dilakukan dalam dua jenis kegiatan. Pertama, pelatihan. Kedua, pendampingan. Pada tahun 2011 dilakukan enam kali pelatihan terhadap anggota lembaga swadaya masyarakat yang berjumlah 180 orang. Dari jumlah target itu, Dinas Kesbanglinmas Kabupaten Sidrap hanya mampu menjangkau 102 orang anggota lembaga swadaya masyarakat. Sementara sisanya berasal dari Karang Taruna dan organisasi kepemudaan.

Modul pemerintah daerah dalam pelatihan meliputi modul pemahaman kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, teknik komunikasi, pengawasan pembangunan, kontrol sosial dan perencanaan pembangunan. Dalam pandangan peserta, materi yang disampaikan oleh pemateri lebih dekat dengan kepentingan pemerintah daripada kepentingan lembaga swadaya masyarakat. Namun pemerintah daerah memandang bahwa materi yang disampaikan memenuhi standar dasar pelatihan dengan tujuan penyamaan persepsi.

Pada kenyataannya, sumber daya manusia lembaga swadaya masyarakat memang masih jauh dari apa yang diharapkan. Rata-rata jenjang pendidikan dari 102 anggota LSM yang tersebar dalam 22 organisasi yang ada 57% tamat sekolah lanjutan tingkat atas, 41% sarjana, dan 2% pasca sarjana. Sementara kemampuan teknis pekerjaan perencanaan dari anggota lembaga swadaya masyarakat umumnya rendah. Kondisi ini nampaknya relevan dengan alasan pemerintah daerah memasukan banyak materi kepengemrintahan dan perencanaan dalam modul pelatihan.

Tahun 2012, pemerintah Kabupaten Sidrap herencana melakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan. Pelatihan akan dilaksanakan dalam 4 angkatan dengan sasaran para pimpinan dan kader lembaga swadaya masyarakat. Sementara kegiatan pendampingan akan melibatkan 12 orang pejabat pemerintah yang ditunjuk karena kedekatannya dengan lembaga swadaya masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan paparan penelitian pada bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa :

1. Partisipasi lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah di Kabupaten Sidrap diwujudkan dalam bentuk (a) fisik; berupa keterlibatan lembaga swadaya masyarakat dalam perencanaan program dan pengawasan program pembangunan, dan (b) non fisik; berupa penciptaan situasi kelompok dan ikatan emosional yang menjamin terpeliharanya hubungan lembaga swadaya masyarakat dengan pemerintah.
2. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Sidrap dalam meningkatkan partisipasi lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah antara lain pertama, pembinaan melalui perjanjian bersama. Kedua bantuan keuangan secara tunai dan non tunai. Ketiga pembinaan sumber daya manusia anggota dan pengurus lembaga swadaya masyarakat guna menciptakan lembaga swadaya masyarakat sebagai wadah kontrol yang efektif.

5.2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat direkomendasikan sebagai hasil akhir studi ini meliputi :

1. Partisipasi lembaga swadaya masyarakat dalam bentuk partisipasi fisik disarankan untuk dibatasi karena pada taraf tertentu lembaga swadaya masyarakat justru berperan sebagai lembaga pelaksana proyek pembangunan. Sebaliknya, partisipasi dalam bentuk non fisik selayaknya ditingkatkan dalam rangka peningkatan pengawasan pembangunan. Pembentukan isu-isu pembangunan maupun isu kebocoran pembangunan oleh lembaga swadaya masyarakat melalui media massa justru memperkuat peran lembaga swadaya masyarakat.
2. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Sidrap dalam meningkatkan partisipasi lembaga swadaya masyarakat selayaknya diarahkan pada tiga agenda pokok. Pertama, pembinaan melalui perjanjian bersama yang lebih selektif dan profesional. Kedua bantuan keuangan dari pos pembinaan kelembagaan Dinas Kesatuan Bangsa dan dapat dikembangkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sidrap yang terkait. Ketiga pembinaan sumber daya manusia anggota dan pengurus lembaga swadaya masyarakat dan mengintensifkan wadah dialog yang selama ini sudah berjalan, agar lembaga swadaya masyarakat yang tidak memiliki kerja resmi dengan pemerintah dapat menyalurkan aspirasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrow, Martin. 1998. *Birokrasi*. M. Rusli Karim dan Totok Daryanto (pen). Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Alfian dan Syamsuddin, Nazaruddin (ed). 1991. *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Al Rasyid, Harun. 1994. *Statistika Sosial*. Teguh Kismantoroedji (penyunting). Bandung : Program Pascasarjana UNPAD.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Blau, Peter M., dan Meyer Marshall. 2000. *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*. Penerjemah : Slamet Rijanto. Jakarta : Prestasi Pustakaraya.
- Djopari, J.R.G. 1995. *Hubungan Pusat Daerah : Fungsi Akses dan Kebebasan, dalam Widyapraja*. Jakarta : IIP Press.
- Dwiyanto, Agus. 1995. *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. Makalah Seminar Sehari Kinerja Organisasi Publik Kebijakan dan Penerapannya, 20 Mei 1995. Yogyakarta : Jurusan Administrasi Negara Fisipol UGM.
- Effendy, Onong, Uchjana. 1992. *Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikasi*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- _____. 1999. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Effendy, Sofyan. 2000. *Pelayanan Publik, Pemerataan dan Admnistrasi Negara Baru dalam Prisma Nomor 12 Pelayanan Publik Sampai Di Mema*. Jakarta : LP3ES.
- Gaspersz , Vincent. 1997. *Manajemen Kualitas : Penerapan Konsep – Konsep dalam Manajemen Bisnis Total*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Gibson, James L., John M. Ivancevich & James H. Donnely Jr. 1997. *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*. Jilid 1, Edisi kedelapan. Terjemahan Nunuk Adiani. Jakarta : Binarupa Aksara.
- Hidayat dan Sucherly. 1986. *Peningkatan Produktivitas Organisasi Pemerintah dan Pegawai Negeri Kasus Indonesia*, dalam Jurnal Prisma, Nomor 12 LP3ES, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrow, Martin. 1998. *Birokrasi*. M. Rusli Karim dan Totok Daryanto (pen). Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Alfiun dan Syamsuddin, Nuzaruddin (ed). 1991. *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Al Rasyid, Harun. 1994. *Statistika Sosial*. Teguh Kismantoroadji (penyunting). Bandung : Program Pascasarjana UNPAD.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Blau, Peter M., dan Meyer Marshall. 2000. *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*. Penterjemah : Slamet Rijanto. Jakarta : Prestasi Pustakaraya.
- Djopari, J.R.G. 1995. *Hubungan Pusat Daerah : Fungsi Akses dan Kebebasan, dalam Widyayoga*. Jakarta : IIP Press.
- Dwiyanto, Agus. 1995. *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. Makalah Seminar Sehari Kinerja Organisasi Publik Kebijakan dan Penerapannya, 20 Mei 1995. Yogyakarta : Jurusan Administrasi Negara Fisipol UGM.
- Effendy, Onong, Uchjana. 1992. *Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikasi*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- _____. 1999. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Effendy, Sofyan. 2000. *Pelayanan Publik, Pencerataan dan Administrasi Negara Baru dalam Prisma Nomor 12 Pelayanan Publik Sampai Di Mana*. Jakarta : LP3ES.
- Gaspersz, Vincent. 1997. *Manajemen Kualitas : Penerapan Konsep – Konsep dalam Manajemen Bisnis Total*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Gibson, James L., John M. Ivancevich & James H. Donnelly Jr. 1997. *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*. Jilid I, Edisi kedelapan. Terjemahan Nunuk Adiani. Jakarta : Binarupa Aksara.
- Hidayat dan Sucherly. 1986. *Peningkatan Produktivitas Organisasi Pemerintah dan Pegawai Negeri Kasus Indonesia*, dalam Jurnal Prisma, Nomor 12 LP3ES, Jakarta.

- Kumoroatomo, Wahyudi. 1996. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : Rosdakarya.
- Mas'ood, Mohar dan Colin MacAndrews. 1993. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta : Gadjah Mada Press.
- Moerir, H. A. S. 1995. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Moore, Frazier. H. 1987. *Manajemen Masyarakat, Prinsip, Kasus, dan Masalah*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Muhaimin, Yuliyu dan Colin McAndrews. 1981. *Masalah-masalah Pembangunan Politik*. Yogyakarta : UGM Press.
- Nazir, Muhammad. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ndraka, Taliziduhu. 1995. *Budaya Pemerintahan dan Dampaknya Terhadap Pelayanan Kepada Masyarakat*. Jakarta : Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi Ketiga.
- _____. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- _____. 1998. *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- _____. 2000. *Ilmu Pemerintahan I - V*. BKU Ilmu Pemerintahan Jakarta : IIP-UNPAD.
- _____. 2003. *Kybernetology Jilid 1 dan 2*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ngadijono A.J. 1984. *Kelompokan dan Masyarakat*. Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Pace, Wayne. R, dan Faulca, F. Dan, 1998, *Komunikasi Organisasi, Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Purandji, S. 1994. *Profesionalisme Aparatur Negara Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Widyapraya*, Edisi Ke-19 Tahun III Jakarta : IIP Depdugri.
- Poloma, Margaret M. 1994. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo.

- Prawirohardjo, Soewargono. 1993. *State of The Art dari Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Karya Dharma IIP.
- Rasyid, M., Ryaas. 1991. *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru*. Jakarta : Yarsif Watampone.
- _____. 1997. *Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Kepemimpinan dan Etika*. Jakarta : Yarsif Watampone.
- Robbins, Stephen P. 1994. *Teori Organisasi : Struktur, Desain dan Aplikasi* edisi 3. Alih Bahasa : Jusuf Udaya. Jakarta : Arcan.
- Ruslan, Rosady. 1998. *Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi (Konsep dan Aplikasi)*. Jakarta : Rajawali Press.
- Saefullah, A. Djadja. 1999. *Konsep dan Metode Pelayanan Umum, dalam Publik* Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 1 Nomor 1. Bandung : UNPAD.
- Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sedarmayanti. 1996. *Tata Kerja dan Produktivitas Kerja dan Tinjauan dari Aspek Ergonomi atau Kaitan Antara Manusia dengan Lingkungan Kerjanya*. Jakarta : Bandar Maju.
- Siagian, Sondang P. 1998. *Manajemen Abad 21*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Simamora, Sahat, Drs. 1985. *Pembangunan Politik dalam Perspektif*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sudarsono, Juwono. 1982. *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik sebuah bunga rampai*. Jakarta : Gramedia.
- Supranto. 1997. *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk Meningkatkan Pangsa Pasar*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Thoha, Miftah. 1991. *Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi*. Yogyakarta : Media Widya Mandala.
- _____. 1998. *Deregulasi dan Debirokratisasi Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Masyarakat Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*. Jakarta : PT. Pustaka LP3ES.
- _____. 1999. *Prilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.

- Prawirohardjo, Soewargono. 1993. *State of The Art dari Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Karya Dharma IIP.
- Rasyid, M., Ryaas. 1991. *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru*. Jakarta : Yarsif Watampone.
-
- _____. 1997. *Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Kepemimpinan dan Etika*. Jakarta : Yarsif Watampone.
- Robbins, Stephen P. 1994. *Teori Organisasi : Struktur, Desain dan Aplikasi* edisi 3. Alih Bahasa : Jusuf Udaya. Jakarta : Arcan.
- Ruslan, Rosady. 1998. *Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi (Konsep dan Aplikasi)*. Jakarta : Rajawali Press.
- Saefullah, A. Djadja. 1999. *Konsep dan Metode Pelayanan Umum*, dalam Publik Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 1 Nomor 1. Bandung : UNPAD.
- Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sedarmayanti. 1996. *Tata Kerja dan Produktivitas Kerja dan Tinjauan dari Aspek Ergonomi atau Kaitan Antara Manusia dengan Lingkungan Kerjanya*. Jakarta : Bandar Maju.
- Siagian, Sondang P. 1998. *Manajemen Abad 21*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Simamora, Sahat, Drs. 1985. *Pembangunan Politik dalam Perspektif*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sudarsono, Juwono. 1982. *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik sebuah bunga rampai*. Jakarta : Gramedia.
- Supranto. 1997. *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk Meningkatkan Pangsa Pasar*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Thoha, Miftah. 1991. *Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi*. Yogyakarta : Media Widya Mandala.
-
- _____. 1998. *Deregulasi dan Debirokratisasi Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Masyarakat Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*. Jakarta : PT. Pustaka LP3ES.
-
- _____. 1999. *Prilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.

- Tjiptono, Fandi. 1996. *Manajemen Jasa*. Yogyakarta : Andi.
- Triguno. 1997. *Budaya Kerja : Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif Untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta : PT. Golden Terayon Press.
- Warwick, Donald P. 1993. *A Theory of Public Bureaucracy : Politics, Personality and Organization in The State Department*. Cambridge, Mass : Harvard University Press.
- Wijaya, A.W. 2000. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Yuwono, S. 1985. *Ikhtisar Komunikasi Administrasi*. Yogyakarta : Liberty.